



KEMENTERIAN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

RENCANA STRATEGIS

**DIREKTORAT JENDERAL
ASIA PASIFIK DAN AFRIKA**

2025 – 2029

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika tahun 2025 – 2029 adalah fondasi utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Dokumen ini berfungsi sebagai peta jalan strategis bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika selama lima tahun ke depan, memastikan roda diplomasi dan kerja sama internasional berjalan selaras untuk mencapai tujuan Asta Cita.

Renstra ini dirancang untuk secara spesifik mendukung pencapaian Visi Indonesia Emas 2045, khususnya dalam memantapkan ketangguhan diplomasi serta kontribusi aktif Indonesia pada tata kelola global.

Dengan mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Luar Negeri dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025 – 2029, Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika merumuskan visi: **“Memantapkan ketangguhan diplomasi Indonesia dalam memperkuat hubungan internasional yang kondusif di kawasan Asia Pasifik dan Afrika serta berkontribusi pada tata kelola global yang mendukung pembangunan nasional, guna mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.”**

Kami menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Renstra ini. Kami berharap dokumen ini tidak hanya menjadi landasan perencanaan dan pelaksanaan program kerja, tetapi juga instrumen akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Berpegang teguh pada visi ini, semua kegiatan diplomasi akan diimplementasikan sebaik-baiknya demi peningkatan peran aktif dan kepentingan nasional Indonesia di kawasan Asia Pasifik dan Afrika.

Jakarta, 17 Desember 2025

Plt. Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika



Zelda Wulan Kartika

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	
I.1 Kondisi Umum	1
I.2 Potensi dan Permasalahan	3
I.2.1 Potensi	3
I.2.2 Permasalahan dan Tantangan	9
I.2.3 Analisis SWOT	14
I.3 Capaian Rencana Strategis Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika 2020 – 2024	18
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	
II.1 Visi Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika	49
II.2 Misi Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika	49
II.3 Tujuan Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika	50
II.4 Sasaran Program Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika	52
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	
III.1 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Luar Negeri	62
III.1.1 Arah Kebijakan Kementerian Luar Negeri	65
III.2 Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika	66
III.2.1 Arah Kebijakan Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika	66
III.2.2 Strategi Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika	66
III.3 Mitigasi Risiko	69
III.4 Kerangka Regulasi	75
III.5 Kerangka Kelembagaan	77
III.5.1 Peran Strategis Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika	77
III.5.2 Fungsi Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika	77
III.5.3 Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika	78
III.5.4 Evaluasi Kelembagaan dan Penyederhanaan Birokrasi	79
III.6 Penguatan Ketatalaksanaan dan Proses Bisnis	80
III.7 <i>Data Economic Intelligence</i>	80
III.8 Sumber Daya Manusia Berbasis Manajemen Talenta	81
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	
IV.1 Target Kinerja	83
IV.2 Kerangka Pendanaan	87

BAB V PENUTUP	90
---------------------	----

LAMPIRAN

1. Matriks Arah Kebijakan dan Strategi
2. Matriks Kinerja dan Pendanaan

DAFTAR TABEL

Tabel II.1 Indikasi Risiko Sasaran Program Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika 2025 – 2029.....	57
Tabel III.1 Mitigasi Risiko Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika	70
Tabel IV.1 Sasaran Strategis, Indikator dan Target Kinerja Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Periode 2025 – 2029.....	83
Tabel IV.2 Proyeksi Kebutuhan Anggaran Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Periode 2025 – 2029	87

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1 Analisis SWOT	15
Gambar I.2 Negara Tujuan Ekspor Utama di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika 2020 – 2024	21
Gambar I.3 Indonesia-Africa Forum (IAF) II 2024	22
Gambar I.4 Indonesia-South and Central Asia (INASCA) Business Forum 2024	23
Gambar I.5 Negara Investor Utama di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika 2020 – 2024	26
Gambar I.6 Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara OIKN dan Kantor Gubernur Ibu Kota Astana	27
Gambar I.7 Jumlah Kesepakatan Bilateral Ditjen Aspasaf 2020 – 2024.....	30
Gambar I.8 <i>International Conference on Afghan Women’s Education</i> (ICAWWE) tahun 2022	38
Gambar I.9 <i>International Pacific Forum for Development</i> (IPFD) tahun 2022	40
Gambar I.10 <i>Flight Information Region</i> (FIR) RI – Singapura tahun 2022	43
Gambar I.11 Penghargaan Peringkat Pertama Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Eselon II Tahun 2022.....	47
Gambar I.12 Piagam Peringkat Ke Dua Penghargaan Hasil Pengawasan Kearsipan Internal Kementerian Luar Negeri Tahun 2024	48
Gambar II.1 Visi Direktorat Asia Pasifik dan Afrika 2025 – 2029	49
Gambar II.2 Misi Direktorat Asia Pasifik dan Afrika 2025 – 2029	50
Gambar II.3 Tujuan Direktorat Asia Pasifik dan Afrika 2025 – 2029	51
Gambar III.1 Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika.....	79
Gambar III.2 Demografi ASN Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika berdasarkan Gender	81
Gambar III.3 Demografi ASN Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika berdasarkan Jabatan.....	82

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Kondisi Umum

Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika mendukung visi Kementerian Luar Negeri sesuai Rencana Strategis 2020 – 2024, yaitu memimpin diplomasi yang aktif dan efektif untuk mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian. Dukungan tersebut dilaksanakan melalui penerapan politik luar negeri yang berlandaskan Prioritas 4+1, yang dijabarkan dalam Program Pemantapan Diplomasi dan Kerja Sama Internasional di kawasan Asia Pasifik dan Afrika.

Kawasan Asia Pasifik dan Afrika memiliki posisi strategis dari aspek geopolitik, ekonomi maupun sosial budaya. Dalam periode Renstra 2020 – 2024, kawasan ini menunjukkan dinamika termasuk tantangan karena pandemi COVID 19, adanya krisis geopolitik di kawasan yang berdampak pada kerawanan energi dan pangan serta ketidakstabilan global termasuk krisis kemanusiaan di Afghanistan dan konflik di Gaza, tren normalisasi negara-negara Timur Tengah dengan Israel dalam kerangka *Abraham Accords*, serta perubahan tatanan ekonomi termasuk aspek sosial budaya. Menanggapi tantangan tersebut, fokus diplomasi diarahkan pada upaya pemulihan sektor perekonomian dan kesehatan, selain tetap meneruskan diplomasi kedaulatan serta peningkatan peran kepemimpinan Indonesia di kawasan Asia Pasifik dan Afrika.

Dari sisi peran kepemimpinan Indonesia di forum kerja sama kawasan, Indonesia masih memiliki modalitas dalam menjunjung tinggi nilai dan prinsip dari Konferensi Asia-Afrika (KAA), yang membangkitkan solidaritas “*the Global South*”. Konsistensi ini memungkinkan Indonesia untuk mengemban antara lain Keketuaan Indonesia pada *core bodies Indian Ocean Rim Association* yakni *Core Group on Fisheries Management* periode 2021 – 2023, *Working Group on the Blue Economy* (WGBE) periode 2023 – 2025 serta sebagai *Chair Coral Triangle on Coral Reefs, Fisheries and Food Security* (CTI-CFF) tahun 2025 – 2026.

Konsistensi Indonesia memperjuangkan kemerdekaan negara Palestina berdasarkan *two-state solution* juga mendapatkan apresiasi dari dunia. Sebagai langkah nyata Indonesia yang selalu berpihak dalam membela kemanusiaan dan keadilan bagi bangsa Palestina, Indonesia terus mengupayakan bantuan kemanusiaan, hibah, kerja sama teknis, dan pengembangan kapasitas, termasuk pemberian bantuan operasional bagi Kedutaan Besar Palestina di Jakarta.

Diplomasi kedaulatan untuk memagari kedaulatan NKRI difokuskan kepada mengintensifkan upaya perundingan perbatasan dengan Filipina, Malaysia, Timor Leste dan Vietnam. Secara khusus, setelah perundingan selama 12 tahun, pada tahun 2022 Indonesia berhasil mencapai kesepakatan strategis dalam

perundingan batas laut dengan Filipina dan Vietnam. Selain itu, pada tahun 2023 Indonesia menyepakati dengan Malaysia dua Perjanjian Batas Laut Wilayah setelah berunding selama 18 tahun sejak tahun 2005.

Diplomasi kedaulatan tidak hanya melalui pendekatan secara bilateral, juga dilaksanakan melalui forum regional dan sub-regional kepada negara-negara Pasifik yang sejak lama dikenal memberikan perhatian terhadap isu-isu di wilayah timur Indonesia. Sambutan atas kiprah diplomasi Indonesia di komunitas Pasifik semakin tinggi karena Indonesia mampu menunjukkan kapasitas sebagai mitra pembangunan yang dapat diandalkan. Terdapat kecenderungan bahwa sikap negara-negara di kawasan ini semakin positif terhadap Indonesia dan menghormati kedaulatan Indonesia atas seluruh wilayahnya, khususnya atas Papua.

Selama kurun waktu lima tahun terakhir, keberhasilan memajukan agenda nasional kebijakan luar negeri telah dilaksanakan melalui berbagai forum, kerja sama, prakarsa atau rekomendasi serta kesepakatan bilateral. Fokus diplomasi dan kerja sama luar negeri tercermin pada upaya perluasan pasar ekspor, pembukaan akses pasar, peningkatan daya saing produk Indonesia, mengurangi hambatan perdagangan, peningkatan investasi dan perdagangan, peningkatan potensi pariwisata, kerja sama perbatasan, serta peran sentral Indonesia di kawasan Asia Pasifik dan Afrika

Sejumlah perjanjian ekonomi berhasil diselesaikan baik dalam bentuk *Preferential Trade Agreement*, *Free Trade Agreement*, *Comprehensive Economic Partnership Agreement*, maupun *Regional Comprehensive Economic Partnership*, termasuk dengan Korea, Australia, Mozambik, Iran, dan Persatuan Emirat Arab (PEA). Beberapa negosiasi perjanjian ekonomi untuk perluasan akses pasar juga berproses, antara lain dengan Mauritius, Tanzania, Sri Lanka, Bangladesh, Mauritius, Djibouti, Angola, Fiji, PNG dan *Gulf Cooperation Council* (GCC). Adapun Indonesia telah memiliki perjanjian PTA dengan Pakistan sejak 2018, di mana saat ini kedua negara tengah dalam proses negosiasi *Trade in Goods Agreement* (TiGA). Selain itu, tahun 2023, RI dan RRT berhasil menyepakati 4 protokol ekspor produk pertanian dan perikanan Indonesia ke RRT sebagai upaya memperluas akses pasar produk perikanan dan pertanian.

Indonesia akan terus menjaga dan meningkatkan kerja sama investasi dengan negara-negara sumber investasi seperti Persatuan Emirat Arab (PEA), Arab Saudi, dan Qatar serta memetakan potensi dengan sejumlah negara antara lain Maroko, Tunisia, Aljazair, dan Mesir.

Kawasan Asia Pasifik dan Afrika memiliki banyak peluang untuk optimalisasi potensi ekonomi dan akses pasar, baik di wilayah perbatasan sampai pada kawasan Afrika dan Pasifik. Upaya mengoptimalkan potensi tersebut dikembangkan melalui inisiatif kerja sama bilateral atau regional untuk

mewujudkan kepentingan nasional dalam kerangka Asta Cita. Beberapa potensi kerja sama telah teridentifikasi antara lain bidang pembangunan infrastruktur, migas, Energi Baru dan Terbarukan (EBT), pertanian, mineral kritis, ketahanan pangan, pendidikan, energi dan mineral, kesehatan, pertanian dan *peace-building*.

I.2 Potensi dan Permasalahan

Merujuk RPJPN 2025 – 2045, terdapat sepuluh *megatrend* global yang diperkirakan memunculkan sejumlah potensi kemajuan dan disrupsi yang perlu diantisipasi. Sepuluh *megatrend* global tersebut mencakup perkembangan demografi global, geopolitik dan geoekonomi, perkembangan teknologi, peningkatan urbanisasi global, konstelasi perdagangan global, tata kelola keuangan global, pertumbuhan *middle class*, peningkatan persaingan pemanfaatan sumber daya alam, perubahan iklim dan pemanfaatan luar angkasa¹.

Perkembangan pesat teknologi digital dan komputasi, terutama kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) akan semakin memicu perubahan transformatif yang berskala global, berjangka panjang dan bersifat sangat masif. Pandemi COVID-19 yang terjadi di periode 2020 – 2022 juga berkontribusi pada perubahan pola kehidupan di berbagai sektor, khususnya sosial dan ekonomi.

Dalam periode 2022 – 2024 juga terdapat peningkatan tajam kejahatan lintas negara, terutama yang terkait dengan *online scam* dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di kawasan Asia Pasifik dan Afrika.

I.2.1 Potensi

Pertumbuhan Ekonomi dan Kondisi Makroekonomi Kondusif

Momentum pemulihan perekonomian nasional terus terjaga khususnya berkat permintaan dalam negeri yang kuat. Pada kuartal I 2024, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat 5,11% (y-o-y), setara dengan tingkat pertumbuhan ekonomi sebelum masa pandemi COVID-19. Tingkat inflasi per April 2024 sebesar 3,0% (y-o-y), masih dalam kisaran target nasional, yakni $2,5\% \pm 1\%$ ². Indonesia mendapatkan rekognisi sebagai *full investment grade country* dari tiga lembaga pemeringkat internasional utama, dengan rating BBB/Stabil (Fitch), Baa2/Stabil (Moody's) dan BBB/Stabil (S & P Global) di tahun 2023 – 2024.

Indonesia merupakan negara dengan perekonomian terbesar ke-16 di dunia dan terbesar di ASEAN. Indonesia juga tercatat sebagai satu-satunya negara anggota ASEAN yang menjadi anggota G20, dengan PDB sebesar USD1,2 triliun di tahun

¹ Lampiran Permenlu No. 10/2025 Tentang Renstra Kemenlu Tahun 2025 – 2029

² Lampiran I PP No. 12/2025 tentang RPJMN tahun 2025 – 2029

2022. Dengan ini, Indonesia diprediksikan menjadi ekonomi terbesar ke-4 di dunia pada 2045³.

Pertumbuhan ekonomi positif tersebut juga didukung dengan kinerja positif pembangunan infrastruktur nasional, khususnya untuk mendukung konektivitas, kelistrikan, TIK, waduk dan saluran irigasi, serta sarana prasarana dasar. Kondisi ini juga ditopang dengan ketersediaan sumber daya alam yang besar dan beragam, khususnya cadangan Nikel, Timah, Bauksit dan Tembaga, potensi Energi Baru Terbarukan, maupun potensi produksi perikanan serta pertanian.

Industri halal merupakan mesin pertumbuhan baru yang vital bagi perekonomian Indonesia, mengingat statusnya sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Perkembangan pesat pada sektor *Halal Value Chain* (HVC), mencakup makanan dan minuman halal, *modest fashion*, pariwisata ramah muslim, serta kosmetik dan farmasi halal, akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan penciptaan lapangan kerja. Laporan Ekonomi Syariah Global Tahun 2024/2025 atau SGIER (*State of the Global Islamic Economy Report*) mencatat bahwa konsumsi umat Islam di dunia untuk 6 sektor ekonomi syariah, yakni makanan dan minuman, farmasi, kosmetik, busana muslim, pariwisata ramah muslim, media dan ekonomi kreatif, mencapai USD2,43 triliun tahun 2023 dan diprediksi meningkat menjadi USD3,36 triliun pada 2028.

Peningkatan investasi di sektor-sektor terkait dan perluasan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang semakin terintegrasi dalam ekosistem halal akan semakin mendorong meluasnya kontribusi industri halal ke perekonomian Indonesia. Dengan fokus pada standarisasi dan sertifikasi produk, industri halal tidak hanya memenuhi kebutuhan konsumsi domestik tetapi juga meningkatkan nilai tambah produk nasional, surplus perdagangan dari ekspor produk halal, sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia secara keseluruhan.

Sumber Daya Alam dan Manusia Memadai

Indonesia memiliki populasi sumber daya manusia (SDM) terbesar ke-4 di dunia, dengan usia median 29 tahun. Sejumlah indikator Kualitas SDM nasional juga memperlihatkan peningkatan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun 2024 sebesar 75,02, meningkat sebesar 0,85% dari tahun 2023, meningkatnya Umur Harapan Hidup menjadi 79,93 (2023), penurunan prevalensi stunting menjadi 21,50% (2023), serta membaiknya sektor pendidikan di tahun 2022, dimana rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas mencapai 9,08 dan peningkatan harapan lama sekolah sebesar 13,10⁴.

³ *Op.cit*

⁴ Lampiran Permenlu No. 10/2025 Tentang Renstra Kemenlu Tahun 2025 – 2029

Faktor demografi Indonesia dinilai menjadi salah satu kelebihan dalam 5 tahun mendatang. Di tahun 2022, Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk ke-4 terbesar di dunia, sebesar 277 juta jiwa. Dengan proyeksi tingkat fertilitas sekitar 2%, pertumbuhan penduduk diperkirakan melambat pada periode 2025 – 2045, yakni di bawah 1%. Struktur penduduk Indonesia relatif menguntungkan dengan jumlah penduduk usia produktif yang cukup tinggi, yang pada 15 tahun mendatang diperkirakan rasio ketergantungan di bawah 50%⁵.

Indonesia memiliki kekuatan sumber daya alam yang berlimpah, baik hutan tropis yang luas, cadangan sumber daya energi dan mineral, energi terbarukan, keanekaragaman hayati dan ekosistem, sumber daya perikanan, maupun *bioprospecting*. Pengamanan rantai pasok global, mineral kritis, transisi energi, dan peningkatan daya saing SDM melalui kemitraan pendidikan dan pelatihan menjadi potensi kerja sama dan diplomasi di kawasan Asia Pasifik dan Afrika.

Dengan bonus demografi dan kekayaan alam Indonesia, kebijakan luar negeri Indonesia terhadap kawasan Asia Pasifik dan Afrika secara konkret dapat meningkatkan perdagangan Indonesia, memajukan pariwisata dan industri ekonomi kreatif, menarik investasi berkualitas, hilirisasi industri dan pengakuan profesionalitas tenaga kerja Indonesia di pasar-pasar strategis di kawasan Asia Pasifik dan Afrika.

Kepemimpinan Indonesia di Forum Kawasan Asia Pasifik dan Afrika

Kepemimpinan dan pengaruh Indonesia di dunia internasional juga memperlihatkan peningkatan. Indonesia menduduki peringkat 34 *Global Power Index* dan peringkat 3 di antara negara ASEAN⁶. Di kawasan Asia Pasifik dan Afrika, Indonesia berpotensi untuk terus menunjukkan kepemimpinannya di berbagai organisasi/forum regional.

Penguatan peran dan kepemimpinan Indonesia dapat diwujudkan antara lain dalam peningkatan kerja sama untuk ketahanan pangan, dukungan terhadap transisi energi bersih, pengembangan *Small and Medium Enterprises* (SME) dan pendekatan pemanfaatan *Artificial Intelligence* (AI) yang inklusif dalam kerangka APEC, penanganan isu *Illegal, Unreported, and Unregulated* (IUU) *Fishing* dalam kerangka IORA dengan diadopsinya *IORA Principle Guidelines on Combating IUU Fishing* pada pertemuan tingkat menteri IORA yang merupakan inisiatif Indonesia dan Prancis, kepemimpinan Indonesia dalam konservasi terumbu karang pada *Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries, and Food Security* (CTI-CFF) periode 2025 – 2026, serta tak henti menyuarakan dukungan bagi Palestina pada forum *Asian Parliamentary Assembly*.

⁵ *Op.cit*

⁶ Lampiran Permenlu No. 10/2025 Tentang Renstra Kemenlu Tahun 2025 – 2029

Indonesia berupaya mendorong pencalonan wakil Indonesia pada forum kerja sama regional di kawasan Asia Pasifik dan Afrika. Potensi pengusulan Indonesia sebagai tuan rumah sekaligus ketua APEC dalam 5-10 tahun ke depan patut untuk dipertimbangkan karena dapat meningkatkan postur kepemimpinan Indonesia. Hampir semua ekonomi APEC telah menjadi tuan rumah APEC sebanyak dua atau tiga kali. Indonesia pernah menjadi ketua sekaligus tuan rumah APEC pada tahun 1994 (yang menghasilkan *Bogor Goals*) dan tahun 2013. Kepemimpinan Indonesia pada forum regional akan mendorong kemajuan posisi dasar nasional untuk pertumbuhan ekonomi dan menuju visi Indonesia emas 2045.

Selain itu, Indonesia tetap perlu mengantisipasi munculnya kerja sama regional yang baru maupun yang bertransformasi, antara lain, *Asia Zero Emission Community (AZEC)*, *Arafura and Timor Seas Ecosystem Action Programme (ATSEA)*, *Shanghai Cooperation Organization (SCO)*, Mekong Forum dan forum lainnya, sebagai respon dinamika dunia. Dalam hal ini, Indonesia perlu menjajaki, menilai, dan mempertimbangkan nilai manfaat yang diperoleh Indonesia dalam organisasi regional di kawasan Asia Pasifik dan Afrika yang sejalan dengan Visi Indonesia Emas 2045.

Modalitas Politik dari Konferensi Asia Afrika tahun 1955

Konferensi Asia-Afrika (KAA) tahun 1955 di Bandung merupakan *legacy* penting bagi diplomasi Indonesia yang perlu untuk terus dihidupkan. KAA merupakan sarana menggaungkan relevansi *Bandung Spirit* dalam menjawab dinamika global saat ini, membangkitkan solidaritas *the Global South* serta memperkuat posisi Indonesia sebagai mitra negara-negara Asia dan Afrika yang kredibel. KAA merupakan satu-satunya forum yang menjembatani kedua benua Asia dan Afrika.

Sebagai salah satu inisiator Konferensi Asia Afrika (KAA) tahun 1955, terdapat kepentingan strategis Indonesia untuk berperan pada peringatan ke 75 tahun KAA tahun 2030 dengan persiapan strategi dan modalitas yang harus dilakukan sedini mungkin. Hal ini merujuk pada amanat *Declaration on Reinvigorating the New Asian-African Strategic Partnership (NAASP)* yang disepakati pada KTT Asia Afrika tahun 2015; pada bagian “*A Strategic Partnership of the Future*” nomor 29 poin a yang menyebutkan bahwa salah satu kerangka operasional revitalisasi NAASP adalah penyelenggaraan KTT Peringatan KAA setiap 10 (sepuluh) tahun sekali. Pertemuan tingkat tinggi KAA telah dilaksanakan yakni peringatan 50 tahun KAA pada tahun 2005 dan peringatan 60 tahun KAA pada tahun 2015.

Meningkatnya Kerja Sama Tematik pada Forum Regional

Terjadi penguatan kerja sama yang lebih spesifik pada beberapa forum regional di kawasan Asia Pasifik dan Afrika, antara lain dalam *East Asia Community (EAC)*, *AZEC*, serta dengan negara-negara wilayah Mekong.

Indonesia dan EAC telah menyepakati pembentukan Working Group dengan fokus pada penyusunan *Memorandum of Understanding* (MoU) antara Indonesia dan EAC yang mencakup kolaborasi dalam pembangunan, *capacity building*, dan bidang-bidang lain yang saling menguntungkan serta menjajaki pembentukan *Preferential Trade Agreement* (PTA) atau *Free Trade Agreement* (FTA) antara Indonesia dan EAC. Beberapa faktor kepentingan Indonesia melalui PTA dengan EAC antara lain mempertimbangkan posisi EAC sebagai blok perdagangan yang didasarkan pada harmonisasi instrumen dan kebijakan sistem perdagangan sehingga diperlukan strategi perdagangan yang bersifat regional dengan EAC, total perdagangan Indonesia dan EAC yang telah mencapai USD1,2 juta, serta proyeksi akan peningkatan pertumbuhan ekonomi EAC dengan potensi pada sektor *green economy* (*wind, solar, geothermal*), *blue economy*, dan maritim.

Sementara itu, forum AZEC menjadi salah satu forum bagi Indonesia untuk memperjuangkan kepentingan Indonesia terkait isu energi dan keberlanjutan. Pada perkembangannya, inisiatif AZEC turut melibatkan berbagai sektor strategis seperti pengurangan emisi di sektor pertanian, kehutanan serta dekarbonisasi di sektor energi, dan lain sebagainya. Secara konkret, Indonesia memanfaatkan AZEC sebagai medium untuk saling bertukar pengalaman, pengembangan kapasitas, dan teknologi yang selaras dengan prioritas Pemerintah RI.

Diplomasi Indonesia juga mencakup wilayah Mekong dengan fokus pada energi terbarukan, ketahanan energi, ketahanan pangan dan konektivitas. Indonesia melakukan pendekatan dengan organisasi di wilayah Mekong yaitu Mekong Institute pada Mekong Forum 2025 di Phnom Penh, Kamboja, tanggal 30 - 31 Agustus 2025. Forum ini membahas isu energi terbarukan. Saat ini, Indonesia mulai menjajaki kerja sama pengembangan kapasitas dengan *Mekong Institute* terutama di bidang statistik dan lainnya.

Selain itu, untuk memaksimalkan kerja sama ekonomi antara Indonesia dengan negara-negara di sub-kawasan Mekong, Indonesia selenggarakan forum *Indonesia-Mekong Basin Connect*, utamanya untuk sektor infrastruktur konektivitas, ketahanan pangan dan energi pada Oktober 2024. Melalui penyelenggaraan *The 2nd Indonesia-Mekong Basin Connect 2025: Energy Security Cooperation in the Region*, forum ini menjadi ajang penting bagi Indonesia untuk memperkuat kerja sama di bidang ketahanan energi dengan sektor publik dan swasta di kawasan Mekong, yaitu Laos, Thailand, Vietnam, Myanmar, dan Kamboja.

Peningkatan hubungan bilateral di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika

Kerja sama bilateral di kawasan Asia Pasifik dan Afrika senantiasa dioptimalkan untuk mendukung tercapainya Asta Cita. Kawasan Asia Pasifik dan Afrika memiliki potensi besar untuk mewujudkan kerja sama bilateral di bidang ketahanan pangan, ketahanan energi, swasembada, perluasan akses dan peningkatan kualitas

pendidikan serta kesehatan, pembangunan desa, pengembangan koperasi dan UMKM, pertahanan semesta, percepatan investasi serta perdagangan global yang bermanfaat bagi kepentingan nasional Indonesia.

Penguatan kepemimpinan dan pengaruh dalam kerja sama regional dan bilateral di kawasan Pasifik akan memedomani *Grand Design* Strategi Kebijakan Pembangunan Indonesia (*Pacific Elevation*). Pedoman ini akan termanifestasi pada tujuan menjaga kedaulatan dan integritas wilayah Indonesia serta mendorong kerja sama pembangunan dengan negara-negara di Pasifik.

Tingginya intensitas saling kunjung pejabat tinggi/delegasi Indonesia dan negara mitra di kawasan Asia Pasifik dan Afrika, baik dalam rangka mekanisme forum bilateral maupun kunjungan untuk penjajakan/tindak lanjut kesepakatan kerja sama juga menjadi faktor peningkatan hubungan bilateral dan dalam forum regional. Hal ini berdampak positif pada meningkatnya komitmen dan ketertarikan pemangku kepentingan terkait untuk aktif menindaklanjuti kerja sama strategis antar pihak.

Kerja sama yang dikembangkan akan berfokus dalam mendorong kesepakatan yang mendukung Asta Cita, antara lain bidang swasembada pangan, swasembada energi, hilirisasi, kerja sama pendidikan dan kesehatan serta kontribusi pencapaian tujuan *Sustainable Development Goals*.

Peningkatan hubungan bilateral tercermin dari perluasan jejaring diplomatik. Pembukaan perwakilan Indonesia di kawasan Asia Pasifik dan Afrika, serta pembukaan perwakilan asing dari negara-negara kawasan Asia Pasifik dan Afrika di Indonesia serta peresmian hubungan diplomatik dengan negara-negara di wilayah Asia Pasifik dan Afrika turut menandai semakin eratnya ikatan bilateral.

Modalitas Kompetensi Diplomat

Kementerian Luar Negeri memiliki modalitas sumber daya manusia yang kompeten dan adaptif, khususnya para diplomat yang memiliki penguasaan *soft skills* dan *hard skills* yang mendukung pelaksanaan diplomasi secara profesional. Kompetensi tersebut menjadi keunggulan strategis dalam memastikan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi diplomasi Indonesia di berbagai kawasan dan forum internasional.

Dalam rangka penguatan kapasitas dan relevansi kompetensi diplomat, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Luar Negeri secara berkesinambungan menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan yang berorientasi pada kebutuhan organisasi dan perkembangan lingkungan strategis global. Program tersebut mencakup antara lain pelatihan negosiasi, penguasaan bahasa asing, penulisan naskah dinas, komunikasi strategis, dan keprotokolan. Upaya ini

menjadi bagian dari strategi pengembangan SDM diplomatik yang berbasis kompetensi dan berorientasi hasil (*performance-based competency development*).

Keterampilan dan jejaring internasional yang dimiliki diplomat Indonesia merupakan *competitive advantage* yang memperkuat peran Kementerian Luar Negeri sebagai koordinator hubungan luar negeri di tengah meningkatnya intensitas dan keragaman aktor diplomasi. Kompetensi tersebut menjadi modal penting dalam mendukung koordinasi, fasilitasi, dan sinergi hubungan luar negeri dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat.

Sejalan dengan arah kebijakan pengembangan SDM Kementerian Luar Negeri, Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika menempatkan penguatan dan penyelarasan kompetensi sebagai salah satu prioritas strategis dalam mendukung efektivitas pelaksanaan diplomasi kawasan. Upaya tersebut mencakup identifikasi kebutuhan kompetensi jabatan strategis, peningkatan kesesuaian antara profil SDM dengan tuntutan tugas dan peran organisasi, serta pengembangan talenta yang memiliki keunggulan tematik dan kawasan.

I.2.2 Permasalahan dan Tantangan

Instabilitas Geopolitik dan Ketegangan di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika

Dinamika geopolitik global, terutama meningkatnya eskalasi persaingan antar negara adidaya dalam meningkatkan peran dan pengaruhnya baik di kawasan tertentu maupun di tingkat global, berpengaruh cukup signifikan atas tataran global maupun posisi Indonesia di dunia internasional.

Ketegangan antar negara juga perlu diantisipasi ke depan, menyusul konflik bersenjata yang berkepanjangan baik termasuk antara Israel-Palestina. Di sisi lain potensi konflik di kawasan yang patut diwaspadai, seperti konflik di Selat Taiwan, normalisasi India dengan Afghanistan serta kaitannya dengan ketegangan antara Afghanistan dan Pakistan, India-Pakistan mengenai perbatasan, Thailand-Kamboja, perang proksi Israel-Iran, perebutan Sahara Barat, Semenanjung Korea, Teluk Persia dan Laut Cina Selatan.

Demikian halnya dengan resiko konflik domestik yang mengarah pada perang saudara atau pergolakan sosial di sejumlah negara, seperti Afghanistan (yang disebabkan pengambilalihan kekuasaan oleh kelompok Taliban), Bangladesh, Nepal, Horn of Africa, Timor Leste, Myanmar, Sudan, dan Yaman.

Selain ketegangan militer dan politik tradisional, perang dagang dan proteksionisme yang diinisiasi oleh negara-negara ekonomi utama secara signifikan mempengaruhi stabilitas ekonomi di kawasan Asia Pasifik dan Afrika. Peningkatan tarif, pembatasan ekspor, serta intervensi non-tarif lainnya memicu fragmentasi rantai pasok global. Konsekuensi langsungnya meliputi volatilitas

harga komoditas, penurunan permintaan ekspor, dan ketidakpastian regulasi yang secara kolektif dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.

Dinamika Pertumbuhan Ekonomi Global

IMF, dalam Publikasi *World Economic Outlook* April 2024, memproyeksikan pertumbuhan ekonomi dunia sebesar 3,2% pada periode 2024 – 2025, sama seperti tahun 2023. Perlambatan ekonomi terutama terjadi di negara berkembang yang diperkirakan menurun dari 4,3% di 2023, menjadi 4,2% di tahun 2024 maupun 2024. IMF juga memperkirakan pertumbuhan ekonomi global di 5 tahun mendatang sebesar 3,1%, tingkat paling rendah dalam 10 tahun terakhir.

Meskipun demikian, inflasi global diperkirakan lebih rendah dari 6,8% di tahun 2023, menjadi 5,8% (2024) dan 4,5 % (2025). Hal ini terutama atas kontribusi perekonomian negara maju yang diproyeksi dapat mencapai target inflasinya lebih cepat, dibandingkan dengan negara-negara berkembang. Kondisi ini di luar perkiraan sebelumnya, ketika perekonomian global cenderung *resilient* meskipun banyak negara menerapkan kenaikan tingkat suku bunga bank sentral untuk mengatasi inflasi.

Perlambatan pertumbuhan ekonomi global ke tingkat terendah dalam satu dekade terakhir, meskipun diiringi dengan tren penurunan inflasi, semakin diperburuk oleh perang dagang yang berkelanjutan dan meningkatnya proteksionisme, pada akhirnya memicu penerapan hambatan tarif dan non-tarif, termasuk sanksi, persyaratan konten lokal serta standar produk yang semakin kompleks.

Di kawasan Asia Pasifik dan Afrika, kondisi ini menghadirkan tantangan bahwa di satu sisi, perlambatan ekonomi negara maju menekan permintaan ekspor; sementara pada sisi lain, kebijakan proteksionisme berpotensi menghambat perluasan akses pasar Indonesia.

Disrupsi Teknologi

Perkembangan teknologi yang pesat mendorong akselerasi disrupsi teknologi di berbagai sektor. Perkembangan tersebut antara lain *Internet of Thing* (IoT), *Blockchain*, dan *Artificial Intelligence* (AI). Disrupsi teknologi yang perlu dicermati khususnya di industri jasa keuangan, khususnya dengan munculnya perusahaan *financial technology* seperti bank digital, yang meningkatkan efisiensi sekaligus memperluas akses jasa keuangan namun belum didukung dengan regulasi yang memadai, sehingga berpotensi menimbulkan implikasi stabilitas keuangan.

Selain keuangan, sektor pemerintahan juga mulai merasakan dampak dari disrupsi teknologi ini. Transformasi digital di sektor pemerintahan menghadirkan peluang untuk meningkatkan efisiensi operasional, transparansi, dan aksesibilitas, namun

juga memunculkan tantangan besar seperti keamanan data, integrasi sistem, dan kesenjangan kompetensi sumber daya manusia.

Dalam hal keamanan data, ancaman seperti serangan siber dan pelanggaran data pribadi semakin meningkat, tidak hanya di Indonesia namun juga di seluruh negara. Berdasarkan laporan *Ransomware Task Force*, sepanjang tahun 2023, terdapat lebih dari 6.500 serangan *ransomware* di 117 negara. Permintaan pembayaran atas serangan *ransomware* juga mencapai rekor USD1,1 miliar atau dua kali lipat dari tahun sebelumnya, mulai dari pelaku yang tergabung dalam kelompok kriminal hingga aktor yang didukung oleh negara. Kemampuan teknologi juga diperkuat oleh kecerdasan buatan (AI), yang membuat ancaman menjadi semakin canggih dan sulit dideteksi.

Peningkatan tren kejahatan lintas batas negara merupakan dampak negatif dari perkembangan teknologi, dengan semakin maraknya pusat *online scam* yang juga berdampak meningkatnya trend TPPO. Di kawasan Asia Tenggara, pada tahun 2021 kasus *online scam* tercatat mencapai 189 kasus dan 75 kasus yang terkait TPPO. Sementara itu, pada 2024 kasus *online scam* melonjak tajam menjadi 3354 kasus, dan 216 kasus terkait TPPO. Dalam kurun waktu periode tersebut, KBRI Phnom Penh menjadi perwakilan yang paling banyak menangani kasus, yang tercatat adalah 2552 kasus.

Perubahan Iklim serta Kerawanan Energi dan Pangan

Perubahan iklim terjadi di tengah fragmentasi global dan konflik geopolitik yang memperburuk kerentanan, mempersempit akses pendanaan dan teknologi, serta mengganggu stabilitas sosial-ekonomi. Keluarnya AS dari Perjanjian Paris pada Januari 2025 memperlemah kepemimpinan iklim global dan menegaskan pentingnya multilateralisme yang tangguh.

Negara berkembang seperti Indonesia sangat terdampak, terutama dalam ketahanan pangan dan energi akibat meningkatnya intensitas bencana iklim. Laporan *Global Risk Report 2025* WEF menyoroti risiko penggunaan energi fosil terhadap banjir, kekeringan, dan badai ekstrem.

Isu keadilan iklim pun menjadi kunci, termasuk akuntabilitas negara maju serta pengakuan atas keragaman konteks nasional. Perempuan, anak, lansia, dan penyandang disabilitas menjadi kelompok yang paling rentan terutama terhadap bencana hidrometeorologi dampak dari perubahan iklim.

Arus Migrasi Global dan Pelindungan WNI

Faktor dinamika geopolitik global tersebut di atas dan diperparah dengan fenomena populasi menua (*aging population*) dan kekurangan tenaga kerja (*labour shortage*) di berbagai negara tujuan non-tradisional (faktor penarik/*pull factor*)

serta tantangan bonus demografi Indonesia (faktor pendorong/*push factor*) menyebabkan meningkatnya arus perlintasan batas negara oleh WNI ke luar negeri menjadi semakin tak terelakkan. Kendati demikian, eskalasi pergerakan lintas batas tidak diimbangi dengan kesadaran untuk mematuhi prosedur atau tata cara migrasi yang aman. Hal tersebut dibuktikan dengan lonjakan eksponensial jumlah kasus WNI di luar negeri dari tahun 2021 sampai dengan pasca-endemi COVID19 dan tren ini masih tetap berlanjut tanpa menunjukkan pelemahan.

Selama periode pandemi COVID-19, Indonesia telah memfasilitasi repatriasi akibat situasi domestik negara setempat. Beberapa proses repatriasi WNI dilakukan pada tahun 2020 antara lain repatriasi WNI yang berada di Tiongkok, India, Bangladesh, Nepal, Maladewa, Sri Lanka, Pakistan, Aljazair, Maroko, Mesir, Arab Saudi, dan PEA.

Dalam situasi konflik, situasi cepat tanggap juga dilakukan untuk perlindungan WNI. Salah satunya evakuasi WNI dari konflik di Sudan yang dilaksanakan dalam tiga gelombang evakuasi sekitar 900 WNI dari Sudan ke Indonesia. Selain itu, operasionalisasi KBRI Khartoum dipindahkan ke kota administratif sementara di Port Sudan, Sudan, pada 30 April–2 Mei 2023. Hal ini untuk menanggapi situasi krisis keamanan akibat upaya pendudukan milisi *Rapid Sudan Forces* (RSF) di beberapa kota, termasuk Khartoum.

Berdasarkan data yang dihimpun oleh Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI, sepanjang periode 2021 hingga Februari 2025 mencatat total 7.027 kasus yang berkaitan dengan penipuan daring/*online scamming*. Sebanyak 6.964 kasus ditangani oleh berbagai Perwakilan RI di Kawasan Asia Tenggara, sementara 63 kasus lainnya teridentifikasi di Belarus, Persatuan Emirat Arab, dan Afrika Selatan. Kasus-kasus tersebut tidak semua tergolong kasus TPPO, dengan hanya sekitar 1.508 kasus atau 21,4% yang merupakan kasus TPPO.

Namun demikian, berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh sejumlah Perwakilan RI di Kawasan Asia Tenggara seperti KBRI Phnom Penh, KBRI Bangkok dan KBRI Yangon, mengungkapkan adanya fenomena residivisme (*Repeated Offender/RO*). Dalam banyak kasus, terindikasi bahwa WNI yang setelah dipulangkan ke Tanah Air, kembali terjerat dalam skema kejahatan serupa. Dalam upaya penanganan kasus TPPO tersebut, sejumlah kerja sama telah terjalin dengan negara-negara kunci, utamanya Laos, Thailand, Kamboja, Viet Nam, Singapura, dan Filipina, dalam bentuk disepakatinya MoU dengan instansi terkait.

Situasi ini menjadi tantangan bagi Kementerian Luar Negeri dalam upaya kolaboratif dengan Kementerian/Lembaga pemangku kepentingan terkait lainnya guna memperkuat arsitektur tata kelola migrasi yang mudah, terjangkau, cepat dan aman. Peningkatan prosedur dapat diimplementasikan melalui harmonisasi kebijakan dan regulasi serta intensifikasi edukasi melalui sosialisasi dan

kampanye penyadaran publik yang meliputi seluruh wilayah Indonesia.

Arus migrasi global juga berdampak kepada potensi kejahatan transnasional. Sebagai negara yang berbatasan darat langsung dengan 3 (tiga) negara dan berbatasan laut langsung dengan 10 (sepuluh) negara, Indonesia memiliki risiko dalam pengelolaan arus manusia pada titik-titik perbatasan. Sementara itu, masih terdapat *bottlenecks* dalam harmonisasi kebijakan perlindungan dalam negeri. Dengan adanya rezim baru dalam Pelindungan PMI di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, diperlukan antisipasi koherensi kebijakan di antara pemangku kepentingan yang semakin bertambah.

Pada tahun 2025, tujuh megatren yang diidentifikasi meliputi geopolitik dan geoekonomi, perkembangan teknologi, demografi global, konstelasi perdagangan global, tata kelola keuangan global, persaingan sumber daya alam, dan perubahan iklim. Sepuluh besar tren dan peristiwa penting yang diprediksi terjadi mencakup perubahan politik luar negeri AS di Indo-Pasifik Pasca Pemilu 2024; risiko serangan siber besar pada infrastruktur Indonesia; risiko geopolitik dan geoekonomi terhadap rantai pasok global; pengakuan negara-negara terhadap Palestina; Indonesia menjadi anggota penuh BRICS di tahun 2025; peningkatan aktivitas militer Tiongkok di selat Taiwan; pemanfaatan AI dalam diplomasi di Kemlu RI; hilirisasi mineral kritis Indonesia melalui diversifikasi *Foreign Direct Investment*; meningkatnya investasi asing di Indonesia; dan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral Indonesia. Hasil *open-ended question* usulan saran masukan tren dan peristiwa tahun 2025 dari para responden mencakup isu krisis Timur Tengah, ketegangan geopolitik Indo-Pasifik, dan hasil pemilihan Presiden AS tahun 2024, perubahan iklim, serta hubungan AS-RRT.

Sumber Daya Diplomasi yang Belum Memadai

Sumber daya yakni SDM, sarana prasarana dan anggaran menjadi salah satu tantangan dalam mendukung optimalnya kegiatan diplomasi dan kerja sama internasional di kawasan Asia Pasifik dan Afrika.

Jumlah formasi dibandingkan dengan *bezetting* pada Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika dengan delapan unit organisasi masih belum seluruhnya terpenuhi. Masih terdapat rumah jabatan yang kosong baik pada fungsional Diplomat maupun pada fungsional Penata Kanselera serta jabatan fungsional umum.

Postur anggaran yang dialokasikan untuk Ditjen Asia Pasifik dan Afrika, meskipun menunjukkan peningkatan setiap tahun, masih belum optimal atau memadai untuk mendukung pelaksanaan diplomasi secara penuh. Dengan dinamika kebijakan penganggaran seperti instruksi penghematan, efisiensi, atau pemblokiran anggaran, akan sangat berpengaruh pada penyesuaian rencana, program dan target kinerja yang sudah direncanakan dari tahun sebelumnya. Postur anggaran

yang terbatas secara tidak langsung berpengaruh terhadap kemampuan Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika untuk secara proaktif memperluas jangkauan diplomasi, misalnya partisipasi pada forum atau inisiatif diplomasi ekonomi dalam skala besar, yang diperlukan untuk mendukung Asta Cita dan visi Indonesia Emas 2045.

Pemenuhan sarana dan prasarana yang cukup untuk menjalankan pekerjaan, tugas dan fungsi sehari-hari juga menjadi salah tantangan yang masih terus diupayakan solusinya. Alokasi anggaran belanja modal Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika dari tahun ke tahun belum memadai untuk memenuhi keperluan peremajaan.

Sejak tahun 2022, Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika telah memiliki 1 unit organisasi baru Eselon II yakni Direktorat Pasifik dan Oseania. Direktorat ini masih memerlukan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran yang baru dapat dipenuhi secara bertahap.

Dalam hal pengelolaan BMN, seiring dengan keterbatasan SDM pada Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika, berimbas pada minimnya SDM yang dapat ditugaskan sebagai pengelola perlengkapan dan penatausahaan BMN pada Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika.

Selain itu, terdapat tantangan berupa belum terdokumentasi dengan baik perihal proses bisnis, belum terintegrasinya manajemen risiko dan kinerja baik pada tataran fungsi substansi maupun tata kelola organisasi serta belum efektifnya pengendalian internal pada struktur dan proses yang telah dirancang.

I.2.3 Analisis SWOT

Potensi dan permasalahan yang dihadapi oleh Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika dalam menunaikan tugas diplomasi dan kerja sama internasional di kawasan Asia Pasifik dan Afrika dapat digambarkan melalui analisis SWOT (*Strengths, Weakness, Opportunities, Threats*).

Dalam perencanaan kebijakan strategis, pemetaan kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*) dapat membantu memahami keunggulan komparatif dan hal-hal yang perlu ditangani secara internal sebelum menyusun arah kebijakan luar negeri. Sementara itu, kesempatan (*opportunities*) dan ancaman (*threats*) dapat memberikan informasi terkait hal-hal yang dapat dimanfaatkan dan risiko eksternal yang harus diantisipasi Kemenlu dalam menjalankan kebijakan luar negeri.

Gambar I.1 Analisis SWOT

<i>Strengths (S)</i>	<i>Weaknesses (W)</i>
1. Pertumbuhan ekonomi Indonesia meningkat dan kondisi makroekonomi stabil. 2. Kelimpahan sumber daya manusia dan alam. 3. Kepemimpinan dan peran Indonesia yang semakin berpengaruh di forum kerja sama regional di kawasan Asia Pasifik dan Afrika (IORA, APEC, CTI-CFF, dan forum terkait lainnya). 4. Modalitas politik dari Konferensi Asia Afrika tahun 1955. 5. Konsistensi politik luar negeri bebas aktif yang dijalankan Kemenlu 6. Peningkatan hubungan bilateral pasca penyelenggaraan beberapa forum di kawasan Asia Pasifik dan Afrika (IAF 2024, INASCA 2024, ICAWE 2022, IPFD 2022, dsb). 7. Keahlian teknis Indonesia yang diperhitungkan di beberapa sektor di kawasan Aspasaf (kawasan Afrika, Pasifik, Oseania). 8. Informasi mengenai akses pasar, peluang investasi, perdagangan serta peluang kerja sama di berbagai sektor di negara-negara di kawasan Asia Pasifik dan Afrika yang sudah terdiseminasi dengan baik untuk dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan. 9. Pengelolaan kerja sama bilateral yang semakin kuat. 10. Postur dan jangkauan diplomasi di kawasan Asia Pasifik dan Afrika yang semakin meningkat dengan bertambahnya jumlah perwakilan RI di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika (a.l. pembukaan KBRI Yaounde, rencana pembukaan KBRI Port Vila, KBRI Honiara, KJRI Chengdu, serta beberapa penajakan lainnya). 11. Keterampilan SDM yang memadai dalam penguasaan bahasa asing maupun isu kawasan.	1. Kebijakan dalam negeri yang belum koheren. 2. Koordinasi antar lembaga/instansi dalam penyusunan kebijakan domestik yang berpengaruh kepada politik luar negeri Indonesia. 3. Kerentanan terhadap situasi ekonomi global. 4. Dinamika geopolitik kawasan Asia Pasifik dan Afrika. 5. Sumber daya diplomasi yang belum optimal (anggaran, infrastruktur fisik dan non fisik, SDM).

Opportunities (O)	Threats (T)
1. Kawasan Asia Pasifik dan Afrika potensial untuk peningkatan kerja sama bilateral dan regional di berbagai aspek, 2. Perluasan akses pasar produk Indonesia, a.l. industri strategis infrastruktur, pertahanan, digital, dsb. 3. Peran kepemimpinan Indonesia di kawasan Asia Pasifik dan Afrika yang masih diperhitungkan oleh negara mitra dalam forum kerja sama regional kawasan Asia Pasifik dan Afrika. 4. Penguatan pengaruh kerja sama di kawasan Pasifik melalui Grand Design Strategi Kebijakan Pembangunan Indonesia (<i>Pacific Elevation</i>) dan <i>Strategic Framework for Elevating Development Partnership with the Pacific</i>. 5. Penguatan pengaruh kerja sama di kawasan Afrika melalui <i>Grand Design Kerja Sama Pembangunan Indonesia</i> di Afrika. 6. Trend ekonomi syariah global di kawasan Asia Pasifik dan Afrika. 7. Masih adanya <i>untapped</i> market di kawasan Asia Pasifik dan Afrika. 8. Perkembangan teknologi di kawasan Asia Pasifik dan Afrika yang dapat diadopsi untuk mendukung diplomasi Indonesia. 9. Peran mediasi dalam konflik regional maupun internasional 10. Pendekatan diplomasi <i>soft power</i> Indonesia.	1. Instabilitas geopolitik di kawasan Asia Pasifik dan Afrika yang berdampak pada ekonomi. 2. Perang dagang dan inflasi global. 3. Hambatan tarif dan non tarif yang berdampak pada perdagangan 4. Rentannya Global Supply Chain termasuk sektor energi dan pangan; 5. Arus migrasi yang berpotensi memicu kejahatan transnasional. 6. <i>Non-traditional challenges</i>, a.l. perubahan iklim, pandemi, disrupsi teknologi, keamanan siber, terorisme lintas batas, nuklir. 7. Pelemahan multilateralisme 8. Konflik maritim dan perbatasan di kawasan Asia Pasifik dan Afrika. 9. Konektivitas di beberapa wilayah di kawasan Asia Pasifik dan Afrika. 10. Perubahan kebijakan domestik yang berdampak pada kebijakan luar negeri. 11. Prinsip polugri bebas aktif Indonesia yang dapat dianggap 'tidak tegas' dalam isu-isu tertentu oleh konstituen domestik maupun pemangku kepentingan internasional.

Modalitas dalam Menjalankan Diplomasi dan Kerja Sama Internasional di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika

Dari analisis tersebut, dapat terlihat bahwa Indonesia memiliki berbagai modalitas untuk menjalankan politik luar negeri strategis, utamanya pada diplomasi dan kerja sama internasional di kawasan Asia Pasifik dan Afrika.

Indonesia memiliki situasi politik dan ekonomi domestik yang kondusif untuk menjalankan kebijakan luar negeri, salah satunya melalui pertumbuhan ekonomi stabil dan didukung dengan kelimpahan SDA serta SDM. Indonesia juga memiliki

multi-identitas yang memampukannya untuk menjadi representasi di forum internasional maupun bermitra dengan negara-negara serupa; yaitu negara berkembang, negara kepulauan/maritim, negara demokrasi ketiga terbesar dengan populasi Muslim terbesar di dunia.

Konsistensi Indonesia dengan prinsip bebas aktif dan rekam jejak positif dalam isu perdamaian dan anti kolonialisme juga menjadi kredibilitas Indonesia sebagai *reliable partner* dalam pembangunan. Modalitas dimaksud dapat dimanfaatkan untuk merealisasikan berbagai potensi yang telah dipetakan saat ini, antara lain mitra pembangunan, *soft power*, peran diaspora, serta peran strategis di kawasan Pasifik dan Indo-Pasifik. Dari sisi kepemimpinan dan peran aktif, Indonesia memiliki peran yang masih diperhitungkan oleh negara mitra dalam forum kerja sama regional kawasan Asia Pasifik dan Afrika.

Mengelola Kelemahan, Tantangan, dan Risiko ke Depan

Terlepas dari berbagai modalitas dimaksud, masih terdapat isu yang dapat mempengaruhi kredibilitas Indonesia di dunia internasional. Posisi Indonesia yang cukup bergantung pada rantai pasok global juga menjadikan rentan terhadap volatilitas ekonomi global. Selain itu, meskipun memiliki peran meningkat di forum internasional dan presensi menguat dalam hubungan bilateral, Indonesia belum cukup melakukan *engagement* komunikasi global secara optimal guna menyampaikan narasi kebijakan luar negerinya.

Selain itu, dari postur anggaran, Kementerian Luar Negeri tergolong dalam Kementerian Tipe Sedang yang memiliki anggaran kecil dari Rp10 triliun dan jumlah pegawai di bawah tujuh ribu orang. Tantangan ini secara langsung menjadi tantangan yang sama bagi postur anggaran Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika yang dapat mempengaruhi rencana program dan kegiatan diplomasi, pemenuhan sarana prasarana serta pengembangan kompetensi SDM yang memerlukan spesialisasi isu-isu tertentu.

Dalam menghadapi tren pengerahan misi diplomatik untuk isu global seperti disrupsi teknologi, perkembangan AI, kesehatan global, rivalitas AS-RRT, ketegangan di kawasan, ketidakpastian ekonomi, perubahan iklim, ancaman ketahanan pangan dan energi, arus migrasi global serta perubahan iklim, Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika menghadapi tantangan dalam penyusunan posisi dan kebijakan luar negeri, utamanya untuk isu-isu sektoral yang memerlukan kompetensi dan pengetahuan tersendiri dari para diplomat serta koordinasi dengan kementerian/lembaga teknis untuk menyamakan pandangan.

Untuk itu, Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika perlu memastikan bahwa dukungan pemangku kepentingan domestik dan postur diplomasinya kondusif dan memadai untuk menjalankan diplomasi dan kerja sama yang berorientasi *bridge-*

building, tidak terjebak dalam kompetisi, berpihak pada kesejahteraan negara berkembang dan bermanfaat bagi masyarakat Indonesia.

I.3 Capaian Rencana Strategis Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika 2020-2024

Periode 2020-2024, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 - 2024 memandatkan Kemenlu untuk berkontribusi pada Agenda Pembangunan ke-7, yaitu “Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik”. Kemenlu mengampu PP ke-2, yaitu “Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri” yang memiliki 4 (empat) Kegiatan Prioritas (KP), yaitu (1) Peningkatan peran Indonesia di tingkat regional dan global, (2) Penguatan integritas NKRI dan perlindungan WNI di luar negeri, (3) Penguatan kerja sama pembangunan internasional, dan (4) Peningkatan citra positif Indonesia di dunia internasional.

Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika berkontribusi pada KP “Peningkatan Peningkatan Peran Indonesia di Tingkat Regional dan Global” melalui aktivitas diplomasi dan kerja sama internasional di berbagai bidang.

Kawasan Asia Pasifik dan Afrika berperan penting dalam mendukung pencapaian kepentingan nasional Indonesia serta memiliki keterkaitan langsung dengan stabilitas dan kesejahteraan regional. Arti strategis dari kawasan ini tercermin dari beberapa capaian diplomasi Indonesia, mulai dari diplomasi perbatasan, diplomasi kedaulatan sampai pada diplomasi ekonomi.

Diplomasi bilateral Indonesia dilakukan pada segala tingkat baik pada Kepala Negara/Pemerintahan, Menteri Luar Negeri, Menteri Koordinator maupun tingkat Menteri lainnya, termasuk juga kunjungan tamu kehormatan dari negara mitra serta partisipasi Indonesia pada Konferensi Tingkat Tinggi, Pertemuan Tingkat Menteri, Pertemuan Tingkat *Senior Official* pada forum kerja sama kawasan Asia Pasifik dan Afrika.

Penguatan mekanisme bilateral dilakukan melalui revitalisasi dan reaktivasi penyelenggaraan *Joint Commission on Bilateral Cooperation* (JCBC), *Joint Commission Meeting* (JCM), *Joint Ministerial Commission* (JMC), *Joint Working Group* (JWG), *Foreign Office Consultation*, *Joint Working Group*, *Joint Task Force* (JTF), *2+2 Foreign and Defence Ministers’ Meeting* dan skema bilateral lainnya dengan negara sahabat. Partisipasi aktif pada upaya terpadu penanganan masalah WNI/TKI hingga kasus lain dilakukan melalui kerja sama dengan Direktorat PWNI, Perwakilan RI dan pemangku kepentingan terkait.

Pembentukan Direktorat Pasifik dan Oseania pada Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika (2022) memperkuat implementasi *Pacific Elevation* melalui peningkatan hubungan dengan Australia, Selandia Baru, Papua Nugini, Fiji, Vanuatu, dan

negara-negara Pasifik lainnya. Pembentukan Direktorat Pasifik dan Oseania didasarkan pada Peraturan Menteri Luar Negeri RI Nomor 6 Tahun 2021.

Kepemimpinan dan Peran Indonesia yang Berpengaruh di Tingkat Regional dan Global

Kepemimpinan Indonesia mengusung solusi bagi tantangan global, membangun kemitraan saling menguntungkan, menciptakan stabilitas kawasan, mendorong perdamaian dunia, memajukan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, responsif terhadap isu perubahan iklim, lingkungan hidup, maritim, maupun berkomitmen pada pembangunan berkelanjutan. Dalam konteks hubungan multilateral pada forum kerja sama di kawasan Asia Pasifik dan Afrika, peran Indonesia diwujudkan melalui partisipasi aktif pada berbagai forum regional. Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika berinisiatif dan memanfaatkan posisi Indonesia sebagai chair dan host dari berbagai pertemuan internasional.

Peran aktif dan konstruktif Indonesia tercermin melalui posisi penting dalam forum regional antara lain sebagai:

1. *Chair Financial Resources Working Group (FRWG) Coral Triangle on Coral Reefs, Fisheries and Food Security (CTI-CFF)* tahun 2020 – 2022.
2. Terpilihnya Duta Besar Salman Al Farisi dari Indonesia sebagai Sekretaris Jenderal IORA periode 2022 – 2024.
3. Ketua ASEAN Caucus dalam APEC sepanjang tahun 2024.
4. Keketuaan Indonesia pada *Core Group on Fisheries Management (CGFM)* IORA periode 2021 – 2023.
5. Keketuaan Indonesia pada *Working Group on the Blue Economy (WGBE)* IORA periode 2023 – 2025.
6. Terpilihnya Indonesia menjadi *Chair Coral Triangle on Coral Reefs, Fisheries and Food Security (CTI-CFF)* untuk periode 2025 – 2026.

Indonesia merupakan salah satu ekonomi pendiri *Asia Pacific Economic Cooperation (APEC)* tahun 1989 yang saat ini terdiri dari 21 anggota ekonomi. Dokumen panduan utama visi APEC saat ini yang merupakan kontribusi Indonesia, yakni (1) *Putrajaya Vision 2040* yang berisikan target jangka panjang APEC untuk 20 tahun mendatang, dan (2) dokumen rencana aksi bernama *Aotearoa Plan of Action* yang menjadi acuan dalam mengimplementasikan *Putrajaya Vision* pada tahun 2021. Dokumen ini merupakan tindak lanjut dari *Bogor Goals*, yang berakhir pada tahun 2020. Kepentingan Indonesia yang berhasil terakomodasi sebagai prioritas APEC dalam kedua dokumen adalah terkait elemen peningkatan kapasitas pada setiap area kerja sama, upaya peningkatan arus investasi yang berkualitas, pengembangan ekonomi kreatif, dan pembangunan berkualitas melalui pembangunan SDM dan konektivitas.

Indonesia memanfaatkan forum kerja sama regional untuk mendorong pembahasan area prioritas seperti percepatan pemulihan ekonomi pasca pandemi

COVID-19, upaya memerangi *Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing*, konservasi terumbu karang, manajemen perikanan, ekonomi biru, perubahan iklim, pertumbuhan berkelanjutan, pembangunan ekonomi, transisi energi, dan kerja sama pendanaan.

Beberapa keberhasilan prakarsa, rekomendasi dan gagasan Indonesia yang diterima pada forum regional antara lain:

1. *Core Group on Fisheries Management (CGFM)* disahkan sebagai functional body IORA pada pertemuan ke-20 *IORA Council of Ministers' (COM)* pada 2020. Pengesahan ini adalah hasil prakarsa Indonesia selaku *coordinating country* di bidang kerja sama prioritas manajemen perikanan pada IORA.
2. Melalui kepemimpinan dan peran aktif Indonesia, IORA berhasil memiliki pedoman bersama dalam penanganan sampah laut melalui *IORA Strategic Framework on Combating Marine Debris* tahun 2022 dan mendorong penyusunan *IORA Principle Guideline on Combating Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (IUU Fishing)*.
3. Menghadapi dinamika geopolitik global, khususnya pada penyusunan Resolusi Rohingya, Indonesia memasukkan 3 paragraf yang mengapresiasi upaya Myanmar secara internal dan menekankan peran sentral ASEAN sebagai asosiasi kawasan yang turut membantu krisis kemanusiaan penduduk Rohingya, pada Sidang Tahunan *Asia Pacific Parliamentary Forum (APPF)* ke-28 di Canberra, 13-16 Januari 2020. Indonesia juga berhasil memasukkan rumusan mengenai *Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing* sebagai bentuk aktivitas yang berpotensi mengganggu keamanan dan perdamaian di kawasan. Indonesia mendapatkan dukungan dari Malaysia, Australia, dan Kanada.
4. Indonesia bersama dengan Brunei Darussalam dan Malaysia berhasil memanfaatkan KTT APEC 2023 dengan mengeluarkan *Joint Statement* mengenai "Meningkatnya Kekerasan yang dilakukan Israel di Wilayah Pendudukan Palestina" menyusul *Chair Statement* mengenai konflik di Ukraina dan Gaza.
5. Pada pertemuan KTT ke-22 MSG di Port Vila, Indonesia menyampaikan kemungkinan akses terhadap *Melanesian Free Trade Agreement (MFTA)* dan dukungan atas *proceedings* permintaan *advisory opinion* dampak perubahan iklim di ICJ. Joint Communique menyepakati keikutsertaan Indonesia dalam pengembangan MSG Travel Card, meminta Sekretariat untuk menjajaki trade arrangement yang tepat untuk Indonesia serta menyepakati MSG sebagai organisasi dan anggotanya sebagai individual akan berpartisipasi pada *proceedings* permintaan *advisory opinion* dampak perubahan iklim di ICJ.

Diplomasi Indonesia di kawasan diintensifkan melalui prakarsa dan rekomendasi Indonesia untuk mengawal kepentingan nasional melalui *Gulf Cooperation Council (GCC)*, proses penyelesaian pembentukan *Indonesia-GCC Free Trade Agreement*, *Asia Zero Emission Community (AZEC)*, *New Asian-African Strategic Partnership (NAASP)*, *Asia Cooperation Dialogue (ACD)*, *African Union (AU)*,

Southern African Development Community (SADC), Economic Community of West African States (ECOWAS); East African Community (EAC), Conference of International Confidence Building Measures in Asia (CICA) serta berbagai forum di kawasan Asia Pasifik dan Afrika.

Indonesia aktif sebagai mitra dialog pada *Pacific Islands Forum (PIF)* dan status Indonesia sebagai *Associate Member* pada *Melanesian Spearhead Group (MSG)*.

Diplomasi Ekonomi di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika

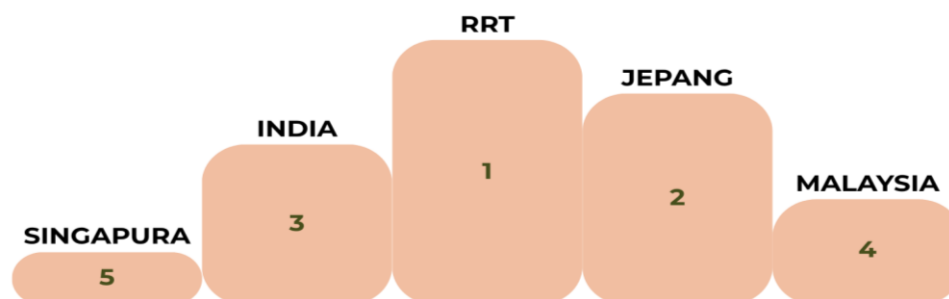
Pelaksanaan diplomasi di kawasan Asia Pasifik dan Afrika diperoleh dari kegiatan diplomasi ekonomi bidang perdagangan, investasi dan pariwisata.

1. Bidang Perdagangan dan Pembukaan Akses Pasar

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika mencatat peningkatan jumlah komitmen perdagangan di kawasan Asia Pasifik dan Afrika selama 3 (tiga) tahun yakni 195 (tahun 2022), 219 (tahun 2023) dan 259 (tahun 2024). Tingginya angka komitmen perdagangan tidak terlepas dari strategi diplomasi ekonomi Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika yakni fasilitasi kegiatan promosi ekonomi dan pengawalan komitmen perdagangan, investasi dan pariwisata.

Gambar I.2

**NEGARA TUJUAN EKSPOR UTAMA DI KAWASAN ASIA PASIFIK DAN AFRIKA
2020 - 2024**



Sumber: Laporan Kinerja (LKj) Ditjen Aspasaf 2020 – 2024

Beberapa capaian utama diplomasi ekonomi sektor perdagangan di kawasan Asia Pasifik dan Afrika antara lain:

- a. Penyelesaian Perjanjian Perdagangan Bebas Indonesia-Australia *Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA – CEPA)*, Indonesia-Korea *Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK – CEPA)* dan *Regional Comprehensive Economic Partnership* tahun 2020.

- b. Penandatanganan *Indonesia – United Arab Emirates Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IUAE – CEPA) pada 2022.
- c. Pemberlakuan PTA *RI - Mozambique*, 6 Juni 2022 (yang ditandatangani 2019) sebagai perjanjian perdagangan bilateral yang pertama dimiliki oleh Indonesia dengan negara di kawasan Afrika Sub-Sahara.
- d. PTA RI – Iran yang ditandatangani pada Mei 2023 sebagai perjanjian perdagangan kedua dengan negara kawasan Timur Tengah.
- e. Perundingan PTA Indonesia-Sri Lanka yang diluncurkan pada Maret 2024.
- f. *Travel Corridor Agreement* (TCA) dengan PEA sebagai inovasi dalam mendorong pemulihan ekonomi.

Indonesia sukses menjadi penyelenggara dan tuan rumah *The 2nd Indonesia-Africa Forum* di Bali pada tahun 2024. IAF menghasilkan 32 kesepakatan dengan nilai sebesar USD3,5 miliar serta 5 perjanjian G-to-G dalam bidang energi, konsuleran, kesehatan, dan regulasi farmasi. Kegiatan ekshibisi dan *business matching* IAF 2 mencatat transaksi sebesar USD12.741 (Rp197.460.666,-), memfasilitasi penandatanganan 6 perjanjian kerja sama antara perusahaan Indonesia dan Afrika, dan mengidentifikasi 23 peluang potensi kerja sama yang ditindaklanjuti.

Gambar I.3 Indonesia-Africa Forum (IAF) II 2024



Sumber: presidenri.go.id

<https://www.presidenri.go.id/foto/buka-hlf-msp-dan-iaf-ke-2-joint-leaders-session-2024-di-bali-presiden-jokowi-tekanan-pentingnya-pencapaian-target-sdgs/>

Lebih lanjut, dengan fokus pada pembukaan dan peningkatan akses pasar di kawasan Asia Selatan dan Tengah, Indonesia menyelenggarakan Indonesia – *South and Central Asia* (INASCA) *Business Forum* tahun 2024. INASCA telah mencetak 50 kesepakatan bisnis dan total nilai transaksi dan proyek senilai USD8,33 miliar. Rincian transaksi adalah USD4,55 miliar dari sektor energi, diikuti oleh sektor otomotif sebesar USD2,1 miliar, dan sektor kesehatan sebesar USD128 juta. INASCA *Business Forum* mengidentifikasi potensi transaksi di sektor energi, FMCG, *herbs and spices*, dan pariwisata berdasarkan hasil fasilitasi pertemuan pengusaha asal Sri Lanka, India, Pakistan, Kazakhstan dengan *counterparts* di Indonesia.

Gambar I.4 Indonesia-South and Central Asia (INASCA) Business Forum 2024



Sumber: Kementerian Luar Negeri RI
<https://galeri.kemlu.go.id/galleries-filter?q=INASCA>

Pada event tahunan seperti *Trade Expo* Indonesia (TEI), partisipasi negara mitra kawasan Asia Pasifik dan Afrika menunjukkan peningkatan yang signifikan. Penyelenggaraan TEI tahun 2020, di tengah meluasnya dampak pandemi Covid-19, berhasil menghasilkan transaksi prospektif sebesar USD 1,2 miliar. Tujuh dari sepuluh transaksi terbesar berasal dari kawasan Asia Pasifik dan Afrika yakni Tiongkok, Jepang, Mesir, India, Australia, Malaysia, dan Filipina. Sedangkan pada TEI tahun 2023, tercatat 5 (lima) negara dengan transaksi terbesar yaitu India (USD7,58 miliar), Malaysia (USD6,32 miliar), Tiongkok (USD5,59 miliar), Arab Saudi (USD2,86 miliar), dan Filipina (USD926,97 juta). Partisipasi negara mitra kawasan Asia Pasifik dan Afrika pada *Trade Expo* Indonesia 2024 menghasilkan catatan bahwa India sebagai

negara dengan transaksi terbesar, yaitu senilai USD7,46 miliar (37,91%) dengan jumlah 944 *buyers*.

Dalam kerja sama bidang konektivitas, 2nd *Joint Task Force on Connectivity Development between Aceh and Andaman-Nicobar Islands*, di Port Blair, India pada 19 Desember 2022 menghasilkan kesepakatan kerja sama bidang konektivitas, perdagangan, investasi, pariwisata dan pendidikan.

Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika juga melakukan sejumlah inisiatif untuk optimalisasi potensi ekonomi dengan negara tetangga yang berbatasan langsung dengan Indonesia antara lain:

- a. Penjajakan pembukaan jalur laut Ro-Ro Batam – Johor Bahru.
- b. Revitalisasi jalur laut Ro-Ro Davao City – *General Santos City* (Filipina) – Bitung (Indonesia).
- c. Penjajakan pembukaan Kawasan Ekonomi Khusus Indonesia dan Timor Leste.

Sepanjang periode tahun 2020 – 2024 terdapat sejumlah upaya penguatan penetrasi pasar produk industri strategis Indonesia, antara lain:

- a. Ekspor produk perkeretaapian PT. INKA ke Bangladesh, Selandia Baru, Filipina dan Thailand.
- b. Serah terima pembelian pesawat produksi PT. Dirgantara Indonesia ke Filipina, Senegal, dan Thailand.
- c. Perluasan kerja sama PT Dirgantara Indonesia ke kawasan Afrika Barat.
- d. Pembelian alutsista dari PT Pindad oleh Bangladesh.
- e. Kerja Sama bisnis antara PT Pindad (Persero) and Lahab.
- f. Ekspor Kapal Perang jenis *Landing Platform Dock* (LPD) PT PAL Indonesia ke Filipina tahun 2022 dan 2024.
- g. Kerja sama farmasi antara Biofarma dengan perusahaan farmasi di Ghana, Nigeria, Kenya dan Zimbabwe.
- h. Perluasan kerja sama pemasaran produk obat-obatan Dexa Medica ke Tanzania.
- i. Perluasan investasi minyak PT Pertamina Internasional EP (PIEP) di Blok West Qurna 1, Basra, Irak, pada Februari 2023.

Diplomasi ekonomi juga berkontribusi terhadap upaya memperkuat kegiatan bisnis BUMN Indonesia di berbagai negara, antara lain:

- a. Pembangunan infrastruktur di Niger, Persatuan Emirat Arab dan Filipina; serta infrastruktur Clarin Bridge di Bohol, Filipina dan San Juan Toll Road oleh PT WIKA.
- b. Pembangunan infrastruktur North-South Commuter Railway Project sebagai proyek *joint venture* antara PT PP, PT Adhi Karya dan *Department of Transportation* Filipina.

- c. Pembangunan jalan dan infrastruktur pendukung di Timor Leste oleh PT. Waskita Karya serta rencana pengembangan bandara internasional Nicolau Lobato, Dili, Timor Leste.
- d. Kontrak penyediaan LPG antara Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) and PT Pertamina senilai USD\$270 juta (tahun 2020).
- e. Power Purchase Agreement (PPA) antara konsorsium PT PJB Investasi (PT. PJB dan Masdar) dan PT PLN (Persero) dalam 'Floating Solar PV PP 145 MWAC' di Danau Cirata, Jawa Barat, senilai USD\$129 juta (tahun 2020).
- f. PT. INKA, PT. LEN Industri, PT. Merpati Nusantara Airlines, PT. Barata Indonesia, PT. Dirgantara Indonesia, dengan perusahaan rekan TSG Global Holdings dan perwakilan pemerintah RD Kongo untuk kontrak pengerjaan proyek infrastruktur di RD Kongo.
- g. Eksplorasi sumber daya mineral dan gas di beberapa negara, a.l. di Aljazair untuk 35 tahun kedepan; di Mnazi Bay, Tanzania; dan di Nigeria.
- h. Proyek pengembangan panas bumi oleh Pertamina Geothermal Energy di Kenya dan Turki.
- i. Proyek Produk persinyalan KA untuk jalur Kukuban-Alabang dilanjutkan jalur Alabang-Calamba di Filipina oleh PT LEN Railway System (LRS) Indonesia.
- j. Pemasangan fiber optik di Timor Leste oleh Telkomsel dan Icon Plus Indonesia.
- k. Angkutan Lintas Batas Negara (ALBN) Kupang – Dili yang melibatkan Bus DAMRI dan Bagong sebagai operator asal Indonesia.
- l. Peresmian Indonesia Incorporated di Hong Kong sebagai kantor bersama bagi Bank Himbara, Telkom, dan Garuda Indonesia pada bulan Juni 2023.

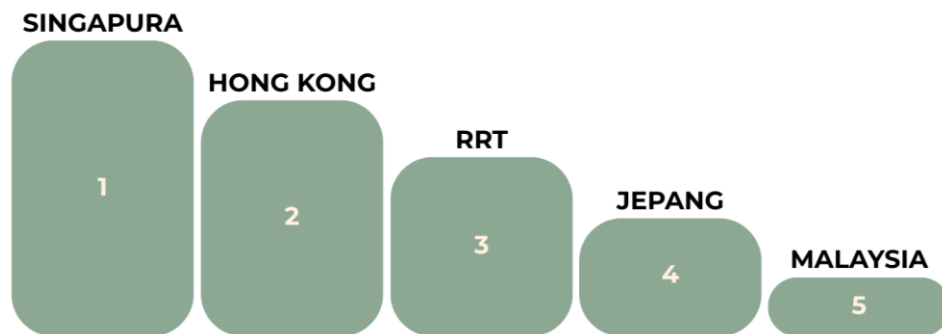
2. Investasi

Pada sektor investasi, tercatat dinamika peningkatan komitmen investasi yang diperoleh dari kegiatan diplomasi ekonomi yang menyangkut investasi, seperti *business matching*, pembukaan pasar potensial dan unggulan, dan forum kerja sama di kawasan Asia Pasifik dan Afrika.

Lima besar negara/wilayah yang menjadi investor utama ke Indonesia menurut data Badan Koordinasi Penanaman Modal sepanjang tahun 2020 – 2024 adalah Singapura, Hong Kong SAR, RRT, Malaysia dan Jepang.

Gambar I.5

**NEGARA INVESTOR UTAMA DARI KAWASAN ASIA PASIFIK DAN AFRIKA
2020 - 2024**



Sumber: Laporan Kinerja (LKj) Ditjen Aspasaf 2020 – 2024

Perolehan komitmen investasi yang berhasil dicapai tercatat dari bermacam sektor seperti keberlanjutan pembangunan IKN, infrastruktur, energi, kesehatan, transformasi digital, dan industri lainnya. Sejumlah investasi proyek strategis di Indonesia yang dihasilkan dari kerja sama kawasan Asia Pasifik dan Afrika, antara lain:

a. Pembangunan IKN

Investor dari kawasan Asia Tenggara, khususnya Singapura dan Malaysia menunjukkan minat tinggi dalam pembangunan Ibu Kota Negara (IKN). Berdasarkan data Otorita Ibu Kota Negara (OIKN) per September 2023, terdapat 285 *Letter of Intent* (LoI) untuk pembangunan IKN. Dari jumlah tersebut, sebanyak 46 LoI berasal dari negara kawasan Asia Tenggara, yaitu Singapura (27), Malaysia (19), dan Thailand (2).

Investor dari kawasan Asia Timur khususnya Jepang, RRT, dan Republik Korea juga menunjukkan minat yang tinggi dalam pembangunan sektor strategis di Indonesia, termasuk IKN. Dari jumlah 285 LoI, sebanyak 52 LoI berasal dari negara mitra di kawasan Asia Timur, yaitu Jepang (25), RRT (18), dan Republik Korea (9). Selain itu, sebanyak 2 LoI berasal dari negara kawasan Timur Tengah, yaitu PEA.

OIKN dan Kantor Gubernur Ibu Kota Astana telah menandatangani *Memorandum of Understanding* (MoU) tentang inisiatif Ibu Kota Negara pada 3 Juli 2023. Astana menjadi kota pertama yang menjalin kerja sama antar ibukota (*sister capital city*) dengan Nusantara. Dukungan dari pengusaha Kazakhstan untuk pengembangan IKN terwujud dalam 4 LoI dari perusahaan KZN Asia Construction, K7, Parqour, dan Sergek, serta 1 MoU antara Sergek Projects dengan OIKN mengenai Kolaborasi Lalu

Lintas dan Mobilitas Pintar.

Lebih lanjut, OIKN dan *National Capital Authority of Australia* telah menandatangani *Memorandum of Understanding* (MoU) tentang Inisiatif Ibu Kota pada Februari 2024.

Gambar I.6 Penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU) antara OIKN dan Kantor Gubernur Ibu Kota Astana



Sumber: [ikn.go.id](https://www.ikn.go.id)

<https://www.ikn.go.id/en/nusantara-dan-astana-jalin-kerja-sama-sister-capital-city>

b. Sektor Infrastruktur

Beberapa capaian sektor ini antara lain penyelesaian pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) dan mulai beroperasi tahun 2023 hasil kerja sama RI-RRT; kerja sama RI-Jepang berhasil mendorong pembangunan MRT Jakarta Fase 2A, 2B, dan 3 serta kerja sama PT Angkasa Pura II dengan GMR *Airports Consortium* India yang membentuk PT Angkasa Pura Aviasi untuk menjadi pengelola Bandara Kuala Namu Medan. Kerja sama dengan India ini menjadi investasi terbesar India di Indonesia sepanjang sejarah kerja sama kedua negara.

c. *Bilateral Investment Treaty*

RI dan PEA telah menyepakati kerja sama Perjanjian tentang Promosi dan Perlindungan Timbal Balik Investasi (*Bilateral Investment Treaty*/BIT) di

Bogor, 24 Juli 2019. Perjanjian tersebut mulai berlaku tahun 2021 dan merupakan perjanjian investasi pertama dengan negara di Kawasan Timur Tengah.

Perjanjian Peningkatan dan Perlindungan Penanaman Modal (*Bilateral Investment Treaty*/BIT) RI-Singapura secara resmi telah berlaku pada 9 Maret 2021, dengan diratifikasinya perjanjian tersebut melalui Keppres No. 97/2020.

Pada 15 – 17 November 2021, Indonesia dan Kazakhstan telah meluncurkan *Pre-Negotiation on Bilateral Investment Treaty* Indonesia-Kazakhstan.

d. Fasilitasi Sektor Swasta Indonesia

Diplomasi berhasil memfasilitasi kerja sama sektor swasta Indonesia dengan mitra di luar negeri, antara lain:

- 1) Eksplorasi migas di Tanzania dan Mozambik.
- 2) Penetrasi obat-obatan termasuk obat onkologi ke Tanzania.
- 3) Penetrasi produk peralatan rumah tangga Indonesia ke Mongolia.
- 4) Pendirian Sentra Distribusi UMKM di Jepang.
- 5) Komitmen Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd dengan PT. DV Medika dan PT. Hospi Niaga senilai USD8,15 juta untuk produksi alat kesehatan.
- 6) PT Dirgantara Indonesia (PT DI) dan Filipina telah menandatangani kontrak pengadaan 6 unit pesawat NC212i (*Light Lift Fixed-Wing Aircraft*) dan suku cadangnya senilai USD 79 juta, serta kontrak perawatan bagi 2 pesawat serupa lainnya yang sudah dibeli sebelumnya (pada 2014) pada tanggal 13 April 2023.
- 7) Kerja sama peningkatan konektivitas dan infrastruktur di kawasan dilakukan salah satunya melalui pembukaan jalur penerbangan *Citilink*, Bali-Port Moresby (PNG) PP pada 5 Juli 2023 dan proyek pemenuhan kebutuhan energi listrik bagi Desa Wutung yang berbatasan langsung dengan Indonesia (daerah Skouw) sebesar 2 Megawatt oleh PT PLN.
- 8) Pengelolaan blok migas Menzel Ledjmet Nord (MLN) di Aljazair hingga 2058 hasil kerja sama PT Pertamina dengan Sonatrach (perusahaan migas Aljazair). Pertamina juga berniat akan melakukan investasi di Aljazair senilai USD800 juta hingga tahun 2048.
- 9) PT Pertamina Internasional EP (PIEP) juga meningkatkan participating interest di West Qurna 1 Field (WQ1) dari 10% menjadi 20% pada akhir 2022. Pada 24 Februari 2024, PT PIEP melakukan kunjungan kerja ke Baghdad guna menjajaki eksplorasi investasi Pertamina ke Irak.
- 10) Investasi perusahaan swasta Indonesia di Australia, antara lain:
 - a) Sektor pertambangan
 - i. Sinarmas Group: Avenira Phosphate Project, Ravenswood Gold

- Mine, Bowen Basin Coal Mine
- ii. Delta Dunia Makmur (BUMA): Downer Mining Operations
- iii. Salim Group (MACH Energy): Mount Pleasant Coal Mine, dengan nilai USD224 juta
- iv. Salim Group: Hunter Valey Coal Operations, Hillside Copper-Gold Project (USD393 juta)
- v. Adaro Energy: Kestrel Coal Mine (USD2,25 miliar)
- b) Konstruksi dan pengembangan properti yakni Golden Sedayu Group: Burswood Point Development

3. Pariwisata

Pada bidang pariwisata, data Badan Pusat Statistik tahun 2024 menunjukkan lima negara penyumbang wisatawan mancanegara terbanyak yang kesemuanya dari kawasan Asia Pasifik dan Afrika yakni Malaysia, Australia, Singapura, RRT dan Timor Leste.

Perkembangan jumlah wisatawan ke Indonesia mengalami dinamika adanya penurunan signifikan pada tahun 2020 dibandingkan tahun 2019 akibat pandemi dan kemudian merangkak naik pada tahun 2022 dan seterusnya. Penyelenggaraan promosi pariwisata, partisipasi pada pameran wisata internasional, peningkatan konektivitas dengan negara mitra, serta promosi pariwisata di media lokal pada negara akreditasi merupakan bagian dari upaya diplomasi pariwisata. Selain itu, protokol implementasi *Protocol Cleanliness, Health, Safety & Environment* (CHSE) *Sustainable* pasca pandemi, serta banyaknya kegiatan internasional yang diselenggarakan di Indonesia, seperti rangkaian acara G20, IPFD, *Bali Democracy Forum* dan ICAWE turut berkontribusi pada peningkatan jumlah kunjungan dari mancanegara.

Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika telah dan senantiasa memberikan fasilitasi dan pengawalan promosi terpadu pariwisata, baik untuk pengusaha lokal di bidang pariwisata serta mitra kerjasamanya maupun wisatawan potensial di negara mitra.

Beberapa capaian pada sektor pariwisata antara lain:

- a. Adanya pemutakhiran daftar bebas visa kunjungan dan *Visa on Arrival* dari kawasan Asia Pasifik dan Afrika.
- b. Peningkatan konektivitas dengan pembukaan beberapa rute penerbangan langsung, seperti Denpasar – Port Moresby, Auckland – Denpasar (2023), Batam – Incheon, Jakarta – Pnomh Penh (2023), Bali dan Lombok ke negara-negara Timur Tengah yang baru dibuka pada awal 2024, Kota Kinabalu – Manado (2024); konektivitas Aceh dan Andaman-Nicobar, penerbangan Tokyo – Bali (2022).
- c. Intensitas kegiatan internasional yang diselenggarakan di Indonesia yang berkontribusi dalam meningkatkan jumlah kunjungan dari mancanegara

baik melalui kegiatan seminar terpadu, *sales mission*, *familiarization trip*, pameran budaya dan pariwisata, serta kegiatan promosi lainnya yang melibatkan kelompok masyarakat, *travel agent* dan pemangku kepentingan setempat.

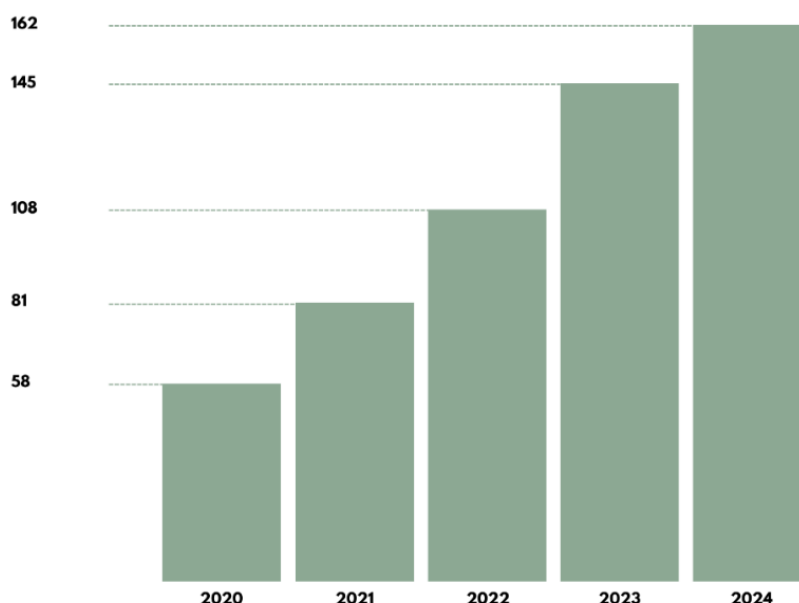
Kesepakatan Bilateral di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika

Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika turut mendukung penyelenggaraan hubungan bilateral yang mencakup sejumlah bidang, yakni ekonomi, sosial, budaya, politik dan keamanan, serta maritim. Selain kerja sama pada perdagangan, investasi dan pariwisata, kerja sama dalam lingkup bilateral juga dilakukan dalam berbagai area tematik lainnya. Tidak hanya menyusun kerja sama baru, Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika juga memiliki peran pemantauan dan koordinasi atas tindakan atau langkah nyata dari rencana aksi yang sudah disusun secara matang sebagai hasil dari kesepakatan kerja sama oleh para stakeholder, yaitu satker Kemenlu Pusat, kementerian/lembaga teknis terkait, organisasi bisnis, dan sebagainya.

Dalam catatan Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika pada indikator kinerja kesepakatan bilateral, selama lima tahun tercatat peningkatan jumlah kesepakatan bilateral yaitu 58 kesepakatan tahun 2020, 81 kesepakatan pada tahun 2021, 108 kesepakatan pada tahun 2022, 145 kesepakatan pada tahun 2023, dan 162 kesepakatan pada tahun 2024.

Gambar I.7

JUMLAH KESEPAKATAN BILATERAL DIREKTORAT JENDERAL ASIA PASIFIK DAN AFRIKA 2020 - 2024



Sumber: Laporan Kinerja (LKj) Ditjen Aspasaf 2020 – 2024

Intensifnya koordinasi dan konsolidasi internal dengan pemangku kepentingan dalam negeri serta negara mitra untuk menetapkan posisi Pemri, meningkatnya intensitas kunjungan pejabat tinggi pada level kepala negara/ kepala pemerintahan, serta adanya upaya pemanfaatan peluang atas kondisi global merupakan salah satu faktor yang mendorong disepakatinya perjanjian dengan negara mitra. Selain terbentuknya kesepakatan, terdapat pula kesepakatan kerja sama bilateral yang perlu ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan dalam negeri agar manfaatnya semakin terasa di masyarakat Indonesia, yang mencakup berbagai sektor, diantaranya kerja sama bidang kesehatan, energi, perdagangan, keuangan, pelayanan publik, konsultasi bilateral, hingga bantuan kemanusiaan.

Dalam rangka memperkuat hubungan bilateral, Indonesia terus aktif melaksanakan pembaharuan serta penandatanganan Perjanjian Bebas Visa Diplomasi dan Dinas (PBVDD), yang mencerminkan intensitas diplomasi Indonesia di kawasan Asia Pasifik dan Afrika. Tercatat Indonesia sudah menjalin PBVDD dengan beberapa negara kawasan Asia Pasifik dan Afrika antara lain Azerbaijan; Aljazair (2024); Bangladesh, Iran, Tanzania, Aljazair (2023); India, Pakistan, Senegal, Burundi, Kepulauan Solomon (2022); dan Kepulauan Solomon (2020).

Selaras dengan upaya yang peningkatan hubungan bilateral dan postur diplomasi Indonesia, Pemerintah RI terus mendorong negara mitra di kawasan Asia Pasifik dan Afrika untuk membuka kedutaannya di Jakarta. Dalam 5 tahun terakhir, telah terdapat pembukaan kedutaan negara mitra, yakni Kenya, Tanzania, Rwanda, dan Angola. Hingga saat ini terdapat 10 dari 46 negara mitra Afrika Sub-Sahara yang telah memiliki kedutaan di Jakarta, yakni Nigeria, Tanzania, Rwanda, Angola, Kenya, Somalia, Mozambik, Zimbabwe, Afrika Selatan, dan Somalia. Mongolia turut membuka kembali kedutaannya di Indonesia pada tahun 2024, setelah ditutup sementara sejak tahun 2017 karena dilanda krisis ekonomi domestik.

Selain itu, Indonesia mempertimbangkan dan menganalisis keperluan pembukaan perwakilan di luar negeri. Beberapa adalah rencana pembukaan Perwakilan RI di Ulaanbaatar (Mongolia), Perwakilan RI di Port Villa, Perwakilan RI di Honiara, serta Perwakilan RI di Abidjan (Pantai Gading), Accra (Ghana), dan Kigali (Rwanda).

Sejarah hubungan RI-Sudan Selatan mengalami *milestone* dengan penandatanganan Komunique Bersama Pembukaan Hubungan Diplomatik RI-Sudan Selatan oleh Menteri Luar Negeri RI dan Wakil Menteri Luar Negeri Sudan Selatan di New York, AS, pada 20 September 2022.

Dalam konteks lebih luas, selain diplomasi ekonomi dalam hal peningkatan perdagangan, investasi dan pariwisata, beberapa aspek diplomasi tematik lainnya turut mewarnai kiprah Indonesia selama lima tahun ke belakang.

1. Diplomasi Kesehatan

Tahun 2020 – 2022, dunia internasional dihadapkan dengan tantangan pandemi COVID-19. Diplomasi Indonesia berada di garis terdepan, dengan mengamankan pasokan lebih dari 516 juta dosis vaksin bagi kebutuhan domestik, 26,5% diantaranya adalah hibah melalui kerja sama internasional.

Beberapa strategi Indonesia dalam hal penguatan ketahanan kesehatan antara lain:

- a. Indonesia hadir memberikan bantuan bagi Papua Nugini, Kepulauan Solomon dan Fiji saat pandemi Covid-19. Indonesia memberi perhatian melalui program beasiswa bagi tenaga kesehatan maupun pelatihan dan peningkatan kapasitas.
- b. Fasilitasi kerja sama pengembangan alat tes COVID berbasis laser dan pengembangan vaksin RI – PEA (2020).
- c. Penguatan kerja sama bilateral di bidang farmasi dan kerja sama penelitian dan kapasitas produksi vaksin, terapi, dan diagnostik (VTD) a.l obat-obatan dan kontrol vaksin dengan PEA, pembentukan pusat penelitian dan pengembangan vaksin dan genomika dengan RRT; Proyek Percontohan Pendirian Pusat Pelatihan Bedah Robotik di RSUP Hasan Sadikin Bandung antara RI – Iran, Kerja Sama RI – Kazakhstan; RI – India; RI – Maladewa; RI – Singapura; RI – Bangladesh; RI – Tanzania.
- d. Pertemuan Tingkat Menteri *Asia Cooperation Dialogue* (ACD) ke-17 (2021) menghasilkan Ankara Declaration yang memuat masukan dari Indonesia, salah satunya terkait akses vaksin COVID-19 yang adil.
- e. Kesepakatan bilateral untuk vaksin konjugasi pneumonia dari RRT, penjualan vaksin campak Bio Farma ke Nigeria, serah terima Avigan dan vaksin AstraZeneca dari Jepang kepada Indonesia.
- f. Diterimanya prakarsa Indonesia dalam dokumen *APEC Leaders Declaration* tahun 2021 mengenai penguatan sistem kesehatan, serta mendorong akses yang merata terhadap vaksin COVID-19 dan keperluan medis lainnya.
- g. Diterimanya prakarsa Indonesia untuk melakukan pertukaran informasi dan *best practices* terkait penanganan Covid-19 melalui penyelenggaraan IORA Virtual Meeting of CSO-*Dialogue Partner Engagement on Covid-19* pada tahun 2020.
- h. Tuan rumah penyelenggaraan *APEC Workshop on Promoting Creative Industries in the Aftermath of COVID-19* di Bali pada 16 – 17 Oktober 2023.
- i. Mengusung resolusi pemulihan pandemi COVID-19 pada pertemuan *Asia Pacific Parliamentary Forum* (APPF).
- j. Diterimanya 3 (tiga) *concept note* Indonesia untuk peningkatan kapasitas di bidang kesehatan dengan menggunakan pendanaan APEC sebesar USD400 ribu pada tahun 2024.

2. Diplomasi Kemanusiaan dan Bantuan Hibah

Di tengah tren situasi global yang memanas dan potensi meluasnya konflik yang tengah terjadi, Indonesia ikut berperan dan berkontribusi aktif dalam upaya mendukung perdamaian di Timur Tengah dan Afrika Utara, serta melakukan pemberian bantuan kemanusiaan bagi negara-negara yang mengalami konflik, seperti Palestina, Lebanon, Yaman, Sudan, dan Suriah.

Timur Tengah merupakan salah satu kawasan penerima bantuan kemanusiaan dan hibah Indonesia. Pada periode 2020 – 2024, tercatat beberapa bantuan kemanusiaan Indonesia disalurkan ke Palestina, Sudan, dan Libya.

Selain dukungan politik dan diplomatik, Indonesia secara konsisten memberikan bantuan kemanusiaan bagi rakyat Palestina. Pada tahun 2022, Pemerintah RI telah menandatangani Perjanjian Pemberian Hibah Kemanusiaan kepada Palestina senilai total IDR33,12 miliar (setara USD2,3 juta) yang disampaikan secara bilateral kepada Pemerintah Palestina maupun melalui UNRWA dan ICRC.

Pasca perang 7 Oktober 2023, Pemerintah RI bersama masyarakat Indonesia secara berkelanjutan memberikan bantuan kemanusiaan ke Gaza, termasuk pengiriman bantuan Pemerintah RI senilai USD2 juta melalui mekanisme *Indonesian Aid* serta bantuan masyarakat Indonesia (korporasi, masyarakat, LSM, dan filantropis) sebanyak 18 ton pada November 2023. Selain itu, pada 2024, Pemerintah RI mengirimkan 242,6 ton barang senilai USD1,5 juta melalui KRI Radjiman Wedyodiningrat dan mendarat di El Arish, Mesir pada 13 Februari 2024.

Di tingkat multilateral, Indonesia meningkatkan kontribusi rutin kepada UNRWA dari USD600 ribu pada 2023 menjadi USD1,2 juta pada 2024, serta memberikan hibah tambahan USD2 juta sesuai komitmen dalam UNRWA *Pledging Conference* di New York (12 Juli 2024) untuk program ketahanan pangan serta air dan sanitasi. Indonesia juga menyalurkan hibah USD500 ribu melalui ILO untuk program peningkatan kesempatan kerja di Palestina pada 10 Juni 2024.

Selain itu, Pemerintah RI juga telah mengirim 4 (empat) bantuan medis untuk Sudan dan Libya sebagai berikut:

- a. 10 ton suplai medis senilai USD127.000 (IDR 2 miliar) dari PMI pada Desember 2023. (Sudan)
- b. 12,4 ton suplai medis senilai USD1 JUTA (IDR 15,7 miliar) dari BNPB pada April 2024. (Sudan)
- c. 54,6 ton suplai medis dan logistik lainnya senilai USD1,135 juta (IDR15,71 miliar) dari BNPB dan Baznas pada Oktober 2024. (Sudan)

- d. 46-ton logistik bantuan kemanusiaan senilai Rp13,9 miliar dari mekanisme Dana Siap Pakai (DSP) BNPB pada 2 Oktober 2023. (Libya)

Dalam penanganan pandemi COVID-19, Indonesia tidak hanya menerima bantuan hibah dari negara lain, namun juga menyampaikan bantuan, salah satunya adalah bantuan hibah oksigen dari Indonesia kepada India sebanyak 200 unit *Oxygen Concentrators* dan 3.400 unit tabung oksigen pada 2021 yang disampaikan melalui India Red Cross Society.

Kepedulian Indonesia atas kondisi negara sekitar ditunjukkan antara lain melalui pengiriman bantuan tenaga medis, obat-obatan dan alat kesehatan kepada Pemerintah Pakistan untuk penanganan bencana banjir di Pakistan pada tahun 2022. Lebih lanjut, pada tahun yang sama, Indonesia mengirimkan bantuan obat serta alat kesehatan ke Sri Lanka pada tahun 2022 sebagai respon atas permintaan Pemerintah Sri Lanka karena semakin langkanya obat-obatan akibat kondisi perekonomian yang menurun.

Indonesia memberikan bantuan kemanusiaan dan rehabilitasi pasca bencana di berbagai negara Pasifik, seperti penanggulangan Bencana Siklon Judy dan Kevin di Vanuatu sebesar IDR7,6 miliar pada Mei 2023 serta bantuan rehabilitasi gedung VIP Bandara Internasional Bauerfield, Vanuatu, dengan nilai bantuan sekitar IDR26 miliar (melalui PT PP dengan serah terima proyek pada Desember 2023). Selain itu, pada Desember 2024 Indonesia mengirimkan bantuan kemanusiaan untuk masyarakat yang terdampak gempa bumi di Vanuatu. Bantuan yang dikirimkan meliputi tim *Emergency Medical Team* (EMT) yang terdiri dari 15 tenaga kesehatan profesional dan bantuan kebutuhan dasar senilai USD726,9 ribu. Pemberian bantuan ini tidak hanya sebagai bentuk kepedulian dan nilai kemanusiaan, tetapi memiliki makna strategis bagi upaya menjaga momentum positif peningkatan hubungan bilateral antara Indonesia dan Vanuatu.

Dalam periode keketuaan ASEAN, Indonesia menunjukkan kepemimpinan dan kepedulian dalam situasi bencana dengan memberikan bantuan senilai IDR7,7 miliar untuk warga Myanmar yang terdampak siklon Mocha. Pada 28 Maret 2025, Indonesia memberikan bantuan kepada Myanmar yang terdampak gempa dalam bentuk obat dan kebutuhan pokok serta *deployment* tim INASAR dan medis.

Pada 20 Desember 2024, Pemerintah Indonesia menyampaikan bantuan kemanusiaan berupa 2,71 juta dosis vaksin polio (bOPV) untuk masyarakat Myanmar. Bantuan ini merupakan wujud solidaritas dan kolaborasi Indonesia dalam mendukung kesehatan global, terutama bagi anak-anak di wilayah yang terbatas akses layanan kesehatan. Bantuan vaksin ini juga menjadi langkah strategis Indonesia dalam memperkuat hubungan bilateral dengan Myanmar. Selain membantu kesehatan, pemberian vaksin ini sejalan dengan upaya

Indonesia untuk berperan aktif di ASEAN dalam mendukung kemanusiaan dan kesehatan global.

3. Dukungan Indonesia untuk Palestina

Indonesia secara konsisten menyuarakan dukungan terhadap perjuangan bangsa Palestina untuk memperoleh kemerdekaan dan kedaulatannya secara penuh melalui berbagai forum termasuk PBB, OKI dan GNB. Pada setiap forum internasional, Indonesia telah menetapkan dasar dan posisi dalam mendukung isu perjuangan Palestina, antara lain:

- a. Indonesia konsisten untuk bekerja sama secara bilateral, regional dan multilateral dalam memberikan dukungan kepada Palestina untuk meraih kemerdekaan dalam konteks perdamaian yang menyeluruh, adil dan abadi berdasarkan *two states solution*.
- b. Menolak permukiman Israel di Tepi Barat karena bertentangan dengan resolusi DK PBB, khususnya resolusi 2334 dan kesepakatan internasional lainnya yang menyatakan pembangunan permukiman Israel di Tepi Barat sebagai Tindakan ilegal.
- c. Menegaskan bahwa *two state solution* sebagai dasar dalam mendorong kembali pembicaraan perdamaian antara Palestina dan Israel, dimana harus ada perbedaan yang tegas antara wilayah yang dikuasai oleh Palestina dan Israel berdasarkan perbatasan 4 Juni 1967.
- d. Mendesak komunitas internasional untuk terus memberikan tekanan kepada Israel agar menghentikan upayanya dalam merubah demografi warga Palestina di tanah yang diduduki.
- e. Mendesak komunitas internasional untuk terus memberikan tekanan kepada Israel agar menghentikan segala bentuk kekerasan terhadap warga sipil Palestina dan menghormati hak-hak asasi mereka.
- f. Mengoptimalkan keanggotaan Indonesia di DK PBB untuk terus memperkuat Kerjasama multilateral dengan berbagai pihak seluas-luasnya guna menghadapi kecenderungan unilateralisme Israel-AS.

Indonesia secara aktif berperan dalam penggalangan dukungan komunitas internasional untuk mendorong tercapainya gencatan senjata, penyaluran bantuan kemanusiaan ke masyarakat Gaza, serta memulai proses politik damai sesuai solusi Dua-Negara, termasuk memperluas pengakuan internasional atas status kenegaraan Palestina.

Upaya dilakukan baik secara bilateral maupun di berbagai forum kawasan maupun multilateral, misalnya melalui peran aktif Indonesia pada keseluruhan proses *Advisory Opinion International Court of Justice (ICJ) on the Legal Consequences arising from the Policies and Practices of Israel in the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem* serta *Advisory Opinion on the Obligations of Israel in relation to the Presence and Activities of the United*

Nations, Other International Organizations and Third States in and in relation to the Occupied Palestinian Territory maupun peran Indonesia sebagai salah satu Utusan Khusus Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan Liga Arab untuk Gaza, anggota *Global Alliance for the Implementation of the Two States Solution*, dan berbagai kelompok kerja lainnya.

Pada setiap forum internasional, Indonesia konsisten mendukung perjuangan Palestina dengan menetapkan dasar dan posisi dalam mendukung perjuangan Palestina, yaitu antara lain:

- a. Penyelesaian berdasarkan *Two States Solution*, sesuai resolusi dan hukum internasional.
- b. Dukungan pada berbagai upaya mediasi Hamas-Israel, terakhir melalui upaya AS, Mesir, Qatar, dan Turki (mulai September 2025).
- c. Berbagai pernyataan resmi terkait pelanggaran Israel, seperti ancaman terhadap serangan, dan pendudukan ilegal wilayah Palestina.
- d. Optimalisasi keikutsertaan RI dalam berbagai pertemuan PBB, OKI, The Hague Group, dan forum lainnya.

Selama periode Oktober 2020 – Desember 2024, kunjungan dan pertemuan tingkat Leaders dan Menteri Luar Negeri adalah sebagai berikut:

1) *Leaders*

- a. Kunjungan PM Palestina ke Indonesia pada 24 Oktober 2024.
- b. Kunjungan PM Palestina ke Indonesia pada 24 – 26 Oktober 2022.
- c. Pertemuan Presiden RI – PM Palestina di Glasgow, pada 1 November 2021 (di sela-sela KTT COP26).

2) Menteri

- a. Pertemuan Menteri Luar Negeri RI-Menteri Luar Negeri Palestina di wilayah Laut Mati, Yordania pada 10 Februari 2021.
- b. Kunjungan Penasihat Presiden Palestina, Riyad Al-Maliki ke Indonesia pada 19 Agustus 2024 dalam rangka pemberian *Medal of Honor* Palestina kepada Menteri Luar Negeri RI dan Presiden RI.
- c. Pertemuan Menteri Luar Negeri RI – Sekjen PLO di Kazan, Russia, pada 23 Oktober 2024 di sela-sela KTT BRICS.

Perjanjian bilateral yang telah ditandatangani mencakup:

- a. MoU antara Lembaga Penjamin Simpanan dan *Palestine Deposit Insurance Corporation* tentang Kerja Sama Bilateral, 8 Juni 2021.
- b. MoU antara BPOM RI dan Kementerian Kesehatan Palestina tentang Kerja Sama Teknis Pengawasan Obat dan Makanan, Bogor, 24 Oktober 2023.
- c. MoU antara Polri dan *Palestinian Civil Force* untuk Kerja Sama Pencegahan dan Pemberantasan Kejahatan Transnasional dan Peningkatan Kapasitas, Jakarta, 26 September 2023.

- d. MoU antara Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI dan Kementerian Pariwisata dan Kepurbakalaan Palestina tentang Kerja Sama Pariwisata, Jakarta, 4 September 2024.

Bantuan RI untuk Palestina termasuk di antaranya:

- a. Bantuan senilai Rp33,12 miliar melalui UNRWA dan ICRC untuk penanganan Pandemi COVID, serta penyediaan pangan, kebutuhan dasar, dan medis/kesehatan (Oktober 2022).
- b. Bantuan kemanusiaan, khususnya sejak Oktober 2023, ke Gaza, yang mencapai lebih dari 500 ton melalui jalur darat, laut dan udara via Mesir dan Yordania, termasuk misi airdrop melalui Yordania (17 – 26 Agustus 2025).
- c. Meningkatkan kontribusi sukarela ke UNRWA dari USD200 ribu pertahun menjadi USD600 ribu per tahun, dan USD1,2 juta per tahun mulai 2024, dan USD2 juta pada 2025.

4. Dukungan Bina Damai untuk Afghanistan

Tindak lanjut komitmen diplomasi kemanusiaan dan *constructive engagement* Pemri kepada Afghanistan, berbagai tindakan konkrit Indonesia telah terwujud. Pada 9 Januari 2022, Menlu RI melepas pengiriman bantuan kemanusiaan yang terdiri dari pangan dan nutrisi seberat 65 ton yang disalurkan melalui *World Food Programme* (WFP) Afghanistan. Pada Maret 2024, Indonesia mengirimkan hibah 10 juta dosis vaksin diselenggarakan oleh LDKPI dan dipimpin oleh Menteri Luar Negeri RI dan Menteri Keuangan RI, serta berkolaborasi dengan UNICEF. Kemudian, pada Juni 2024 Pemri kembali mengirimkan bantuan *in-kind* bagi korban terdampak gempa Herat di Afghanistan melalui ICRC Afghanistan.

Dukungan untuk bina damai Afghanistan digaungkan secara konsisten, salah satunya melalui pemberdayaan peran ulama melalui penyelenggaraan Dialog Trilateral Ulama Indonesia-Qatar-Afghanistan pada 12 – 16 Juni 2022 di Doha, Qatar. Pertemuan bertujuan untuk memfasilitasi diskusi antar ulama guna mendorong perdamaian dan pembangunan di Afghanistan. Indonesia juga aktif berpartisipasi dalam misi Ulama OKI ke Kabul, Afghanistan yang sudah berjalan dua kali pada 20 – 24 Juni 2022 dan 1 – 5 September 2023.

Pemerintah RI bersama Qatar menginisiasi penyelenggaraan *International Conference on Afghan Women's Education* (ICAWE) di Bali pada 8 Desember 2022. ICAWE merupakan konferensi internasional pertama terkait dukungan terhadap hak perempuan, terutama pendidikan untuk perempuan Afghanistan. Nilai *pledge* yang berhasil dikumpulkan senilai lebih kurang USD975 juta, baik dari komitmen yang telah dijalankan maupun baru. Sejumlah tindak lanjut konkret yang dihasilkan ICAWE, antara lain:

- a. Kolaborasi trilateral RI – Qatar untuk pemberian beasiswa bagi perempuan Afghanistan.

- b. Pemerintah RI memberikan beasiswa afirmasi pascasarjana bagi mahasiswa Afghanistan, dengan inklusi perempuan untuk berkuliah di Indonesia sejak tahun 2022. Total beasiswa yang telah diberikan Pemerintah RI bekerja sama dengan perguruan tinggi (termasuk skema *public-private partnership* dengan Adaro Energy) di UII dan UMY pada periode tahun akademik 2022 – 2023 sebanyak 18 orang.
- c. Komitmen sektor swasta seperti Lippo Group dan KADIN untuk pemberian beasiswa dan pelatihan peningkatan kapasitas pemberdayaan perempuan.
- d. Pada 21 Desember 2023, Pemerintah RI berbagi *best practices* pengembangan kurikulum madrasah dan *microfinance* syariah kepada UNAMA dan UNESCO.
- e. *Tahir Foundation* menghibahkan bantuan senilai USD 300 ribu berupa *mobile clinics*, ambulans, dan suplai obat-obatan kepada International Federation of Red Cross and Red Crescent Society (IFRC) Afghanistan.
- f. Indonesia dan Qatar menjadi *co-host Workshop of the International Conference on Afghan Women's Education: Education for Her, Progress for All* pada 9 – 11 Desember 2023 di Doha, Qatar yang membahas tantangan utama dalam pendidikan perempuan Afghanistan dan solusi bersama dalam mengatasi tantangan dimaksud.

Lebih lanjut, Pemerintah RI memfasilitasi *Afghanistan Future Thought Forum* (AFTF) ke-7 pada 18 – 20 Agustus 2023, sebuah dialog terbatas antar tokoh-tokoh pemangku kepentingan Afghanistan dari berbagai latar belakang untuk mendorong *Intra-Afghan Dialogue* dan mendiskusikan masa depan Afghanistan.

Gambar 1.8 *International Conference on Afghan Women's Education* (ICAWE) tahun 2022



Sumber: rri.co.id

<https://rri.co.id/internasional/108085/indonesia-dan-qatar-dukung-pendidikan-perempuan-di-afghanistan>

5. UMKM Go Global

Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) bersama Kementerian Koperasi Republik Demokratik Timor Leste/*Secretary of State for Cooperatives* (SECoop) Timor Leste sepakat untuk bekerja sama dalam pengembangan kapasitas koperasi dan UMKM. Kerja sama tersebut dituangkan dalam *Memorandum of Understanding* (MoU) yang ditandatangani di Jakarta pada 20 Februari 2024. Lingkup kerja sama MoU mencakup kesepakatan kedua negara untuk secara bersama-sama mengembangkan *capacity building*, kemitraan antarkoperasi, *feasibility study* terkait pengembangan potensi bisnis koperasi dan UKM, pelatihan dan *exchange visit*, serta penguatan program UKM dan koperasi melalui kerja sama regional.

Penjaringan partisipasi pelaku usaha Indonesia untuk pameran dagang di kawasan Asia Pasifik dan Afrika juga menyasar tidak hanya asosiasi pelaku usaha dan perusahaan swasta namun juga kepada lembaga/institusi pembina UMKM, dan pelaku UMKM. Beberapa lembaga/institusi pembina UMKM telah terjalin baik koordinasinya antara lain dengan PT HM Sampoerna Tbk, Bank Indonesia, BNI Xpora, serta asosiasi pelaku usaha antara lain APINDO dan HIPELKI.

6. Transisi energi

Beberapa catatan kerja sama bilateral bidang energi yang menunjukkan komitmen masing-masing negara dalam mengembangkan energi baru terbarukan (EBT) dan mengatasi tantangan perubahan iklim, antara lain:

- a. penguatan kerja sama bidang energi RI-Filipina, Area kerja sama meliputi: mineral dan batu bara, termasuk *clean coal technology*; minyak dan gas, termasuk pengembangan hilir dan hulu; transisi energi; energi baru dan terbarukan; efisiensi energi; *electric vehicles*; bahan bakar alternatif; dan mitigasi risiko terkait geologi;
- b. kerja sama energi terbarukan Indonesia-Viet Nam, meliputi rencana *joint production* antara Perusahaan Mobil Listrik Viet Nam Vinfast dengan PT IBC;
- c. tindak lanjut inisiatif *Asia Zero Emission Community* (AZEC) dengan penandatanganan MoU antara PLN dan *Nippon Export and Investment Insurance* (NEXI) dengan komitmen sebesar USD 500 juta untuk proyek pengembangan teknologi rendah karbon. Sebagai salah inisiator *Asia Zero Emission Community* (AZEC) bersama Jepang, Indonesia telah menjadi bagian dari inisiatif regional yang bertujuan untuk mencapai keberlanjutan lingkungan di tingkat Asia; dan
- d. peresmian PLTS Cirata yang merupakan hasil kerja sama antara Indonesia dan Persatuan Emirat Arab (PEA).

7. Diplomasi Indonesia di Pasifik melalui visi *Pacific Elevation*

Dalam upaya menciptakan kawasan yang stabil dan sejahtera, Indonesia memperkuat kerja sama ASEAN dan PIF melalui kerangka *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific* (AOIP). Berbagai inisiatif telah dilaksanakan, termasuk *Pacific Exposition* (PE) tahun 2021, visi *Pacific Elevation* tahun 2019, dan *Indonesia Pacific Forum for Development* (IPFD) tahun 2022.

Selain itu, melalui kerja sama pembangunan di kawasan Pasifik, Indonesia secara konsisten memberikan bantuan pembangunan bagi negara-negara di kawasan, termasuk dengan mendukung tujuan-tujuan pembangunan kerja sama regional di wilayah tersebut. Sebagai bukti konkrit, Indonesia memberikan bantuan pembangunan Stadion Futsal Multifungsi di Kepulauan Solomon dan renovasi Queen Victoria School di Fiji. Secara total, Indonesia telah memberikan program peningkatan kapasitas kepada sekitar 1.750 peserta dari 15 negara/teritori di kawasan Pasifik selama periode 1999 hingga 2022.

Melalui inisiatif *Indonesia-Pacific Forum for Development* (IPFD) pada Desember 2022, Indonesia dan berbagai negara Pasifik telah menggagas *The Bali Message for Development Cooperation in the Pacific* yang mendorong empat sektor prioritas kerja sama pembangunan bersama, yakni pertanian, perikanan, infrastruktur, dan pendidikan. *Bali Message* membuka peluang penciptaan momentum kerja sama yang lebih besar bagi peningkatan kemakmuran, penciptaan pusat pertumbuhan ekonomi baru, serta menemukan solusi bagi tantangan global bersama ke depannya.

Gambar I.9 *Indonesia Pacific Forum for Development* (IPFD) tahun 2022



Sumber: rri.co.id

<https://rri.co.id/daerah/106972/menlu-tegaskan-komitmen-indonesia-perkuat-kerjasama-dengan-pasifik-melalui-ipfd-2022>

Pacific Exposition II pada tahun 2021 diselenggarakan secara *virtual*, menampilkan 200 *booth* dari perusahaan dan instansi pemerintahan negara-negara Pasifik, termasuk dari 6 provinsi di Indonesia Timur. Acara ini menghasilkan potensi transaksi bisnis senilai USD104 juta atau sekitar IDR 1,48 triliun, serta menarik lebih dari 40.000 pengunjung secara *hybrid*.

Indonesia memandang *Melanesian Spearhead Group* (MSG) sebagai forum strategis dalam memperkuat diplomasi kedaulatan dan solidaritas pembangunan di kawasan Melanesia. Forum ini memiliki anggota Fiji, Papua Nugini, Kepulauan Solomon, Vanuatu, dan FLNKS dari Kaledonia Baru, dengan Sekretariat di Port Vila, Vanuatu. Indonesia diterima sebagai *Associate Member* sejak 2015, setelah sebelumnya berstatus *Observer* sejak 2011. Indonesia telah aktif berpartisipasi pada KTT MSG ke-22 tahun 2023 di Port Vila, Vanuatu dan KTT ke-23 tahun 2025 di Suva, Fiji. Selaku *Associate Member* yang memberikan kontribusi finansial Indonesia juga menghadiri pertemuan reguler *MSG Budget* yang membahas program-program strategis baik di tingkat Menteri maupun SOM.

Dalam setiap forum/ pertemuan, Indonesia selalu menegaskan komitmennya untuk memperkuat kerja sama pembangunan dan keamanan dengan negara-negara anggota MSG. Sambutan positif yang diberikan MSG terhadap Indonesia menunjukkan adanya penguatan dukungan terhadap hubungan bilateral dan kerja sama regional yang konstruktif.

Pada kerangka *Pacific Islands Forum* (PIF), Indonesia terus menunjukkan komitmen kemitraan dengan kawasan Pasifik melalui pendekatan inklusif dan solidaritas pembangunan berdasarkan prinsip saling menghormati, termasuk dalam hal kedaulatan dan integritas wilayah serta prinsip non-intervensi.

Indonesia senantiasa menegaskan pentingnya memperkuat kerja sama di bidang yang menjadi kepentingan bersama khususnya sektor kelautan dan perubahan iklim. Program kemitraan Indonesia dengan PIF diupayakan dapat selaras dengan *2050 Strategy for the Blue Pacific Continent* yang menjadi landasan kerja jangka panjang PIF ke depan. Indonesia berkeinginan untuk terus bekerja sama dengan PIF termasuk melalui rencana dukungan bagi *Pacific Resilience Facility* (PRF) yang dibentuk PIF untuk meningkatkan ketahanan kawasan.

Dalam forum *Organization of African, Caribbean and Pacific States* (OACPS), Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika berperan dalam memastikan kehadiran dan kontribusi Indonesia dalam mendorong kerja sama di bidang pembangunan berkelanjutan, perubahan iklim, dan kerja sama Selatan–Selatan. Indonesia telah memberikan kontribusi nyata berupa bantuan kerja sama teknis dalam bentuk pelatihan *Information and Communication Technology* (ICT) pada periode tahun 2021 – 2023 bagi Sekretariat OACPS

serta pelatihan di bidang ekonomi kreatif untuk seluruh negara anggota OACPS pada tahun 2024 yang dilaksanakan di Bali.

Peran aktif Indonesia tersebut telah mendorong OACPS untuk menempatkan Indonesia sebagai mitra strategis. Dengan pandangan ini, Presiden RI diundang untuk menghadiri KTT OACPS di Angola bulan Desember 2022 yang kehadirannya diwakili oleh Wapres RI New York.

8. Diplomasi Perbatasan

Salah satu kemajuan perjanjian perbatasan di kawasan Asia Pasifik dan Afrika adalah ditandatanganinya kesepakatan batas ZEE dengan Viet Nam sebagai perjanjian *dual line* pertama di antara Asia Tenggara yang sudah dirundingkan selama 12 tahun. Saat ini kedua negara telah selesai melakukan finalisasi Implementing Agreement (IA) dari perjanjian delimitasi batas ZEE tersebut.

Capaian berikutnya adalah perjanjian Laut Wilayah Segmen Laut Sulawesi dan Segmen Selat Malaka Bagian Selatan yang telah ditandatangani oleh RI dan Malaysia pada 8 Juni 2023. Hal ini merupakan capaian kedua negara setelah perundingan selama 18 (delapan belas) tahun sejak 2005. Penandatanganan perjanjian tersebut menjadi landasan bagi negosiasi batas maritim antara RI dan Malaysia selanjutnya.

Pertemuan pertama yang secara resmi merundingkan batas Landas Kontinen RI – Filipina diselenggarakan melalui *1st Special Meeting of the Joint Permanent Working Group on Maritime and Ocean Concerns on the Delimitation of the Continental Shelf Boundary* (SM-JPWGMOC-CS) di Bali pada 6–7 Juli 2022. Indonesia sebagai tuan rumah pertemuan resmi pertama menghasilkan *Principle and Guidelines* PBM Landas Kontinen RI-Filipina yang kemudian ditandatangani secara *virtual* tanggal 5 Oktober 2022. Hal ini sebagai tindak lanjut dari Persetujuan Batas ZEE di Laut Sulawesi dan Laut Filipina pada 23 Mei 2014 di Manila, serta kesepakatan melanjutkan perundingan perbatasan landas kontinen.

9. FIR, Ekstradisi, dan DCA RI – Singapura

Pada 21 Maret 2024, *Flight Information Region* (FIR), Perjanjian Ekstradisi/*Extradition Treaty* (ET), dan *Defence Cooperation Agreement* (DCA) antara Indonesia dan Singapura secara simultan diberlakukan. Pemberlakuan ketiga dokumen strategis dimaksud merupakan momen bersejarah mengingat proses negosiasi dan ratifikasi berlangsung cukup alot dan memakan waktu lama.

Proses ratifikasi DCA RI-Singapura memakan waktu kurang lebih 17 tahun sejak ditandatanganinya perjanjian pada tahun 2007 melalui Undang-Undang No.

3 Tahun 2023. Sementara proses ratifikasi perjanjian ekstradisi Indonesia-Singapura dimulai sejak 1998 hingga ditandatangani pada Januari 2022 dalam *Leaders' Retreat* RI-Singapura.

Negosiasi FIR RI-Singapura dimulai sejak tahun 1995, diintensifkan tahun 2015, hingga disepakati pada 22 Januari 2022. Dengan disepakatinya FIR, maka luas 249.575 km² ruang udara Indonesia yang selama ini masuk dalam FIR negara lain (FIR Singapura) diakui secara internasional sebagai bagian dari FIR Indonesia.

Gambar I.10 *Flight Information Region (FIR)* RI – Singapura tahun 2022



Sumber: [thejakartapost.com](https://www.thejakartapost.com)

<https://www.thejakartapost.com/id/paper/2023/03/23/jokowi-lees-achievements.html>

10. Infrastruktur Diplomasi

Dari sisi penguatan infrastruktur diplomasi, terdapat perwakilan RI yang baru dibuka, maupun perwakilan RI yang dioperasikan kembali setelah ditutup sementara akibat karena situasi dan kondisi setempat. Sampai dengan tahun 2024, Indonesia memiliki 78 Perwakilan RI di kawasan Asia Pasifik dan Afrika dan 1 Kantor Dagang di Taipei.

KBRI Yaounde yang mulai beroperasi sejak Desember 2023 telah memberikan kontribusi melalui kinerja yang positif termasuk dapat mengurangi beban akreditasi 6 negara dari KBRI Abuja, terutama di wilayah Afrika Tengah.

Setelah terdampak *Arab Spring* dan beroperasi dari Djerba, Tunisia, sejak 3 Agustus 2014, KBRI Tripoli kembali beroperasi di Tripoli, Libya pada 10 Mei 2022. Sedangkan di Sudan, KBRI Khartoum telah memindahkan kegiatan operasionalnya dari Khartoum ke Port Sudan pada tahun 2023, pasca meletusnya konflik bersenjata di Sudan (15 April 2023).

Tahun 2025 menjadi salah satu momen penting hubungan bilateral Indonesia dengan Republik Rakyat Demokratik Korea (RRDK). Pada bulan Juni 2025, KBRI Pyongyang kembali dibuka setelah kedudukannya sempat dipindahkan sementara ke Jakarta pada tahun 2021 akibat terdampak kebijakan *total lockdown* oleh pemerintah setempat di masa pandemi COVID-19. Saat ini Indonesia merupakan salah satu dari sedikit negara yang memiliki *diplomatic presence* di Pyongyang, RRDK. Selain itu, proses pembukaan kantor perwakilan RI di wilayah potensial seperti KJRI Chengdu, menjadi salah satu cerminan komitmen peningkatan hubungan bilateral di kawasan Asia Timur.

Pengarusutamaan Gender dalam Diplomasi

Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika mendukung perwujudan dan peningkatan komitmen kesetaraan gender di lingkungan kerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, serta mengupayakan tersedianya lingkungan yang aman bagi semua pegawai, bebas dari diskriminasi dan dari pelecehan seksual, melalui implementasi efektif Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Surat Edaran Menteri Luar Negeri Nomor SE/00031/KP/11/2021/03 Tahun 2021.

Pada aspek penguatan kelembagaan, kebijakan dan infrastruktur, Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika telah membentuk Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender dan menetapkan Pejabat Penerima Pengaduan terkait Tindakan Pelecehan Seksual yang terdiri dari perwakilan unit kerja Eselon II Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika, melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika setiap tahun.

Pada tahap perencanaan dan penganggaran responsif gender, secara bertahap terdapat penambahan Rincian Output (RO) dengan tagging Anggaran Responsif Gender (ARG) di aplikasi KRISNA Bappenas. Komitmen penganggaran responsif gender ini terus ditingkatkan utamanya dalam proses perencanaan anggaran dengan pemberian tagging ARG pada RO Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika di aplikasi KRISNA Bappenas. Pada perencanaan anggaran tahun 2026, seluruh RO atau 12 RO Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika telah diberikan tagging ARG.

Integrasi isu gender dengan kegiatan Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika tercermin dari partisipasi aktif Indonesia pada pembahasan serta dialog dalam

bidang kesetaraan gender dan pemberdayaan wanita dalam forum bilateral, regional dan multilateral. Indonesia turut memastikan bahwa kerja sama bilateral di kawasan juga mencerminkan perspektif gender, misalnya dalam bantuan pembangunan kemanusiaan dan kemitraan, mendukung inisiatif pemberdayaan dan peningkatan kapasitas melalui program pendidikan, ekonomi inklusif, peningkatan akses dan pemberdayaan UMKM, serta akses perempuan ke pasar global.

Beberapa capaian integrasi isu gender dalam kegiatan Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika antara lain:

1. Inisiasi program peningkatan kapasitas untuk Afghanistan di bidang kesehatan dan kesejahteraan ibu, anak dan keluarga serta best practices pengembangan kurikulum madrasah dan microfinance syariah.
2. Indonesia merekomendasikan strategi peningkatan pemberdayaan perempuan dalam ekonomi dan kewirausahaan melalui perdagangan serta program kerja sama dalam APEC untuk peningkatan peran perempuan di ekonomi pada pertemuan *Joint Ministerial Meeting of Minister Responsible for Women and Ministers Responsible for Trade*.
3. Pelibatan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) sebagai *focal point* pada *Working Group Policy Partnership on Women and the Economy* dalam forum APEC, yang menyampaikan program untuk memajukan literasi digital dan kepemimpinan.
4. Sebagai bagian dari pelaksanaan *Annual Leaders Dialogue* RI - Papua Nugini, telah diangkat penandatanganan MoU Bidang Kerja Sama Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
5. Pelindungan PMI yang dibahas dalam *Joint Working Group Meeting on the Memorandum of Understanding between the Government of Malaysia and the Government of the Republic of Indonesia on the Employment and Protection of Indonesian Domestic Migrant Workers in Malaysia* di Johor Bahru, Malaysia, 10 Mei 2024. Malaysia menjadi salah satu tujuan pekerja migran Indonesia dan didominasi oleh perempuan yang bekerja di sektor domestik.
6. *Linking Locals to Global Series* Aceh dan Sulawesi Barat bersama dengan Universitas Teuku Umar dan Universitas Sulawesi Barat. Kegiatan ini merupakan upaya fasilitasi guna peningkatan kapasitas pelaku UMKM utamanya UMKM perempuan di daerah, perluasan akses ekspor ke kawasan Asia Pasifik dan Afrika, serta potensi investasi untuk pengembangan industri/produk unggulan daerah.
7. Keikutsertaan Menlu RI dalam pertemuan pertama *Female Foreign Ministers Meeting* yang diselenggarakan di Mongolia pada Juli 2023 merupakan bentuk partisipasi aktif pada isu peranan perempuan dalam memajukan agenda global, khususnya *women peace and security*, perubahan iklim, dan keamanan pangan. Dalam kesempatan tersebut, Menlu RI mendorong: 1) kerja sama peningkatan partisipasi perempuan dalam *preventive diplomacy*, proses perdamaian, dan resolusi konflik; 2) partisipasi perempuan dalam PKO PBB;

- 3) pemberdayaan ekonomi perempuan dan menebarkan nilai-nilai perdamaian dan toleransi; dan 4) akses perempuan terhadap pendidikan dan pekerjaan.

Tata Kelola Organisasi Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika

Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika memastikan terlaksananya koordinasi dan kolaborasi dalam mengawal kesinambungan program, kegiatan dan agenda nasional sebagaimana arahan Presiden RI pada RPJMN 2020 – 2024 baik antar pemangku kepentingan di dalam negeri, maupun pusat dan Perwakilan.

Beberapa capaian pada tata kelola organisasi periode 2020 – 2024 antara lain:

1. Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika berhasil meraih peringkat II pada Laporan Audit Kearsipan Internal Entitas Kementerian Luar Negeri TA 2024 dengan perolehan nilai 97,32. Nilai ini meningkat dibandingkan sebelumnya yakni 88,52 pada tahun 2023 (peringkat VII) dan 69 pada tahun 2022 (peringkat VII).
2. Sekretariat Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika sebagai Unit Pengolah kearsipan mendapatkan nilai pengawasan 96,81 berdasarkan Audit Kearsipan Internal yang dilakukan Biro Hukum dan Administrasi Kementerian dan Perwakilan (BHAKP) tahun 2024. Nilai ini juga menunjukkan peningkatan dibanding tahun 2023 dengan nilai 87,63 dan tahun 2022 dengan nilai 69.
3. Sekretariat Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika meraih peringkat I dalam Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja Unit Kerja Eselon II tahun 2022 dengan nilai 79,90 (BB). Selain itu, Sekretariat Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika berhasil meningkatkan predikat nilai AKIP menjadi A tahun 2024/2025 dengan nilai 80,45 dari 80,00 (BB).
4. Peningkatan nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika sejak 2020 s.d. 2024. Pada tahun 2020 Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika memperoleh nilai AKIP 79,57, menjadi 79,95 pada tahun 2021, memperoleh nilai 80,10 (A) atau peringkat 5 pada tahun 2022 dan memperoleh nilai 80,30 (A) pada tahun 2023/2024.
5. Nilai Indeks Pengelolaan Barang Milik Negara Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika menjadi 3,88 berdasarkan hasil *self-assessment* sesuai Kepmenlu Nomor 21/B/PL/08/2024/01 tahun 2024. Nilai ini lebih tinggi dari rata-rata nilai IPA Kemenlu.
6. Langkah perbaikan dalam penatausahaan barang milik negara (BMN) dan persediaan Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika sebagai tindak lanjut temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan 2018 dan Sistem Pengendalian Intern 2021. Tindak lanjut telah dilakukan terhadap temuan yang mencakup belum tertibnya penyelenggaraan kartu persediaan, penggunaan mata anggaran yang belum sesuai, serta adanya aset usang atau rusak berat yang belum diproses penghapusannya.
7. Keberhasilan fasilitasi kerja sama ekonomi dengan *stakeholders* di kawasan Asia Pasifik dan Afrika yang dilakukan secara berkesinambungan, salah satunya dengan Himpunan Pengembangan Ekosistem Alkes Indonesia

- (HIPELKI) dan rangkaian fasilitasi berkesinambungan sejak tahun 2024 melalui *Indonesia-Philippines Health Forum* di KBRI Manila.
8. Kontribusi Reformasi Birokrasi tematik pada tema Peningkatan Investasi dan Percepatan Prioritas Aktual Presiden yaitu Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan pengendalian inflasi melalui peningkatan realisasi investasi (diantaranya pada infrastruktur hijau dan rantai pasok, transformasi digital, *Sustainable Financing*, serta *business matching*, fasilitasi kerja sama ekonomi dan promosi investasi termasuk komitmen investasi), promosi produk dalam negeri melalui hibah/kerja sama teknik, promosi perdagangan (ekspor) produk unggulan Indonesia di luar negeri, optimalisasi penggunaan produk dalam negeri, serta peningkatan realisasi nilai investasi (melalui promosi investasi, *Business Matching* dan realisasi komitmen investasi dari Perwakilan RI).
 9. Dukungan pemenuhan kebutuhan Barang Milik Negara dengan nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sekurangnya 40% pada aspek Reformasi Birokrasi Tematik. Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika adalah anggota Tim Monitoring dan Evaluasi Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Kemenlu Tahun Anggaran 2024 sesuai KepMenlu No. 03/B/PL/2024/01.

Gambar I.11 Penghargaan Peringkat Pertama Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Eselon II Tahun 2022



Sumber: Dokumentasi Ditjen Aspasaf 2022

**Gambar I.12 Piagam Peringkat Ke Dua Penghargaan Hasil Pengawasan
Kearsipan Internal Kementerian Luar Negeri Tahun 2024**



Sumber: Dokumentasi Ditjen Aspasaf 2024

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS

II.1 Visi Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika

Kementerian Luar Negeri menetapkan visi untuk periode 2025 – 2029, yakni: “Memantapkan ketangguhan diplomasi Indonesia dalam memperkuat hubungan internasional yang kondusif serta berkontribusi pada tata kelola global yang mendukung pembangunan nasional, guna mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.”

Visi tersebut diterjemahkan pada visi Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika:



“Memantapkan ketangguhan diplomasi Indonesia dalam memperkuat hubungan internasional yang kondusif di kawasan Asia Pasifik dan Afrika serta berkontribusi pada tata kelola global yang mendukung pembangunan nasional, guna mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.”

Gambar II.1 Visi Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika 2025 – 2029

II.2 Misi Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika

Kemenlu mengampu dua Prioritas Nasional (PN) sesuai RPJMN 2025 – 2029 yakni:

1. **PN 2:** “Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau dan ekonomi biru”;
2. **PN 7:** “Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba”,

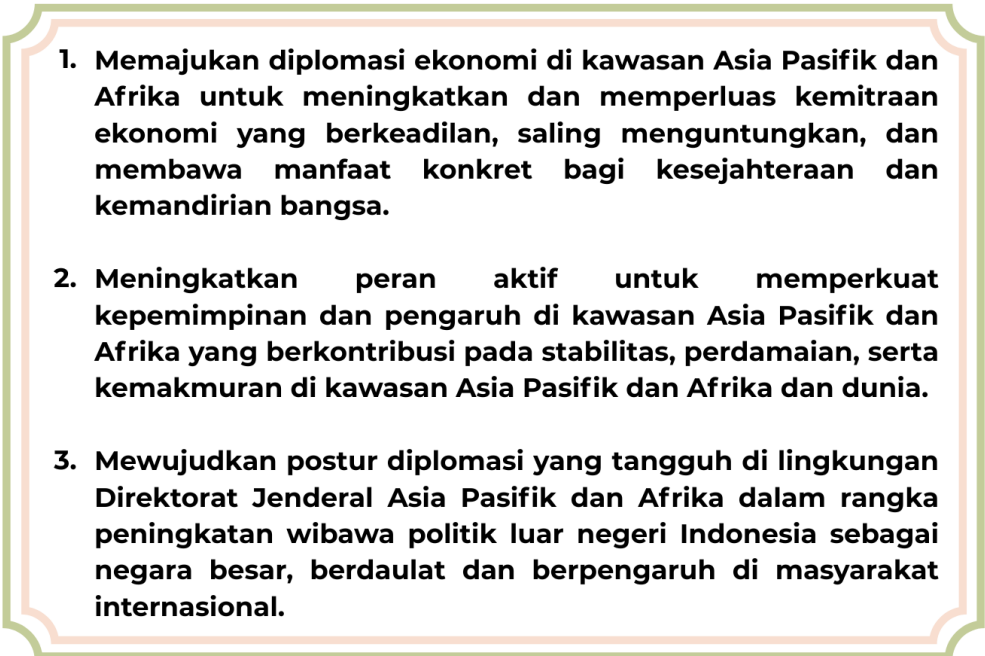
Selain itu, Kementerian Luar Negeri juga mendukung **PN 8** yakni “Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur.”

Pada periode 2025 – 2029, Kementerian Luar Negeri melaksanakan misi untuk mendukung ketiga PN sebagai berikut:

1. Memperkuat hubungan internasional yang kondusif untuk menjaga kedaulatan NKRI dan ketahanan nasional.

2. Memajukan diplomasi ekonomi untuk meningkatkan dan memperluas kemitraan ekonomi yang berkeadilan, saling menguntungkan, dan membawa manfaat konkret bagi kesejahteraan dan kemandirian bangsa.
3. Meningkatkan peran aktif untuk memperkuat kepemimpinan dan pengaruh di kawasan dan global yang berkontribusi pada stabilitas, perdamaian, serta kemakmuran di kawasan dan dunia.
4. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan terhadap WNI di luar negeri, termasuk Pekerja Migran Indonesia.
5. Meningkatkan peran strategis diaspora Indonesia dalam pembangunan nasional.
6. Meningkatkan wibawa politik luar negeri Indonesia sebagai negara besar, berdaulat dan berpengaruh di mata masyarakat internasional melalui penguatan postur diplomasi Indonesia.

Selaras dengan misi Kementerian Luar Negeri periode 2025 – 2029, Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika menetapkan **misi** untuk lima tahun ke depan:

- 
1. **Memajukan diplomasi ekonomi di kawasan Asia Pasifik dan Afrika untuk meningkatkan dan memperluas kemitraan ekonomi yang berkeadilan, saling menguntungkan, dan membawa manfaat konkret bagi kesejahteraan dan kemandirian bangsa.**
 2. **Meningkatkan peran aktif untuk memperkuat kepemimpinan dan pengaruh di kawasan Asia Pasifik dan Afrika yang berkontribusi pada stabilitas, perdamaian, serta kemakmuran di kawasan Asia Pasifik dan Afrika dan dunia.**
 3. **Mewujudkan postur diplomasi yang tangguh di lingkungan Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika dalam rangka peningkatan wibawa politik luar negeri Indonesia sebagai negara besar, berdaulat dan berpengaruh di masyarakat internasional.**

Gambar II.2 Misi Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika 2025 – 2029

II.3 Tujuan Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika

Tujuan Kementerian Luar Negeri pada Renstra 2025 – 2029 adalah :

1. Memantapkan integritas kedaulatan NKRI dan diplomasi ketahanan nasional.
2. Meningkatkan diplomasi ekonomi untuk memajukan kemitraan ekonomi, meningkatkan daya saing, memperluas peluang, memperkuat posisi tawar Indonesia, dan membawa manfaat konkret bagi kesejahteraan dan kemandirian bangsa.

3. Meningkatkan kepemimpinan dan pengaruh Indonesia di kawasan dan global yang diakui sebagai *positive force*, aktor kunci, dan bagian dari solusi yang berkontribusi pada stabilitas, perdamaian, serta kemakmuran kawasan dan dunia.
4. Meningkatkan kerja sama pembangunan internasional yang responsif, fleksibel, dan tanggap terhadap dinamika global sebagai alat strategis untuk memperkuat pengaruh diplomasi Indonesia.
5. Meningkatkan kualitas pelayanan dan perlindungan terhadap WNI di luar negeri, termasuk Pekerja Migran Indonesia.
6. Meningkatkan keterlibatan aktif diaspora Indonesia secara strategis dalam pembangunan nasional.
7. Mengoptimalkan diplomasi *soft power* Indonesia dalam mendukung pencapaian kepentingan nasional.
8. Memperkuat postur diplomasi guna meningkatkan wibawa politik luar negeri Indonesia.

Merujuk pada tujuan Kementerian Luar Negeri, Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika berupaya mewujudkan visi dan misi dengan **tujuan** untuk:

- 
- 1. Meningkatkan diplomasi ekonomi di kawasan Asia Pasifik dan Afrika untuk memajukan kemitraan ekonomi, meningkatkan daya saing, memperluas peluang, memperkuat posisi tawar Indonesia, dan membawa manfaat konkret bagi kesejahteraan dan kemandirian bangsa.**
 - 2. Meningkatkan kepemimpinan dan pengaruh Indonesia di kawasan Asia Pasifik dan Afrika yang diakui sebagai *positive force*, aktor kunci, dan bagian dari solusi yang berkontribusi pada stabilitas, perdamaian, serta kemakmuran kawasan dan dunia.**
 - 3. Memperkuat postur diplomasi guna meningkatkan wibawa politik luar negeri Indonesia melalui tata kelola organisasi yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika.**

Gambar II.3 Tujuan Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika 2025 – 2029

Pelaksanaan tujuan Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika akan tergambar dari sejumlah indikator kinerja yang terukur yakni:

1. Indeks Efektivitas Diplomasi Ekonomi di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika;
2. Persentase Kepemimpinan Indonesia di forum regional di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika;

3. Persentase Prakarsa/Rekomendasi pada Forum Kerja Sama Intrakawasan dan Antarkawasan Asia Pasifik dan Afrika yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan Dalam Negeri;
4. Persentase Kesepakatan Bilateral yang Ditindaklanjuti di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika;
5. Persentase *Data Economic Intelligence* dari Kawasan Asia Pasifik dan Afrika yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan Dalam Negeri;
6. Persentase Gagasan/Prakarsa/Rekomendasi Indonesia yang Diterima pada Forum Regional di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika;
7. Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Kementerian Luar Negeri;
8. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika;
9. Indeks Pengelolaan Barang Milik Negara Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika;
10. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika;
11. Indeks Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Luar Negeri.

II.4 Sasaran Program Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika

Pada Renstra 2025 – 2029, Kemenlu masih mengadopsi indikator-indikator yang masih relevan dengan visi misi yang akan dijalankan pada periode lima tahun ke depan.

Kementerian Luar Negeri memiliki sembilan sasaran strategis untuk dicapai selama tahun 2025 – 2029. Selaras dengan hal itu dan meninjau relevansinya, Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika memiliki enam sasaran program untuk periode 2025 – 2029 sebagai berikut:

1. Nilai manfaat diplomasi ekonomi yang optimal di kawasan Asia Pasifik dan Afrika

Sesuai dengan tujuan keberadaan organisasi Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika, Kementerian Luar Negeri serta amanat kinerja dari Presiden RI, kinerja diplomasi ekonomi perlu diukur relevansinya dengan capaian di bidang perdagangan, investasi, dan wisatawan mancanegara. Hal ini ditujukan agar hasil diplomasi dapat dirasakan secara langsung manfaatnya oleh masyarakat luas di tanah air.

Nilai manfaat diplomasi ekonomi yang optimal merupakan jumlah nominal manfaat secara ekonomi, keuangan, dan pembangunan yang paling menguntungkan yang dihasilkan oleh berbagai kerja sama dan hubungan perdagangan, investasi, dan pariwisata antara negara.

Diplomasi Ekonomi adalah pelaksanaan kebijakan diplomasi dalam bidang hubungan luar negeri secara bilateral, regional dan multilateral untuk memajukan kesejahteraan umum dan melindungi serta memperjuangkan kepentingan ekonomi nasional dalam sektor perdagangan, investasi, pariwisata, ketenagakerjaan, finansial, kerja sama pembangunan internasional, dan bidang lainnya.

Arti kata Optimal berarti paling baik dan tertinggi.

Pengukuran menggunakan indeks efektivitas diplomasi ekonomi, dengan target Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika adalah 81 pada tahun 2025 dan 83 pada tahun 2029.

2. Kepemimpinan dan peran Indonesia yang berpengaruh di kawasan Asia Pasifik dan Afrika

Sasaran ini sesuai dengan tujuan keberadaan Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika, Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI serta melaksanakan amanat kinerja dari Presiden RI yaitu capaian kinerja diplomasi perlu diukur relevansinya dengan hasil dari peran/kontribusi diplomasi yang dilakukan Indonesia dalam memimpin forum di tingkat bilateral, regional, multilateral dan global.

Kepemimpinan merupakan hasil dari peran/kontribusi diplomasi yang dilakukan Indonesia dalam memperjuangkan kepentingan nasional di tingkat regional dan global, khususnya di kawasan Asia Pasifik dan Afrika. Kepemimpinan dapat diperlihatkan diantaranya melalui peran/posisi strategis Indonesia sebagai presidensi, *host*, *co-host*, *chair*, *co-chair*, inisiator, *mediator*, *coordinator of group*, *member of board*, *member of council*, dll.

Kepemimpinan adalah nilai kewibawaan yang menjadi pertimbangan dan kepercayaan dunia internasional terhadap kedudukan Indonesia, sehingga memiliki nilai pengaruh terhadap kebijakan di forum internasional.

Peran adalah sumbangsih, partisipasi dan keikutsertaan secara aktif.

Berpengaruh adalah memiliki pengaruh terhadap pengambilan kebijakan isu-isu di tingkat regional dan global.

Internasional adalah menyangkut bangsa atau negeri seluruh dunia, baik di tingkat bilateral, regional, dan global.

Pengukuran menggunakan perbandingan pertemuan yang dipimpin Indonesia dengan pertemuan yang disepakati dalam rencana untuk dipimpin Indonesia di

forum regional kawasan Asia Pasifik dan Afrika dengan target 100% sampai dengan tahun 2029.

3. Dukungan dan komitmen nasional atas kebijakan luar negeri dan kesepakatan internasional yang tinggi di kawasan Asia Pasifik dan Afrika

Pada tingkat bilateral serta forum-forum regional terdapat kesepakatan-kesepakatan yang disetujui bersama oleh Indonesia dan negara-negara lain. Kesepakatan tersebut perlu diimplementasikan agar dapat dirasakan manfaatnya oleh rakyat.

Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika perlu memberikan rekomendasi kepada K/L *focal point* untuk mengimplementasikan atau menindaklanjuti kesepakatan bilateral, regional, dan multilateral terkait di tingkat nasional. Fungsi yang dilakukan Kemenlu adalah untuk memastikan bahwa kesepakatan tersebut terimplementasi dengan baik.

Dukungan adalah sokongan/bantuan.

Komitmen adalah (upaya) perjanjian (keterikatan) untuk melakukan sesuatu.

Kebijakan luar negeri adalah sikap dan langkah Pemerintah Republik Indonesia yang diambil dalam melakukan hubungan dengan negara lain, organisasi internasional, dan subyek hukum internasional lainnya dalam rangka menghadapi masalah internasional guna mencapai tujuan nasional.

Kesepakatan internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan sebutan apa pun, yang diatur oleh hukum internasional dan dibuat secara tertulis oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan satu atau lebih negara, organisasi internasional atau subyek hukum internasional lainnya, serta menimbulkan hak dan kewajiban pada Pemerintah Republik Indonesia yang bersifat hukum publik.

Arti kata Tinggi adalah (mendukung) secara penuh.

Pengukuran menggunakan persentase kesepakatan kerja sama bilateral di kawasan Asia Pasifik dan Afrika dan prakarsa atau rekomendasi Indonesia pada forum kerja sama Intrakawasan dan antarkawasan yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan dalam negeri dengan target 100% sampai dengan tahun 2029.

4. Diplomasi bilateral yang kuat di kawasan Asia Pasifik dan Afrika

Dalam dinamika relasi antar negara, kepentingan Indonesia di bidang tersebut diperjuangkan melalui diplomasi bilateral. Relasi bilateral perlu didorong untuk

bersifat mutualistik, yakni di satu sisi dapat memastikan terjaganya kepentingan Indonesia, dan di sisi lain, relasi tersebut mampu memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Hubungan bilateral mencakup sejumlah bidang, yakni ekonomi, sosial, budaya, politik dan keamanan, serta maritim. Sejumlah hal menyangkut kepentingan Indonesia dapat diusulkan, dan selanjutnya dibahas melalui proses negosiasi dan perundingan. Kinerja terkait sasaran ini adalah keberhasilan mencapai kesepakatan yang memberikan *assurance* terhadap terjaganya kepentingan Indonesia dalam hubungan antar negara di kawasan Asia Pasifik dan Afrika.

Diplomasi Bilateral adalah pelaksanaan kebijakan diplomasi dalam bidang hubungan luar negeri secara bilateral.

Kuat adalah teguh, tidak mudah goyah dan mempunyai keunggulan.

Pengukuran menggunakan persentase kesepakatan bilateral yang dihasilkan di kawasan Asia Pasifik dan Afrika dengan target yang meningkat sampai 98.15% pada tahun 2029 serta melalui persentase *data economic intelligence* dari kawasan Asia Pasifik dan Afrika yang ditindaklanjuti oleh *stakeholders* dalam negeri dengan target yang menunjukkan peningkatan mencapai 100% sampai dengan tahun 2029.

5. Diplomasi regional yang kuat di kawasan Asia Pasifik dan Afrika

Sasaran strategis ini berfokus pada pengukuran kinerja pelaksanaan kegiatan diplomasi regional. Relasi multilateral di kawasan regional perlu didorong untuk bersifat mutualistik, yakni di satu sisi dapat memastikan terjaganya kepentingan Indonesia, dan di sisi lain, relasi tersebut mampu memberikan manfaat bagi berbagai pihak. Hubungan multilateral mencakup sejumlah bidang, yakni ekonomi, sosial, budaya, politik dan keamanan, serta maritim. Kepentingan Indonesia di bidang tersebut dapat diperjuangkan melalui diplomasi regional.

Sejumlah hal menyangkut kepentingan Indonesia dapat diusulkan, dan selanjutnya dibahas melalui forum kerja sama di kawasan regional. Kinerja sasaran strategis ini adalah keberhasilan mencapai kesepakatan yang memberikan *assurance* terhadap terjaganya kepentingan Indonesia dalam hubungan kerja sama di kawasan regional Asia Pasifik dan Afrika.

Diplomasi Regional adalah pelaksanaan kebijakan diplomasi dalam kerja sama regional.

Arti kata Kuat adalah teguh, tidak mudah goyah dan mempunyai keunggulan.

Pengukuran menggunakan persentase gagasan/prakarsa/rekomendasi Indonesia yang diterima pada forum regional di kawasan Asia Pasifik dan Afrika dengan target 100%.

6. Postur Diplomasi Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika yang Tangguh

Keberadaan postur diplomasi penting untuk mendukung prioritas-prioritas Indonesia di luar negeri. Postur diplomasi meliputi reformasi birokrasi peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur fisik diplomasi, penguatan pemanfaatan teknologi dan informatika, serta transformasi digital.

Tata Kelola Organisasi Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika yang baik adalah salah satu unsur dari postur diplomasi yang kuat yang merupakan rangkaian proses, kebiasaan, kebijakan, aturan, dan institusi yang mempengaruhi pengarahannya, pengelolaan, serta pengontrolan suatu organisasi. Tata kelola juga mencakup hubungan antara para pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengelolaan tujuan organisasi.

Keberadaan postur diplomasi yang kuat turut ditopang oleh Pengelolaan Anggaran yang optimal dan akuntabel serta pengelolaan aset.

Postur diplomasi meliputi reformasi birokrasi peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur fisik diplomasi, penguatan pemanfaatan infrastruktur teknologi dan penerapan keamanan informasi, serta transformasi digital.

Arti kata Tangguh adalah teguh, tidak mudah goyah dan mempunyai keunggulan.

Indikator turunan sasaran program ini sebagai berikut:

1. Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Kementerian Luar Negeri dengan target 83 pada tahun 2025 dan 87,47 pada tahun 2029. Penilaian dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atas upaya suatu organisasi pemerintah untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mencapai *good governance*. Penilaian Reformasi Birokrasi merujuk pada Permen PANRB Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi.
2. Indeks Opini BPK atas Laporan Keuangan Kemenlu dengan target 4 (WTP) pada tahun 2025 sampai tahun 2029. Penilaian ini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan berdasarkan pada empat kriteria, yaitu

kesesuaian penyajian laporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan informasi keuangan (adequate disclosure), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektivitas sistem pengendalian intern (SPI).

3. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika yang diproyeksikan meningkat mencapai 80,50 (A) pada tahun 2029. Nilai evaluasi AKIP adalah nilai perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.
4. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), dengan proyeksi peningkatan sampai tahun 2029. Nilai IKPA tercantum pada sistem informasi Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan dan terdiri dari 4 aspek pelaksanaan anggaran yaitu Kesesuaian antara Perencanaan dan Pelaksanaan, Kepatuhan terhadap regulasi, Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan, Efisiensi pelaksanaan Kegiatan.
5. Indeks Pengelolaan BMN Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika. Indeks Pengelolaan BMN adalah alat ukur kualitas pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang dilaksanakan oleh satker sebagai pendukung pengelolaan Aset Kementerian Luar Negeri secara keseluruhan. Implementasi Indeks Pengelolaan BMN merupakan bentuk penguatan dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pengelolaan BMN sebagai upaya Pengelola Barang bersama-sama Pengguna Barang untuk terus menerus melakukan perbaikan tata kelola BMN. IK ini diampu sejak tahun 2022 dengan target dan realisasi yang selalu meningkat.

Tabel II.1 Indikasi Risiko
Sasaran Program Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika 2025-2029

No	Sasaran Program	Indikasi Risiko
1	Nilai manfaat diplomasi ekonomi di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika	1. Kurangnya dukungan dan koordinasi dengan K/L dan pemangku kepentingan domestik lain (pelaku usaha, asosiasi, dll.) untuk meningkatkan diplomasi ekonomi di sektor perdagangan, investasi dan pariwisata. 2. Kurangnya ketertarikan negara mitra untuk meningkatkan hubungan ekonomi seperti investasi dan perdagangan di komoditas yang menjadi prioritas bagi Indonesia, termasuk dengan penerapan berbagai hambatan perdagangan. 3. Tidak tercapainya target peningkatan jumlah wisatawan mancanegara ke Indonesia.

No	Sasaran Program	Indikasi Risiko
		4. Penyelenggaraan kegiatan mengalami penundaan disebabkan oleh perubahan prioritas dan arahan pimpinan, kurangnya koordinasi, pengalihan anggaran, serta keterbatasan waktu dalam melakukan persiapan kegiatan. 5. Identifikasi peluang kerja sama ekonomi baru maupun pengembangan sektor potensial dengan negara mitra belum memanfaatkan dengan optimal. 6. Dinamika persaingan geopolitik dan geoekonomi, instabilitas geopolitik dan geoekonomi yang berdampak pada perlambatan pertumbuhan dan aktivitas ekonomi global (termasuk pada sektor perdagangan, investasi, dan pariwisata). 7. Kurangnya pengetahuan para pemangku kepentingan di Indonesia, baik pemerintah maupun swasta terkait potensi ekonomi dan pembangunan negara-negara mitra terutama mitra non-tradisional Indonesia. 8. Ketersediaan data dan analisis pasar yang andal sebagai dasar perumusan kebijakan serta promosi diplomasi ekonomi yang belum memadai.
2	Kepemimpinan dan peran Indonesia yang berpengaruh di tingkat Regional dan Global	1. Komitmen dan kapasitas kementerian/lembaga lain dalam mendukung kontribusi finansial pada organisasi internasional belum memadai. 2. Prakarsa dan rekomendasi Indonesia belum diterima dalam pertemuan tingkat tinggi baik regional atau multilateral. 3. Jadwal pertemuan dengan mitra tidak disepakati. 4. Pertemuan yang dipimpin Indonesia tidak menghasilkan kesepakatan. 5. Kertas posisi tidak tersusun secara komprehensif. 6. Belum optimalnya perencanaan strategi nasional terkait pencalonan dan sinergi di antara K/L. 7. Tidak ada tindak lanjut hasil rekomendasi dari sidang yang diikuti dari forum multilateral yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan nasional. 8. Rendahnya kehadiran perwakilan Pemerintah Indonesia pada sidang multilateral atau sidang internasional lainnya. 9. Rapat koordinasi penyusunan posisi Indonesia dengan instansi terkait tidak terlaksana.
3	Dukungan dan komitmen nasional atas kebijakan luar negeri dan	1. Perbedaan prioritas dan kepentingan antara K/L maupun mitra terkait dengan perjanjian maupun kesepakatan internasional yang menyebabkan tidak adanya atau terhambatnya tindak lanjut.

No	Sasaran Program	Indikasi Risiko
	kesepakatan internasional yang tinggi di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika	2. Kurangnya sosialisasi dan edukasi publik terkait manfaat dan urgensi kesepakatan internasional yang berimplikasi pada rendahnya dukungan publik. 3. Tidak adanya implementasi konkret dari pemangku kepentingan domestik terhadap kesepakatan yang telah terjalin dengan negara mitra dalam pertemuan-pertemuan di tingkat Pejabat Tinggi (SOM), Menteri, dan Kepala Negara. 4. Belum optimalnya tindak lanjut <i>Data Economic Intelligence</i> oleh pemangku kepentingan dalam negeri. 5. Kurangnya pemahaman publik mengenai pentingnya kebijakan luar negeri RI dan kesepakatan internasional yang melibatkan Indonesia akibat tidak optimalnya diseminasi hasil kesepakatan beserta dampaknya ataupun rekomendasi hasil sidang internasional, baik di kalangan umum, akademisi, praktisi dan LSM. 6. Koordinasi dan mekanisme movev antar K/L guna tindak lanjut hasil kesepakatan serta penyesuaian perubahan kelembagaan pada administrasi pemerintahan baru yang belum berjalan optimal. 7. Tidak sinkronnya aspirasi publik dengan posisi, kebijakan, maupun kesepakatan Indonesia dalam kebijakan luar negeri dengan negara mitra maupun pada organisasi internasional. 8. Keterbatasan anggaran yang dapat menyebabkan ketidaksiapan instansi terkait untuk menindaklanjuti hasil kesepakatan.
4	Diplomasi bilateral yang kuat di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika	1. Terbatasnya partisipasi atau representasi Indonesia dalam pertemuan dan sidang regional maupun multilateral karena keterbatasan sumber daya (manusia dan anggaran). 2. Masih belum optimalnya keselarasan/sinkronisasi antara kertas posisi Indonesia dengan <i>stakeholder</i> K/L terkait. 3. Berkurangnya dukungan terhadap Indonesia dan rendahnya tingkat kerja sama dengan negara lain baik pada lingkup bilateral. 4. Penyelenggaraan pertemuan mekanisme bilateral yang sangat tergantung pada kesediaan jadwal pejabat pada tingkat yang disepakati. Sebagai contoh pertemuan Sidang Komisi Bersama pada tingkat Menteri Luar Negeri. 5. Perbedaan kepentingan nasional dan/atau prioritas Pemri dengan negara mitra. 6. Perubahan prioritas dan kebijakan negara mitra yang berdampak pada kelangsungan kerja sama atau pembahasan isu strategis yang sedang berlangsung.

No	Sasaran Program	Indikasi Risiko
		7. Dinamika politik di negara mitra yang mengakibatkan kevakuman politik dan pada keberlanjutan proses negosiasi, penyelesaian/penandatanganan, hingga pelaksanaan kesepakatan bilateral. 8. Kurangnya koherensi posisi dasar Pemerintah Indonesia di antara K/L terkait dalam pertemuan internasional dan optimalisasi kesepakatan posisi dasar Indonesia dengan K/L terkait. 9. Kurangnya pengetahuan para pemangku kepentingan di Indonesia, baik pemerintah, BUMN maupun swasta terkait potensi ekonomi dan pembangunan negara-negara mitra terutama mitra non-tradisional Indonesia.
5	Diplomasi Multilateral yang kuat di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika	1. Berkurangnya dukungan terhadap Indonesia dan rendahnya tingkat kerja sama dengan negara lain baik pada lingkup regional, maupun multilateral. 2. Rendahnya dukungan terhadap pencalonan Indonesia pada forum regional dan multilateral di kawasan Asia Pasifik dan Afrika. 3. Pembatasan jumlah delegasi dan kehadiran delegasi untuk hadir berpartisipasi pada sidang regional maupun multilateral. 4. Terbatasnya partisipasi atau representasi Indonesia dalam pertemuan dan sidang regional maupun multilateral karena keterbatasan sumber daya (manusia dan anggaran). 5. Masih belum optimalnya keselarasan/sinkronisasi antara kertas posisi Indonesia dengan <i>stakeholder</i> K/L terkait. 6. Keterlibatan dan peran Perwakilan RI di negara-negara anggota dalam penjajakan posisi negara anggota organisasi regional yang belum optimal pada forum regional dan multilateral. 7. Kurangnya koordinasi pelaksanaan dan laporan pelaksanaan tindak lanjut hasil pertemuan regional.
6	Postur diplomasi yang tangguh di Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika	1. Tidak tercapainya nilai RB Kementerian Luar Negeri sesuai target. 2. Proses perencanaan yang kurang optimal karena muncul kegiatan/program mendadak dan kegiatan yang batal secara tiba-tiba sehingga berdampak pada realisasi anggaran dan target kinerja. 3. Adanya unit organisasi yang menyampaikan Laporan Kinerja tidak tepat waktu dan tidak dilengkapi dengan analisis capaian kinerja yang memadai.

No	Sasaran Program	Indikasi Risiko
		4. Tidak tercapainya nilai AKIP Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika dan seluruh unit organisasi sesuai target. 5. Perubahan target kinerja yang dipengaruhi kondisi dan situasi terkini. 6. Terbatasnya sumber daya meliputi kecukupan SDM, sarana prasarana serta anggaran yang mendukung implementasi kebijakan luar negeri. 7. Rendahnya realisasi anggaran Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika karena dinamika pelaksanaan kegiatan yang tidak terlaksana. 8. Tidak regular atau tertundanya Dialog Kinerja Organisasi. 9. Pengelolaan aset yang kurang optimal seperti ketidaksesuaian dalam pencatatan aset, pemeliharaan sarana dan prasarana, pemanfaatan sistem pengadaan secara maksimal. 10. Belum optimalnya tata kelola pengawasan intern berbasis risiko.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

III.1 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Luar Negeri

Arah dan Kebijakan Luar Negeri mendatang akan mengikuti dan mendukung arah kebijakan dan strategi nasional sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025 – 2045 yang diundangkan melalui Undang-Undang nomor 59 tahun 2024. RPJPN 2025 – 2045 memiliki tujuan utama mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, yaitu Indonesia sebagai NKRI yang Bersatu, berdaulat, maju dan berkelanjutan.

Kebijakan luar negeri Indonesia akan dioptimalkan untuk memantapkan kepemimpinan yang lebih proaktif guna menjaga stabilitas kawasan dan global serta berperan penting dalam pembentukan tatanan internasional. Arah kebijakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah: (i) penguatan peran dan kepemimpinan Indonesia sebagai agenda *setter* di tingkat regional, utamanya dalam menjadi *effective leader* di ASEAN, dan global; (ii) pemantapan tata kelola kebijakan luar negeri guna menanggapi dinamika geopolitik dan geoekonomi, serta disrupsi teknologi digital dan perubahan iklim; (iii) penguatan kedaulatan, hak berdaulat, kerja sama pertahanan dan keamanan guna penguatan kapabilitas pertahanan negara, serta menjaga stabilitas kawasan dan perdamaian dunia; (iv) pemajuan nilai, budaya, dan ideologi guna peningkatan citra Indonesia di dunia internasional; serta (v) penguatan kerja sama ekonomi dan pembangunan internasional untuk memperteguh diplomasi dan posisi Indonesia di kawasan dan global.

Ketangguhan diplomasi akan difokuskan pada diplomasi antara lain terkait isu kedaulatan, diplomasi ekonomi, kepemimpinan Indonesia, Kerja Sama Pembangunan Internasional, Diplomasi Publik, Pelindungan WNI, diplomasi di tingkat bilateral, regional hingga multilateral serta penguatan Postur Diplomasi.

Pada tahap pertama RPJPN ini, pengembangan diplomasi difokuskan pada penguatan infrastruktur diplomasi dan kelembagaan, mengonsolidasikan kebijakan dan langkah-langkah untuk memperkuat sinergi diplomasi.

Visi Pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yakni “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”, akan dicapai melalui 8 Misi Asta Cita yaitu:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM)
2. Mempertahankan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur
4. Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Dari kedelapan misi Asta Cita, Kemenlu berperan dalam Pelaksanaan Asta Cita 2 dan Asta Cita 7, serta turut berperan pada Asta Cita 8.

PN 2 Mempertahankan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

Negara yang kuat adalah negara yang memiliki sistem pertahanan keamanan negara yang baik yang dapat melindungi dan menjamin kedamaian di dalam wilayah negara kesatuan. Sistem pertahanan keamanan negara tersebut mencakup pula upaya diplomasi dan Politik Luar Negeri.

Dalam kaitan ini dipandang perlu upaya untuk terus meningkatkan wibawa Indonesia sebagai negara besar dan berdaulat di mata masyarakat internasional, dengan memantapkan supremasi kepemimpinan Indonesia di tingkat global melalui diplomasi yang berdasarkan atas asas bebas aktif.

Sementara itu, kemandirian bangsa mencerminkan kapabilitas sebuah bangsa untuk berdiri tanpa bergantung pada negara lain. Untuk itu pembangunan nasional perlu difokuskan pada upaya mencapai swasembada dalam berbagai sektor krusial yang mencakup sektor pangan sebagai pilar kehidupan bangsa; sektor energi sebagai pendorong inovasi dan kemajuan; sektor air sebagai fondasi kehidupan yang berkelanjutan; dan sektor ekonomi kreatif yang memperlihatkan keunikan dan kekayaan budaya.

Ekonomi hijau perlu dikedepankan untuk mendorong pertumbuhan berkelanjutan tanpa merusak lingkungan dan mengoptimalkan sumber daya alam yang ada, serta ekonomi biru untuk menekankan nilai penting dari kekayaan kelautan Indonesia.

Dapat ditambahkan bahwa perempuan memiliki peran penting dan strategis dalam mendorong pertumbuhan berkelanjutan melalui ekonomi hijau dan ekonomi biru. Dalam ekonomi hijau, perempuan berkontribusi melalui praktik ramah lingkungan di rumah tangga, usaha kecil berbasis alam, serta kepemimpinan dalam pelestarian sumber daya alam.

Sementara dalam ekonomi biru, perempuan berperan dalam pengelolaan sumber daya laut secara berkelanjutan, pelestarian ekosistem pesisir, dan pengembangan potensi maritim yang tidak merusak lingkungan. Pemberdayaan perempuan di kedua sektor ini akan memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat, menjaga keberlanjutan lingkungan, serta memastikan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan harus memperhatikan perspektif gender agar potensi perempuan sebagai agen perubahan dapat dioptimalkan sepenuhnya.

PN 7 Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.

Aspek yang krusial dalam menciptakan pemerintahan yang transparan, efektif, dan bertanggung jawab adalah reformasi dalam bidang politik, hukum, dan birokrasi. Reformasi ini bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi tindakan yang merugikan masyarakat, seperti korupsi dan pemakaian narkoba, ataupun upaya untuk dapat terus meningkatkan pelayanan dan perlindungan kepada seluruh WNI, baik di dalam maupun luar negeri.

Upaya-upaya tersebut harus dilaksanakan dengan kebijakan yang kuat dan konsisten. Hal ini tidak hanya mencerminkan keseriusan pemerintah dalam menjunjung nilai integritas dan keadilan, tetapi juga untuk melindungi generasi penerus dari ancaman yang bisa menghambat potensinya.

PN 8 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur

Pada prioritas nasional ini diharapkan setiap individu memiliki tanggung jawab untuk menghormati dan menjaga toleransi antarumat beragama, keberlanjutan alam, sekaligus melestarikan nilai dan warisan budaya sebagai landasan transformasi pembangunan untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045.

Kemenlu memiliki peran yang cukup penting dalam rangka menyebarkan nilai-nilai toleransi antarumat beragama yang dimiliki Indonesia kepada masyarakat internasional melalui pertemuan-pertemuan yang diadakan ataupun diikuti. Selain itu, Kemenlu juga mengembangkan nilai dan warisan budaya Indonesia di dunia internasional agar memiliki manfaat bagi pembangunan nasional.

Pelaksanaan Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian pada tahun 2025 akan dilaksanakan melalui lima program, yaitu:

1. Program Diplomasi dan Kerja Sama Internasional;
2. Program Peran dan Kepemimpinan Indonesia di bidang Kerja Sama Multilateral;
3. Program Penegakan Kedaulatan serta Hukum dan Perjanjian Internasional;
4. Program Pelindungan WNI di Luar Negeri serta Pelayanan Publik; dan
5. Program Dukungan Manajemen.

Selanjutnya untuk periode 2026-2029, Kementerian Luar Negeri akan mengampu penyederhanaan program yang menjadi tiga program, meliputi:

1. Program Diplomasi dan Kerja Sama Internasional
2. Program Pelindungan WNI di Luar Negeri serta Pelayanan Publik
3. Program Dukungan Manajemen.

Penyederhanaan program dimaksud berdasarkan Surat Edaran Bersama Deputi Bidang Pembiayaan dan Investasi Pembangunan atas nama Menteri PPN/Kepala Bappenas nomor 4 tahun 2025 dan Direktur Jenderal Anggaran atas nama Menteri Keuangan nomor 2/MK/AG/2025 tanggal 23 Juli 2025 tentang Daftar Program Kementerian/Lembaga.

III.1.1. Arah Kebijakan Kementerian Luar Negeri

Renstra Kementerian Luar Negeri 2025 – 2029 menetapkan arah kebijakan Kemenlu yaitu:

1. Penguatan integritas kedaulatan NKRI yang mendukung ketahanan nasional;
2. Peningkatan diplomasi ekonomi untuk memajukan kemitraan ekonomi, meningkatkan daya saing, memperluas peluang, dan memperkuat posisi Indonesia;
3. Peningkatan kepemimpinan dan pengaruh Indonesia di kawasan regional dan global sebagai kekuatan positif, aktor kunci, dan bagian dari solusi yang berkontribusi terhadap stabilitas, perdamaian, serta kemakmuran kawasan dan dunia;
4. Peningkatan kerja sama pembangunan internasional yang responsif, berkesinambungan, fleksibel, dan tanggap terhadap dinamika global sebagai instrumen strategis untuk memperkuat pengaruh diplomasi Indonesia;
5. Peningkatan kualitas pelayanan dan pelindungan terhadap WNI di luar negeri, termasuk Pekerja Migran Indonesia dan pelayanan publik yang prima;
6. Peningkatan keterlibatan aktif potensi diaspora Indonesia dalam mendukung pencapaian kepentingan nasional;
7. Peningkatan diplomasi *soft power* untuk mendukung pencapaian kepentingan nasional; dan
8. Penguatan postur diplomasi guna meningkatkan wibawa politik luar negeri Indonesia.

III.2 Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika

Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika menentukan arah kebijakan dengan tetap menjaga kesinambungan dengan strategi kebijakan serta penajaman program Kementerian Luar Negeri.

Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika mengampu 2 (dua) program yaitu:

1. Program Diplomasi dan Kerja Sama Internasional
2. Program Dukungan Manajemen.

III.2.1 Arah Kebijakan Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika

Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika memiliki arah kebijakan yang selaras dengan Kementerian Luar Negeri yakni:

1. **Peningkatan diplomasi ekonomi di kawasan Asia Pasifik dan Afrika untuk memajukan kemitraan ekonomi, meningkatkan daya saing, memperluas peluang, dan memperkuat posisi Indonesia.**
2. **Peningkatan kepemimpinan dan pengaruh Indonesia di kawasan Asia Pasifik dan Afrika sebagai kekuatan positif, aktor kunci, dan bagian dari solusi yang berkontribusi terhadap stabilitas, perdamaian, serta kemakmuran kawasan dan dunia.**
3. **Penguatan postur diplomasi guna meningkatkan wibawa politik luar negeri Indonesia melalui tata kelola organisasi yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika.**

III.2.2 Strategi Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika

Sebagai upaya mewujudkan arah kebijakan, Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika akan menjalankan strategi, yang terdiri dari:

1. Arah kebijakan peningkatan diplomasi ekonomi di kawasan Asia Pasifik dan Afrika untuk memajukan kemitraan ekonomi, meningkatkan daya saing, memperluas peluang, dan memperkuat posisi Indonesia memiliki strategi sebagai berikut:
 - a. Mendorong transformasi pertanian Indonesia, termasuk penguatan swasembada pangan, melalui kerja sama internasional di bidang teknologi pertanian, riset agrikultur, dan pembukaan akses pasar global bagi komoditas pertanian unggulan.
 - b. Memperluas kemitraan strategis di sektor energi baru dan terbarukan (EBT) melalui diplomasi energi, promosi investasi hijau, serta pengembangan rantai pasok global yang mendukung transisi energi nasional.
 - c. Memfasilitasi ekspansi BUMN Indonesia di pasar global melalui promosi branding BUMN *Go Global* serta dukungan dan kolaborasi dalam program promosi terpadu di luar negeri.

- d. Mengembangkan ekosistem *startup* nasional melalui kerja sama internasional di bidang inovasi digital, teknologi kecerdasan buatan, serta peningkatan mobilitas dan kapasitas talenta muda Indonesia.
 - e. Mendorong penghapusan hambatan perdagangan terhadap produk unggulan Indonesia serta memperkuat posisi tawar Indonesia dalam forum-forum ekonomi internasional guna melindungi kepentingan nasional.
 - f. Mengarusutamakan diplomasi ekonomi digital sebagai penggerak pertumbuhan inklusif, melalui penguatan kerja sama di bidang AI, keamanan siber, ekonomi kreatif, dan transformasi digital lintas negara.
 - g. Menggalang dukungan internasional bagi pembangunan hijau di Indonesia melalui optimalisasi akses terhadap pendanaan iklim, promosi investasi hijau, dan diplomasi pembangunan berkelanjutan yang berbasis prinsip keadilan iklim.
 - h. Memperkuat kerja sama maritim di kawasan Asia Pasifik dan Afrika serta pada forum global untuk mendukung penguatan ekonomi biru (*blue economy*), perlindungan sumber daya laut, konektivitas, serta peningkatan kapasitas.
 - i. Mendorong perluasan akses dan penetrasi dagang Indonesia dengan negara-negara potensial non-tradisional guna mengantisipasi fluktuasi perdagangan eksisting, terutama negara besar.
 - j. Mendorong pemanfaatan instrumen kebijakan ekonomi negara/wilayah akreditasi untuk kepentingan Indonesia, terutama pada proyek strategis nasional, perluasan basis produksi industri manufaktur, hilirisasi, dan penguatan ketahanan pangan.
 - k. Mendorong finalisasi *Grand Design* Diplomasi Ekonomi;
 - l. Mendorong finalisasi *Grand Design* Strategi Kebijakan Indonesia di Kawasan Pasifik (*Pacific Elevation*);
 - m. Memperkuat strategi kebijakan luar negeri yang mendukung Asta Cita, seperti isu ketahanan pangan, energi dan air,
 - n. Mendorong solusi iklim yang adil dan inklusif melalui UNFCCC, kerja sama regional, dan kemitraan lainnya.
 - o. Mendorong Pemanfaatan *dashboard* Investolink dan pengembangan Sistem Informasi Diplomasi Ekonomi (SIDE) dalam mendukung upaya penguatan diplomasi ekonomi.
2. Arah kebijakan peningkatan kepemimpinan dan pengaruh Indonesia di kawasan Asia Pasifik dan Afrika sebagai kekuatan positif, aktor kunci, dan bagian dari solusi yang berkontribusi terhadap stabilitas, perdamaian, serta kemakmuran kawasan dan dunia memiliki strategi sebagai berikut:
- a. Meningkatkan peran aktif dan kepemimpinan Indonesia di tingkat global di tengah dinamika geopolitik internasional melalui diplomasi yang berdasarkan prinsip politik luar negeri bebas aktif.
 - b. Melanjutkan peran aktif Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia dalam forum-forum bilateral, regional, maupun multilateral sesuai dengan

amanat konstitusi, serta memperkuat dukungan diplomasi terhadap upaya kemerdekaan dan kedaulatan Palestina.

- c. Memperkuat kerja sama multilateral dan regional dalam isu-isu terkait perdamaian dan keamanan internasional, hak asasi manusia, migrasi, kebencanaan, demokrasi, kerja sama ekonomi strategis, pembangunan berkelanjutan, kemaritiman, lingkungan hidup, serta kemitraan strategis, kesehatan global, kependudukan, pendidikan, kebudayaan, ketenagakerjaan, pariwisata, kerja sama parlemen, dan ilmu pengetahuan dan teknologi di berbagai badan utama dan subsider PBB serta forum kerja sama multilateral dan regional lainnya yang menguntungkan kepentingan nasional.
- d. Mengoptimalkan keanggotaan Indonesia pada pelbagai forum internasional dan kawasan, untuk menyuarakan dan mendorong inisiatif-inisiatif baru yang makin mengakomodasi kepentingan nasional dan kepentingan *Global South*.
- e. Mendorong penyelesaian damai dan berkelanjutan atas krisis Myanmar melalui fasilitasi dialog inklusif, penguatan peran ASEAN, serta kerja sama regional dan internasional guna mewujudkan stabilitas dan perdamaian kawasan.
- f. Meningkatkan peran Indonesia baik melalui mekanisme bilateral maupun ASEAN dalam penyelesaian krisis kemanusiaan di Rakhine State, Myanmar guna tercapainya repatriasi yang aman, sukarela, dan bermartabat bagi para pengungsi serta mendorong terciptanya stabilitas keamanan di Rakhine State.
- g. Meningkatkan kerja sama dan *trust-building* di kawasan Indo-Pasifik yang terfokus pada pengembangan kerja sama kemaritiman, konektivitas dan infrastruktur, serta Pembangunan.
- h. Menunjukkan kepemimpinan Indonesia selaku koordinator kemitraan ASEAN-Australia periode 2024 – 2027 melalui 4 (empat) prioritas utama sebagaimana disampaikan pada 57th AMM/PMC pada Juli 2024, dalam bidang politik (terkait pencegahan konflik dan pengelolaan krisis; kerja sama maritim; mendorong transparansi dan non-proliferasi di kawasan), dalam bidang ekonomi (terkait ketahanan pangan; transisi energi yang berkeadilan; serta implementasi efektif *ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area* (AANZFTA) dan RCEP), dalam bidang sosial budaya (terkait pemanfaatan *ASEAN-Australia Centre*), dan dalam Implementasi AOIP (dengan memanfaatkan kemitraan ASEAN-Australia sebagai sarana dalam meningkatkan engagement dengan *Pacific Island Forum* (PIF), *Melanesian Spearhead Group* (MSG) dan *Indian Ocean Rim Association* (IORA).
- i. Mendorong pemanfaatan upaya Australia dalam meningkatkan investasi dan perdagangan dua arah di kawasan Asia Tenggara dan untuk mengakomodasi kepentingan Indonesia dalam bidang ketahanan pangan, transisi energi berkelanjutan, dan pembangunan *Joint Ventures*, pertukaran pengetahuan, serta fasilitas pendanaan di sektor-sektor

prioritas melalui implementasi *Invested: Australia's Southeast Asia Economic Strategy to 2040*.

- j. Mendorong keterwakilan Indonesia dan atau Warga Negara Indonesia untuk menduduki posisi-posisi strategis di organisasi internasional guna memastikan pengaruh dan kepemimpinan Indonesia dalam proses penyusunan norma dan atau kebijakan organisasi internasional.
 - k. Menegaskan kepemimpinan Indonesia melalui optimalisasi pemanfaatan peran Indonesia sebagai ketua dan/atau tuan rumah pertemuan serta pusat koordinasi kerja sama regional dan internasional yang berlokasi di Indonesia. Memperkuat dialog perumusan kebijakan luar negeri (di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan) melalui *Policy Planning Dialogue* dengan mitra strategis;
 - l. Meningkatkan kemitraan dengan akademisi dan lembaga think tank dan mendorong peran dan kontribusinya dalam perumusan strategi kebijakan nasional terkait kerja sama di berbagai Kawasan dan forum multilateral, serta isu khusus;
 - m. Melaksanakan survei dan penyusunan *foresight* untuk mempersiapkan strategi kebijakan dalam menghadapi tantangan global dan regional ke depan, termasuk trend-trend global. Mendorong Kemitraan antara Parlemen dan Pemerintah dan antar-Parlemen Negara Anggota *Asian Parliamentary Assembly*.
3. Arah kebijakan penguatan postur diplomasi guna meningkatkan wibawa politik luar negeri Indonesia melalui tata kelola organisasi yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika memiliki strategi sebagai berikut:
- a. Memperkuat postur dan sumber daya diplomasi dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan/ penyelenggaraan kebijakan luar negeri;
 - b. Memperkuat kinerja koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian penyelenggaraan hubungan luar negeri Indonesia melalui pengembangan kemampuan komponen postur diplomasi
 - c. Memperkuat strategi transformasi digital sebagai upaya penguatan *diplomatic tools* Kemlu.
 - d. Mendukung penguatan kapasitas SDM berperspektif gender dan membentuk tim penggerak PUG lintas unit.

III.3 Mitigasi Risiko

Berdasarkan arah kebijakan dimaksud, Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika memetakan risiko yang perlu dilakukan mitigasi dengan mempertimbangkan analisis SWOT Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika.

Tabel III.1 Mitigasi Risiko
Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika

Risiko Politik	Probabilitas	Dampak	Konsekuensi	Mitigasi
Sikap tegas Indonesia dalam isu-isu tertentu menjadi hambatan dalam proses negosiasi dan pencapaian konsensus dalam forum multilateral	Sedang	Sedang - Besar	a. Tertundanya pencapaian konsensus dalam forum multilateral. b. Berkurangnya ruang diplomasi Indonesia dalam forum tertentu.	a. Penguatan aliansi Indonesia dengan negara-negara <i>like-minded</i> . b. Pendekatan bilateral dengan negara-negara oposisi dengan semangat <i>bridge-building</i> .
Perbedaan kepentingan antara internal dengan mitra terkait	Sedang	Besar	Terhambatnya Tindak Lanjut Kesepakatan	a. Meningkatkan komunikasi internal antar K/L dan mitra. b. Menyusun forum koordinasi rutin.
Ketidakpastian kebijakan domestik	Tinggi	Besar	Ketidakstabilan dalam hubungan internasional	a. Memperkuat analisis kebijakan dan proyeksi jangka panjang. b. Memfasilitasi dialog kebijakan dengan pemangku kepentingan.
Instabilitas politik di negara mitra	Sedang	Besar	Proses penyusunan kesepakatan dan kelangsungan kerja sama bilateral dapat terdampak	a. Menjalin hubungan dengan berbagai pemangku

				kepentingan di negara mitra. b. Memantau perkembangan politik secara berkala.
Risiko Eksternal	Probabilitas	Dampak	Konsekuensi	Mitigasi
Krisis geopolitik berkelanjutan yang memicu krisis ekonomi dan instabilitas finansial	Sedang	Besar	a. Terdisrupsi upaya diplomasi ekonomi. b. Posisi Indonesia yang dirugikan dalam rantai pasok dan perdagangan global.	Diversifikasi mitra dagang dan komoditas
Perubahan prioritas dan kebijakan negara mitra yang berdampak pada kelangsungan kerja sama atau pembahasan isu strategis yang sedang berlangsung	Sedang	Sedang - Besar	Proyek/inisiatif/pem bahasan isu strategis mengalami penundaan signifikan, terhenti, atau dibatalkan.	Mengintensifkan dialog secara teratur untuk memahami potensi perubahan kebijakan negara mitra.
Hambatan perdagangan (tarif/non-tarif)	Tinggi	Sedang	Penurunan daya saing produk	a. Melakukan negosiasi untuk pengurangan tarif. b. Meningkatkan promosi produk di pasar internasional.

Risiko Pemangku Kepentingan	Probabilitas	Dampak	Konsekuensi	Mitigasi
Antusiasme konstituen <i>Grand Design</i> yang dibangun oleh Kemenlu belum optimal (a.l. MILN, masy. Pasifik)	Rendah	Sedang	Tidak terealisasinya berbagai potensi diplomasi RI	a. Pemetaan <i>quick wins</i> dan manfaat (a.l. penyediaan hibah, fasilitas) untuk menunjukkan komitmen nyata Indonesia. b. Penyusunan narasi integrasi dengan agenda regional/global yang lebih besar (a.l. SDGs, Paris Agreement). c. <i>Engagement</i> dengan konstituen sejak awal penyusunan <i>Grand Design</i> guna menumbuhkan <i>sense of ownership</i>.
Tingkat pemahaman pemangku kepentingan tentang potensi kerja sama yang belum optimal sehingga berpengaruh pada rendahnya partisipasi publik	Sedang	Sedang	a. Tidak teridentifikasinya peluang kerja sama secara komprehensif dan mendalam. b. Kurangnya legitimasi dan dukungan publik	a. Mengadakan diseminasi berupa forum publik, jaring masukan, dialog terbuka, workshop atau seminar untuk menyebarluaskan informasi potensi kerja sama luar negeri.

				b. Memanfaatkan media sosial untuk menyebarluaskan informasi. c. Menyediakan laporan dan analisis pasar yang mudah diakses.
Belum optimalnya tindak lanjut <i>Data Economic Intelligence</i> oleh pemangku kepentingan dalam negeri	Sedang	Sedang	Bahan kajian yang kurang mendalam dan tidak sesuai dengan sasaran	a. Melakukan pengolahan DEI terkait potensi kerja sama luar negeri. b. Melakukan diseminasi untuk menyebarluaskan potensi kerja sama luar negeri kepada pemangku kepentingan dalam negeri.
Risiko Administratif	Probabilitas	Dampak	Konsekuensi	Mitigasi
Pergantian pejabat dalam tim perundingan kesepakatan sehubungan dengan panjangnya periode negosiasi	Tinggi	Sedang	a. Terhambatnya efektivitas dan kesinambungan perundingan kesepakatan. b. Melemahnya posisi tawar Indonesia terhadap negara mitra	a. Persiapan sistem manajemen pengetahuan dan arsip diplomatik digital untuk <i>institutional knowledge</i>. b. Penyesuaian prosedur internal seperti rotasi terbatas (<i>buffer time</i>) untuk pejabat

				kunci dalam perundingan strategis.
Rendahnya partisipasi dan representasi Indonesia dalam pertemuan dan sidang regional maupun multilateral karena terbatasnya sumber daya (manusia dan anggaran)	Tinggi	Besar	a. Hilangnya peluang untuk menjalin hubungan diplomatik dan kerjasama yang penting. b. Kehilangan pengaruh / kesempatan dalam pengambilan keputusan di forum internasional dan regional.	a. Mengidentifikasi dan memanfaatkan sumber daya yang ada dengan efisien. b. Menentukan skala prioritas pertemuan bagi kepentingan nasional untuk dapat memastikan partisipasi dan representasi yang memadai.
Penyelenggaraan pertemuan mekanisme bilateral yang sangat tergantung pada kesediaan jadwal pejabat tinggi pada tingkat yang disepakati	Tinggi	Sedang	Ketidakpastian tentang penjadwalan pertemuan dapat mempengaruhi perencanaan kerja sama bilateral.	a. Melakukan pendekatan dengan mitra untuk mencari kemungkinan alternatif pejabat untuk pertemuan mekanisme bilateral. b. Memanfaatkan teknologi komunikasi untuk pertemuan virtual sebagai alternatif ketika jadwal fisik tidak memungkinkan
Risiko Anggaran	Probabilitas	Dampak	Konsekuensi	Mitigasi
Penurunan atau efisiensi pagu	Tinggi	Besar	Berkurangnya kapasitas fiskal	Penyiapan <i>contingency plan</i>

anggaran Kementerian Luar Negeri yang berdampak pada Ditjen Asia Pasifik dan Afrika			untuk kegiatan pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika dan kemampuan untuk memenuhi target tahunan	dengan anggaran minimal/pasca efisiensi sejak awal tahun anggaran, dengan skenario yang masih dapat mempertahankan target unit organisasi
Rendahnya realisasi anggaran	Sedang	Besar	Ketidakoptimalan penggunaan anggaran yang sesuai dengan perencanaan	a. Mengatur penjadwalan kegiatan dengan cermat agar tidak terpusat di akhir tahun. b. Meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan anggaran secara berkala.
Perubahan target kinerja	Sedang	Sedang	Pelaksanaan program yang tidak sesuai dengan target kinerja	a. Menyusun rencana dan kegiatan alternatif untuk penyesuaian target. b. Melakukan pemantauan berkala terkait penyesuaian target.

III.4 Kerangka Regulasi

Pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika telah diatur dalam Permenlu No. 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri. Dalam rangka mendukung pencapaian Sasaran Strategis periode 2025 – 2029, Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika memerlukan arah kerangka regulasi dan/atau kebutuhan regulasi, sebagai berikut:

1. Rancangan UU Perubahan atas UU Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

2. Rancangan UU tentang Perubahan atas UU Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.
3. Rancangan UU tentang Pengesahan Persetujuan antara Republik Indonesia dan Republik Sosialis Vietnam tentang Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif.
4. Rancangan UU tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Malaysia mengenai Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara Di Laut Sulawesi.
5. Rancangan UU tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Malaysia mengenai Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Selat Malaka Bagian Selatan.
6. Rancangan Peraturan Presiden tentang Kebijakan Pemberian Hibah.
7. Rancangan Peraturan Presiden Grand Design Diplomasi Ekonomi.
8. Rancangan Peraturan Presiden Grand Design Strategi Kebijakan Indonesia di kawasan Pasifik (*Pacific Elevation*).
9. Rancangan Peraturan Presiden Pembukaan Konsulat Jenderal Republik Indonesia Di Chengdu, Republik Rakyat Tiongkok.
10. Rancangan Peraturan Presiden tentang Grand Design Strategi Kerja Sama Pembangunan Internasional.
11. Rancangan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Tata Cara Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pemberian Hibah kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing.
12. Rancangan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Luar Negeri.
13. Rancangan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia.
14. Rancangan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Perencanaan Pemberian Hibah kepada Pemerintah Asing atau Lembaga Asing.
15. Rancangan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI.
16. Rancangan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kemenlu dan Perwakilan RI.
17. Rancangan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Tata Kelola Berita Diplomasi dalam Hubungan Luar Negeri.
18. Rancangan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia.
19. Rancangan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang perubahan atas Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 10 tahun 2017 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI.
20. Rancangan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang perubahan atas Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 2 tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI.

21. Rancangan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Pedoman Kebutuhan Jabatan Fungsional.
22. Rancangan Peraturan Menteri PANRB tentang Jabatan Fungsional Hubungan Luar Negeri dan Politik Luar Negeri.

III.5 Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika periode 2025 – 2029 diarahkan untuk mendukung fungsi Kementerian Luar Negeri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang luar negeri, serta melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian dalam penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika terutama di tengah dinamika global yang semakin kompleks, Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika perlu didukung oleh kerangka organisasi, tata laksana/proses bisnis, dan SDM yang kompeten, efektif, inovatif, dan adaptif. Dengan perubahan lingkungan internal maupun eksternal serta peningkatan tuntutan publik, hal tersebut perlu dilengkapi dengan monitoring, evaluasi, dan penataan dalam lingkup organisasi, tata laksana, sistem pengelolaan kearsipan, dan SDM aparatur yang berkelanjutan.

III.5.1 Peran Strategis Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika

Peraturan Presiden Nomor 150 Tahun 2024 tentang Kementerian Luar Negeri dan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 4 tahun 2025 mengatur tugas Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika dalam hal menyelenggarakan perumusan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri dalam lingkup kepentingan bilateral, intrakawasan, dan antar kawasan di Asia Pasifik dan Afrika.

Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri dan dipimpin oleh Direktur Jenderal.

III.5.2 Fungsi Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika

Dalam pelaksanaan tugas dimaksud, Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri dalam lingkup kepentingan bilateral, intrakawasan, dan antarkawasan di Asia Pasifik dan Afrika;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri dalam lingkup kepentingan bilateral, intrakawasan, dan antarkawasan di Asia Pasifik dan Afrika;

3. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri dalam lingkup kepentingan bilateral, intrakawasan, dan antarkawasan di Asia Pasifik dan Afrika;
4. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri dalam lingkup kepentingan bilateral, intrakawasan, dan antarkawasan di Asia Pasifik dan Afrika;
5. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal; dan
6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

III.5.3 Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika

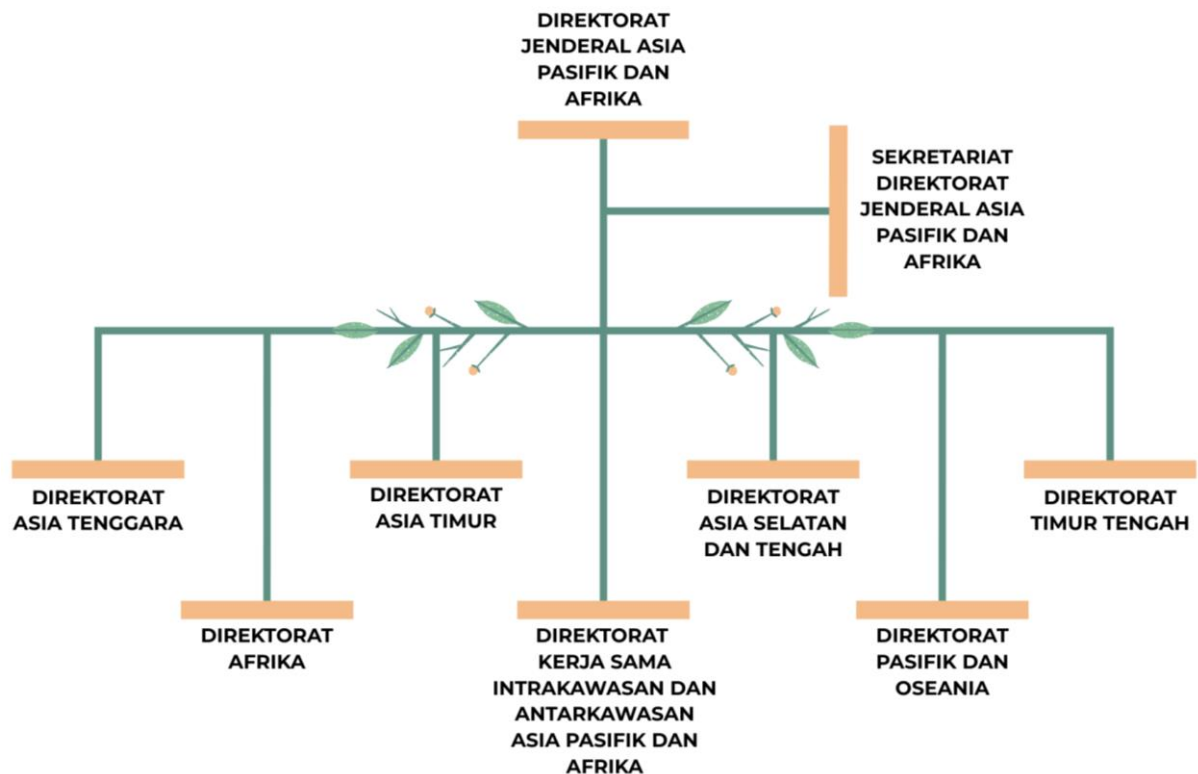
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 150 Tahun 2024, Direktorat Jenderal Asia Pasifik terdiri atas Sekretariat Direktorat Jenderal dan paling banyak 7 direktorat. Sekretariat Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. Dalam hal tugas dan fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal tidak dapat dilaksanakan oleh jabatan fungsional, dapat dibentuk paling banyak 5 (lima) bagian yang terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. Dalam hal tugas dan fungsi bagian tidak dapat dilaksanakan oleh jabatan fungsional, dapat dibentuk 3 (tiga) sub bagian.

Direktorat pada Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. Dalam hal tugas dan fungsi direktorat tidak dapat dilaksanakan oleh jabatan fungsional, dapat dibentuk paling banyak 5 (lima) subdirektorat serta subbagian yang menangani fungsi ketatausahaan. Subdirektorat terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. Pembentukan bagian, subbagian, sub direktorat dilakukan secara selektif dan didasarkan pada kriteria yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Struktur organisasi Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika terdiri dari:

1. Sekretariat Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika
2. Direktorat Asia Tenggara
3. Direktorat Asia Timur
4. Direktorat Pasifik dan Oseania
5. Direktorat Asia Selatan dan Tengah
6. Direktorat Timur Tengah
7. Direktorat Afrika
8. Direktorat Kerja Sama Intrakawasan dan Antarkawasan Asia Pasifik dan Afrika

Gambar III.1 Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika



Sumber: Permenlu Nomor 4 Tahun 2025

III.5.4 Evaluasi Kelembagaan dan Penyederhanaan Birokrasi

Kementerian Luar Negeri telah melakukan evaluasi kelembagaan pada tahun 2022, serta evaluasi penyederhanaan struktur organisasi yang dilaksanakan setiap tahun. Sesuai dengan hasil evaluasi kelembagaan, Kementerian Luar Negeri mendapatkan peringkat P5 yang mencerminkan bahwa dari segi struktur dan proses, organisasi dinilai tergolong sangat efektif. Struktur dan organisasi yang ada dinilai memiliki kemampuan yang sangat tinggi untuk mengakomodir kebutuhan internal organisasi dan sangat mampu beradaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan eksternal organisasi.

Kementerian Luar Negeri telah menyederhanakan 697 struktur organisasi dalam Permenlu 2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri menjadi 493 struktur organisasi melalui Permenlu 6/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri. Guna memperkuat desain organisasi berbasis fungsional, dan sesuai arahan Presiden untuk menyederhanakan birokrasi, Kementerian Luar Negeri melakukan pengalihan unit organisasi eselon III dan IV menjadi berbasis fungsional secara bertahap. Penyederhanaan birokrasi sebagian besar dilakukan pada unit teknis yakni dengan menghapus struktur

jabatan administrator dan pengawas (eselon III dan IV) pada Direktorat dan Pusat, termasuk Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika.

Penyederhanaan birokrasi khususnya di tingkat Pusat juga memperhatikan pertimbangan khusus, antara lain dengan pimpinan unit kerja dengan kewenangan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pejabat manajerial yang membawahi beberapa rumpun jabatan, memegang kerahasiaan data dan informasi untuk kepentingan khusus, ketatausahaan pimpinan, serta menyesuaikan dengan standar dan kebiasaan internasional. Penyederhanaan birokrasi melalui optimalisasi jabatan fungsional bertujuan untuk percepatan pelayanan kepada pemangku kepentingan, mewujudkan organisasi yang efektif, efisien, dan *agile*, serta peningkatan profesionalisme ASN.

Pada tahun 2025, penyederhanaan organisasi kembali dilakukan dengan menghapus rumah jabatan struktural Eselon IV pada unit Sekretariat Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika serta menggantinya dengan jabatan fungsional. Dalam hal ini, Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika tetap berkomitmen mendukung Kemenlu untuk melanjutkan penyederhanaan birokrasi untuk membentuk organisasi yang semakin efisien.

III.6 Penguatan Ketatalaksanaan dan Proses Bisnis

Kementerian Luar Negeri telah menetapkan peta proses bisnis, serta standar operasional prosedur makro dan mikro melalui Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor 5 tahun 2022 tentang Peta Proses Bisnis dan Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor 6 tahun 2022 tentang SOP Makro Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan. Dengan penguatan mandat Kementerian Luar Negeri untuk memperkuat hubungan internasional yang kondusif serta berkontribusi pada tata kelola global yang lebih inklusif dan merupakan refleksi dari kepentingan nasional maka tetap perlu dilakukan penyempurnaan proses bisnis yang telah ada baik yang bersifat lintas unit organisasi di lingkungan Kementerian Luar Negeri, maupun lintas Kementerian/Lembaga.

Proses bisnis yang jelas diperlukan agar sistem kerja yang berlaku dapat lebih efektif dan efisien dalam mencapai tujuan Kementerian Luar Negeri serta tidak terjadi duplikasi ataupun kekosongan (*vacuum*).

III.7 Data Economic Intelligence

Sebagai bahan strategis untuk pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan dalam diplomasi ekonomi di Kementerian Luar Negeri, setiap tahunnya, Perwakilan RI diwajibkan membuat laporan *Data Economic Intelligence*. Penyusunan, penilaian dan pemanfaatan laporan DEI diatur melalui Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor 04/B/PR/08/2024/01 Tahun 2024 (Kepmenlu) tentang

Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pengelolaan *Data Economic Intelligence* di lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI di luar negeri.

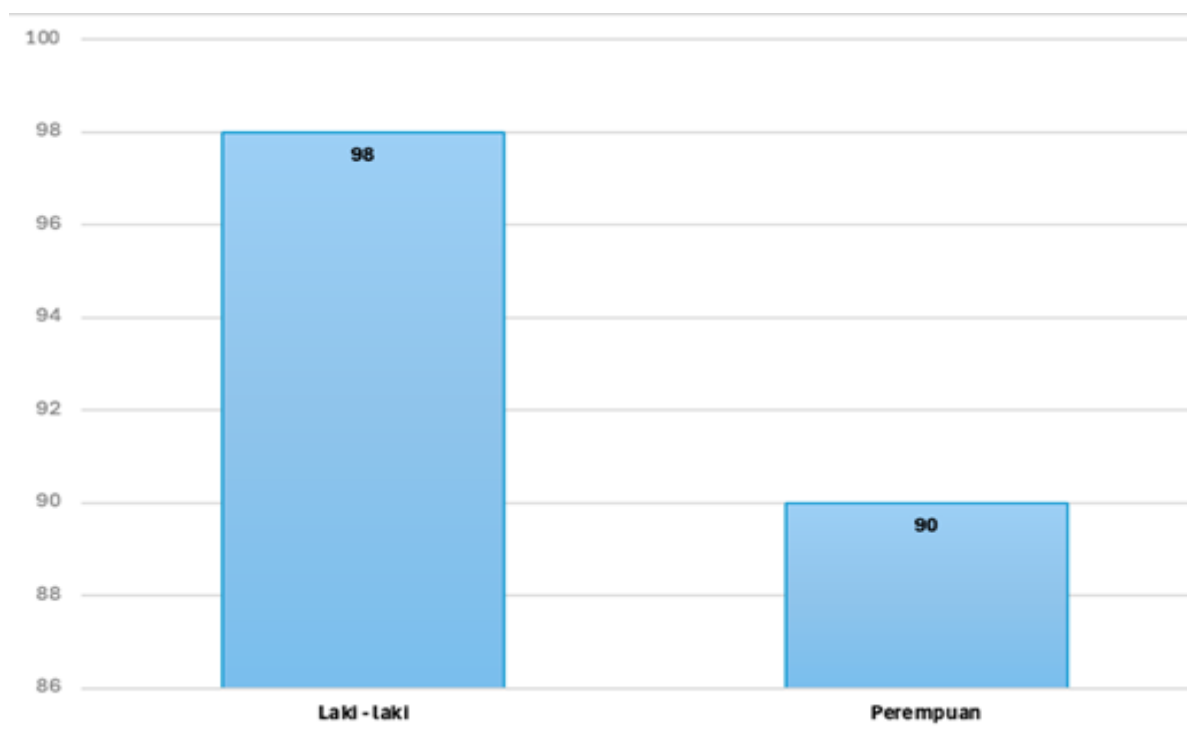
Laporan DEI disusun dengan sistematika dan analisis yang baik dalam penyediaan data makro yang spesifik seperti regulasi, kebijakan dan komoditas potensial serta adanya kiat pengembangan bisnis dan perluasan akses pasar di negara/wilayah tertentu.

Laporan DEI menjadi dasar dan ditindaklanjuti oleh Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika melalui beberapa kegiatan untuk menghasilkan capaian demi memajukan kepentingan nasional dan peningkatan diplomasi Indonesia.

III.8 Sumber Daya Manusia Berbasis Manajemen Talenta

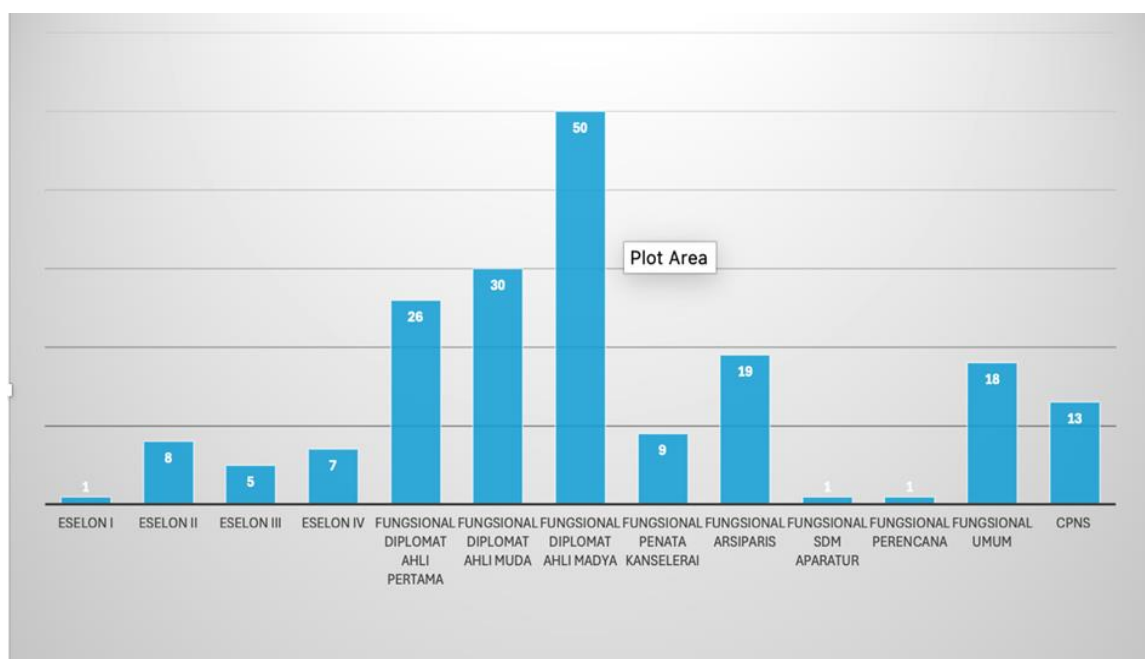
Pada tahun 2025, demografi ASN yang bertugas di Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika adalah sebagai berikut:

Gambar III.2 Demografi ASN Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika berdasarkan gender



Sumber: Data Ditjen Aspasaf 2025

Gambar III.3 Demografi ASN Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika berdasarkan jabatan



Sumber: Data Ditjen Aspasaf 2025

Dalam lima tahun ke depan, pengembangan pengelolaan SDM diarahkan pada terbangunnya sistem manajemen talenta yang terintegrasi, berbasis kompetensi, serta berorientasi pada kinerja dan hasil. Peningkatan kompetensi SDM tidak hanya difokuskan pada aspek pelatihan klasikal, tetapi juga pada pengembangan kompetensi non-klasikal melalui pembelajaran sosial dengan *coaching* dan *mentoring*, maupun pembelajaran melalui pengalaman melalui penugasan dan keterlibatan pada kegiatan. Hal ini diharapkan dapat mendorong pembentukan profil kompetensi yang sesuai dengan prioritas kawasan dan isu strategis nasional.

Dengan demikian, modalitas kompetensi diplomat akan semakin menjadi instrumen strategis dalam memperkuat kapasitas kelembagaan Ditjen Asia Pasifik dan Afrika, mewujudkan diplomasi yang adaptif, profesional, dan berdaya saing tinggi, serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan berorientasi hasil di lingkungan Kementerian Luar Negeri.

BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN UNIT ORGANISASI

IV.1 Target Kinerja

Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika telah menentukan 6 (enam) Sasaran Program yang merupakan cerminan dari sasaran strategis Kementerian Luar Negeri. Sasaran strategis ini hasil pencapaian program Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika yang turut berkontribusi pada capaian program dan sasaran strategis Kementerian Luar Negeri. Sasaran strategis dilengkapi dengan indikator kinerja sasaran strategis untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaiannya dari tahun ke tahun.

**Tabel IV.1 Sasaran Strategis, Indikator dan Target Kinerja
Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Periode 2025 – 2029**

No	Sasaran Program/ Indikator Kinerja	Target Kinerja					Satuan	Unit Penanggung Jawab
		2025	2026	2027	2028	2029		
1	SP: Nilai manfaat diplomasi ekonomi yang optimal di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika							
	IK : Indeks Efektivitas Diplomasi Ekonomi di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika	81	81,50	82	82,50	83	Indeks	1. Direktorat Astara, 2. Direktorat Asia Timur, 3. Direktorat Asia Selatan dan Tengah, 4. Direktorat Afrika, 5. Direktorat Timur Tengah 6. Direktorat Pasifik dan Oseania
2	SP: Kepemimpinan dan Peran Indonesia yang Berpengaruh di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika							
	IK : Persentase Kepemimpinan Indonesia pada	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase	Direktorat Kerja Sama Intrakawasan dan Antarkawasan

No	Sasaran Program/ Indikator Kinerja	Target Kinerja					Satuan	Unit Penanggung Jawab
		2025	2026	2027	2028	2029		
	Forum Regional di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika							Asia Pasifik dan Afrika
3	SP: Dukungan dan Komitmen Nasional atas Kebijakan Luar Negeri dan Kesepakatan Internasional yang Tinggi di Kawasan							
	IK : Persentase Kesepakatan Kerja Sama Bilateral di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan Dalam Negeri	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase	1. Direktorat Astara, 2. Direktorat Asia Timur, 3. Direktorat Asia Selatan dan Tengah, 4. Direktorat Afrika, 5. Direktorat Timur Tengah 6. Direktorat Pasifik dan Oseania
	IK : Persentase Prakarsa/ Rekomendasi pada Forum Kerja Sama Intrakawasan dan Antarkawasan Asia Pasifik dan Afrika yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan Dalam Negeri	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase	Direktorat Kerja Sama Intrakawasan dan Antarkawasan Asia Pasifik dan Afrika
4	SP: Diplomasi Bilateral yang Kuat di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika							
	IK :	97,45%	97,55%	97,75%	98%	98,15%	Persentase	1. Direktorat

No	Sasaran Program/ Indikator Kinerja	Target Kinerja					Satuan	Unit Penanggung Jawab
		2025	2026	2027	2028	2029		
	Persentase Kesepakatan Bilateral yang Dihasilkan di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika							Astara 2. Direktorat Asia Timur 3. Direktorat Asia Selatan dan Tengah 4. Direktorat Afrika 5. Direktorat Timur Tengah 6. Direktorat Pasifik dan Oseania
	IK : Persentase <i>Data Economic Intelligence</i> dari Kawasan Asia Pasifik dan Afrika yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan Dalam Negeri	98,53%	98,53%	99%	99%	100%	Persentase	1. Direktorat Astara 2. Direktorat Asia Timur, 3. Direktorat Asia Selatan dan Tengah 4. Direktorat Afrika 5. Direktorat Timur Tengah 6. Direktorat Pasifik dan Oseania
5	SP: Diplomasi Regional yang Kuat di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika							
	IK : Persentase Gagasan/ Prakarsa/ Rekomendasi Indonesia yang Diterima pada Forum Regional di kawasan Asia Pasifik dan Afrika	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase	1. Direktorat Kerja Sama Intrakawasan dan Antarkawasan Asia Pasifik dan Afrika Direktorat Pasifik dan Oseania

No	Sasaran Program/ Indikator Kinerja	Target Kinerja					Satuan	Unit Penanggung Jawab
		2025	2026	2027	2028	2029		
6	SP: Postur Diplomasi Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika yang Tangguh							
	IK : Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Kementerian Luar Negeri	83	87,4	87,45	87,46	87,47	Nilai	Sekretariat Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika
	IK : Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika	80,30 (A)	80,35 (A)	80,40 (A)	80,45 (A)	80,50 (A)	Nilai	Sekretariat Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika
	IK : Indeks Pengelolaan BMN Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika	3,5	3,65	3,75	3,85	3,88	Indeks	Sekretariat Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika
	IK : Nilai IKPA Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika	90	93,50	94	94	94,50	Nilai	Sekretariat Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika
	IK : Indeks Opini BPK atas Keuangan Kementerian Luar Negeri	4 (WTP)	4 (WTP)	4 (WTP)	4 (WTP)	4 (WTP)	Indeks	Sekretariat Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika

IV.2 Kerangka Pendanaan

Pencapaian tujuan dan sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan perlu didukung dengan berbagai sumber daya baik dukungan sumber daya manusia, prasarana yang memadai, dukungan regulasi serta sumber pendanaan.

Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika mengampu 2 (dua) program:

1. Program Diplomasi dan Kerja Sama Internasional
2. Program Dukungan Manajemen

Dukungan pendanaan, proyeksi kebutuhan anggaran Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika untuk mencapai tujuan dan sasaran periode 2025 – 2029 terdapat dalam tabel berikut.

**Tabel IV.2 Proyeksi Kebutuhan Anggaran
Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Periode 2025 – 2029**

No	Program / Rincian Output	Tahun				
		2025	2026	2027	2028	2029
Program Diplomasi dan Kerja Sama Internasional						
1	Kerja Sama di Kawasan Asia Tenggara	8.439.579.000	7.145.903.000	9.958.703.000	11.751.270.000	13.866.498.000
2	Kerja Sama di Kawasan Asia Timur	8.439.579.000	7.070.000.000	9.958.703.000	11.751.270.000	13.866.498.000
3	Kerja Sama di Kawasan Asia Selatan dan Tengah	7.250.000.000	6.570.000.000	8.555.000.000	10.094.900.000	11.911.982.000
4	Kerja Sama di Kawasan Timur Tengah	10.439.580.000	9.160.501.000	12.318.704.000	14.536.071.000	17.152.564.000
5	Kerja Sama di Kawasan Afrika Sub-Sahara	8.439.579.000	6.570.000.000	9.958.703.000	11.751.270.000	13.866.498.000

No	Program / Rincian Output	Tahun				
		2025	2026	2027	2028	2029
6	Kerja Sama di Kawasan Pasifik dan Oseania	4.500.000.000	5.160.074.000	5.310.000.000	6.265.800.000	7.393.644.000
7	Prakarsa/Rekomendasi Indonesia pada Forum Kerja Sama Intrakawasan dan Antarkawasan Asia dan Afrika	8.439.579.000	6.570.000.000	9.958.703.000	11.751.270.000	13.866.498.000
8	Prakarsa/Rekomendasi Indonesia pada Forum Kerja Sama Regional di Kawasan Pasifik dan Oseania	2.750.000.000	1.409.927.000	3.245.000.000	3.829.100.000	4.518.338.000
	Total Pagu Program Diplomasi dan Kerja Sama Internasional (dalam Rp)	58.697.896.000	49.656.404.000	69.263.516.000	81.730.951.000	96.442.520.000
No	Program / Rincian Output	Tahun				
		2025	2026	2027	2028	2029
Program Dukungan Manajemen						
9	Layanan Sarana Internal	82.975.000	114.000.000	241.921.000	285.467.000	336.851.000
10	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1.017.025.000	576.230.000	1.222.828.000	1.442.937.000	1.702.666.000

No	Program / Rincian Output	Tahun				
		2025	2026	2027	2028	2029
11	Layanan Perkantoran	5.786.810.000	2.979.169.000	6.322.149.000	7.460.134.000	8.802.959.000
12	Layanan BMN	-	160.000.000	339.539.000	400.656.000	472.774.000
	Total Pagu Program Dukungan Manajemen (dalam Rp)	6.886.810.000	3.829.399.000	8.126.437.000	9.589.194.000	11.315.250.000
Total		65.584.706.000	53.485.803.000	77.389.953.000	91.320.145.000	107.757.770.000

BAB V PENUTUP

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika periode 2025 – 2029 merupakan landasan fundamental untuk mengarahkan pelaksanaan diplomasi dan kerja sama internasional Indonesia di kawasan Asia Pasifik dan Afrika guna mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045.

Kawasan Asia Pasifik dan Afrika memiliki posisi strategis namun penuh tantangan, mulai dari instabilitas geopolitik, krisis energi dan pangan, hingga disrupsi teknologi. Menghadapi kondisi ini, Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika memfokuskan penguatan diplomasi di tengah dinamika situasi global melalui kerja sama di sektor prioritas untuk mewujudkan Asta Cita, penjagaan kedaulatan, dan peningkatan peran kepemimpinan Indonesia.

Pacific Elevation sebagai upaya strategis dalam meningkatkan *engagement*, peran kepemimpinan dan kerja sama Indonesia yang lebih mendalam di kawasan Pasifik. Solidaritas *Global South* yang diwariskan dari Konferensi Asia-Afrika (KAA) akan menjadi daya tawar yang relevan dan krusial, khususnya untuk membangun kemitraan yang seimbang dan mengoptimalkan kerja sama di forum regional, termasuk di sub-kawasan Pasifik, dan Afrika. Keberhasilan diplomasi Indonesia di periode mendatang akan semakin menegaskan konsistensi kepemimpinan serta peran konstruktif Indonesia dalam kemajuan berbagai sektor kerja sama di kawasan kunci ini. Penguatan diplomasi untuk menghadapi tantangan perlu lebih cermat dalam memanfaatkan peluang yang tersedia dengan optimalisasi modalitas yang dimiliki.

Dengan implementasi Rencana Strategis 2025 – 2029 yang terukur dan berpegang teguh pada visi yang ditetapkan, Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika optimis dapat memantapkan ketangguhan dan relevansi diplomasi Indonesia di kawasan Asia Pasifik dan Afrika. Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika berkomitmen penuh untuk melaksanakan tugas dan fungsi dengan landasan akuntabilitas, profesionalisme, dan orientasi hasil demi tercapainya pembangunan nasional yang berkesinambungan, dan pada akhirnya, mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045.



KEMENTERIAN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

RENCANA STRATEGIS

DIREKTORAT JENDERAL ASIA PASIFIK DAN AFRIKA
2025 – 2029

LAMPIRAN 1
MATRIKS ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI
DIREKTORAT JENDERAL ASIA PASIFIK DAN AFRIKA
2025 – 2029

NO	ARAH KEBIJAKAN KEMENLU	NO	STRATEGI KEMENLU	NO	STRATEGI DIREKTORAT JENDERAL ASIA PASIFIK DAN AFRIKA
1	Peningkatan diplomasi ekonomi untuk memajukan kemitraan ekonomi, meningkatkan daya saing, memperluas peluang, dan memperkuat posisi Indonesia;	a	Mendorong transformasi pertanian Indonesia, termasuk penguatan swasembada pangan, melalui kerja sama internasional di bidang teknologi pertanian, riset agrikultur, dan pembukaan akses pasar global bagi komoditas pertanian unggulan.	a	Mendorong transformasi pertanian Indonesia, termasuk penguatan swasembada pangan, melalui kerja sama internasional di bidang teknologi pertanian, riset agrikultur, dan pembukaan akses pasar global bagi komoditas pertanian unggulan.
		b	Memperluas kemitraan strategis di sektor energi baru dan terbarukan (EBT) melalui diplomasi energi, promosi investasi hijau, serta pengembangan rantai pasok global yang mendukung transisi energi nasional.	b	Memperluas kemitraan strategis di sektor energi baru dan terbarukan (EBT) melalui diplomasi energi, promosi investasi hijau, serta pengembangan rantai pasok global yang mendukung transisi energi nasional.
		c	Memfasilitasi ekspansi BUMN Indonesia di pasar global melalui promosi branding BUMN Go Global serta dukungan dan kolaborasi dalam program promosi terpadu di luar negeri.	c	Memfasilitasi ekspansi BUMN Indonesia di pasar global melalui promosi branding BUMN Go Global serta dukungan dan kolaborasi dalam program promosi terpadu di luar negeri.
		d	Mengembangkan ekosistem startup nasional melalui kerja sama internasional di bidang inovasi digital, teknologi kecerdasan buatan, serta peningkatan mobilitas dan kapasitas talenta muda Indonesia.	d	Mengembangkan ekosistem startup nasional melalui kerja sama internasional di bidang inovasi digital, teknologi kecerdasan buatan, serta peningkatan mobilitas dan kapasitas talenta muda Indonesia.
		e	Mendorong penghapusan hambatan perdagangan terhadap produk unggulan Indonesia serta memperkuat posisi tawar Indonesia dalam forum-forum ekonomi internasional guna melindungi kepentingan nasional.	e	Mendorong penghapusan hambatan perdagangan terhadap produk unggulan Indonesia serta memperkuat posisi tawar Indonesia dalam forum-forum ekonomi internasional guna melindungi kepentingan nasional.
		f	Mengarusutamakan diplomasi ekonomi digital sebagai penggerak pertumbuhan inklusif, melalui penguatan kerja sama di bidang AI, keamanan siber, ekonomi kreatif, dan transformasi digital lintas negara.	f	Mengarusutamakan diplomasi ekonomi digital sebagai penggerak pertumbuhan inklusif, melalui penguatan kerja sama di bidang AI, keamanan siber, ekonomi kreatif, dan transformasi digital lintas negara.
		g	Menggalang dukungan internasional bagi pembangunan hijau di Indonesia melalui optimalisasi akses terhadap pendanaan iklim, promosi investasi hijau, dan diplomasi pembangunan berkelanjutan yang berbasis prinsip keadilan iklim.	g	Menggalang dukungan internasional bagi pembangunan hijau di Indonesia melalui optimalisasi akses terhadap pendanaan iklim, promosi investasi hijau, dan diplomasi pembangunan berkelanjutan yang berbasis prinsip keadilan iklim.
		h	Memperkuat kerja sama maritim regional dan global untuk mendukung penguatan ekonomi biru (blue economy), perlindungan sumber daya laut, konektivitas, serta peningkatan kapasitas.	h	Memperkuat kerja sama maritim di kawasan Asia Pasifik dan Afrika serta pada forum global untuk mendukung penguatan ekonomi biru (blue economy), perlindungan sumber daya laut, konektivitas, serta peningkatan kapasitas.
		i	Mendorong perluasan akses dan penetrasi dagang Indonesia dengan negara-negara potensial non-tradisional guna mengantisipasi fluktuasi perdagangan eksisting, terutama negara besar.	i	Mendorong perluasan akses dan penetrasi dagang Indonesia dengan negara-negara potensial non-tradisional guna mengantisipasi fluktuasi perdagangan eksisting, terutama negara besar.
		j	Mendorong pemanfaatan instrumen kebijakan ekonomi negara/wilayah akreditasi untuk kepentingan Indonesia, terutama pada proyek strategis nasional, perluasan basis produksi industri manufaktur, hilirisasi, dan penguatan ketahanan pangan.	j	Mendorong pemanfaatan instrumen kebijakan ekonomi negara/wilayah akreditasi untuk kepentingan Indonesia, terutama pada proyek strategis nasional, perluasan basis produksi industri manufaktur, hilirisasi, dan penguatan ketahanan pangan.
		k	Mendorong finalisasi <i>Grand Design</i> Diplomasi Ekonomi.	k	Mendorong finalisasi <i>Grand Design</i> Diplomasi Ekonomi.
		l	Mendorong finalisasi <i>Grand Design</i> Strategi Kebijakan Indonesia di Kawasan Pasifik (<i>Pacific Elevation</i>);	l	Mendorong finalisasi <i>Grand Design</i> Strategi Kebijakan Indonesia di Kawasan Pasifik (<i>Pacific Elevation</i>).
		m	Memperkuat strategi kebijakan luar negeri yang mendukung Asta Cita, seperti isu ketahanan pangan, energi dan air.	m	Memperkuat strategi kebijakan luar negeri yang mendukung Asta Cita, seperti isu ketahanan pangan, energi dan air.
		n	Mendorong solusi iklim yang adil dan inklusif melalui UNFCCC, kerja sama regional, dan kemitraan lainnya.	n	Mendorong solusi iklim yang adil dan inklusif melalui UNFCCC, kerja sama regional, dan kemitraan lainnya.
		o	Mendorong Pemanfaatan dashboard Investolink dan pengembangan Sistem Informasi Diplomasi Ekonomi (SIDE) dalam mendukung upaya penguatan diplomasi ekonomi.	o	Mendorong Pemanfaatan dashboard Investolink dan pengembangan Sistem Informasi Diplomasi Ekonomi (SIDE) dalam mendukung upaya penguatan diplomasi ekonomi.

2	Peningkatan kepemimpinan dan pengaruh Indonesia di kawasan regional dan global sebagai kekuatan positif, aktor kunci, dan bagian dari solusi yang berkontribusi terhadap stabilitas, perdamaian, serta kemakmuran kawasan dan dunia;	a	Meningkatkan peran aktif dan kepemimpinan Indonesia di tingkat global di tengah dinamika geopolitik internasional melalui diplomasi yang berdasarkan prinsip politik luar negeri bebas aktif, di OI seperti PBB, maupun lembaga multilateral lainnya.	a	Meningkatkan peran aktif dan kepemimpinan Indonesia di tingkat global di tengah dinamika geopolitik internasional melalui diplomasi yang berdasarkan prinsip politik luar negeri bebas aktif.
		b	Melanjutkan peran aktif Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia dalam forum-forum bilateral, regional, maupun multilateral sesuai dengan amanat konstitusi, serta memperkuat dukungan diplomasi terhadap upaya kemerdekaan dan kedaulatan Palestina.	b	Melanjutkan peran aktif Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia dalam forum-forum bilateral, regional, maupun multilateral sesuai dengan amanat konstitusi, serta memperkuat dukungan diplomasi terhadap upaya kemerdekaan dan kedaulatan Palestina.
		c	Memperkuat kerja sama multilateral dan regional dalam isu-isu terkait perdamaian dan keamanan internasional, hak asasi manusia, migrasi, kebencanaan, demokrasi, kerja sama ekonomi strategis, pembangunan berkelanjutan, kemaritiman, lingkungan hidup, serta kemitraan strategis, kesehatan global, kependudukan, pendidikan, kebudayaan, ketenagakerjaan, pariwisata, kerja sama parlemen, dan ilmu pengetahuan dan teknologi di berbagai badan utama dan subsektor PBB serta forum kerja sama multilateral dan regional lainnya yang menguntungkan kepentingan nasional.	c	Memperkuat kerja sama multilateral dan regional dalam isu-isu terkait perdamaian dan keamanan internasional, hak asasi manusia, migrasi, kebencanaan, demokrasi, kerja sama ekonomi strategis, pembangunan berkelanjutan, kemaritiman, lingkungan hidup, serta kemitraan strategis, kesehatan global, kependudukan, pendidikan, kebudayaan, ketenagakerjaan, pariwisata, kerja sama parlemen, dan ilmu pengetahuan dan teknologi di berbagai badan utama dan subsektor PBB serta forum kerja sama multilateral dan regional lainnya yang menguntungkan kepentingan nasional.
		d	Mengoptimalkan keanggotaan Indonesia pada pelbagai forum internasional dan kawasan, utamanya keanggotaan baru pada BRICS, untuk menyuarakan dan mendorong inisiatif-inisiatif baru yang makin mengakomodasi kepentingan nasional dan kepentingan Global South.	d	Mengoptimalkan keanggotaan Indonesia pada pelbagai forum internasional dan kawasan, untuk menyuarakan dan mendorong inisiatif-inisiatif baru yang makin mengakomodasi kepentingan nasional dan kepentingan Global South.
		e	Mendorong penyelesaian damai dan berkelanjutan atas krisis Myanmar melalui fasilitasi dialog inklusif, penguatan peran ASEAN, serta kerja sama regional dan internasional guna mewujudkan stabilitas dan perdamaian kawasan.	e	Mendorong penyelesaian damai dan berkelanjutan atas krisis Myanmar melalui fasilitasi dialog inklusif, penguatan peran ASEAN, serta kerja sama regional dan internasional guna mewujudkan stabilitas dan perdamaian kawasan.
		f	Meningkatkan peran Indonesia baik melalui mekanisme bilateral maupun ASEAN dalam penyelesaian krisis kemanusiaan di Rakhine State, Myanmar guna tercapainya repatriasi yang aman, sukarela, dan bermartabat bagi para pengungsi serta mendorong terciptanya stabilitas keamanan di Rakhine State.	f	Meningkatkan peran Indonesia baik melalui mekanisme bilateral maupun ASEAN dalam penyelesaian krisis kemanusiaan di Rakhine State, Myanmar guna tercapainya repatriasi yang aman, sukarela, dan bermartabat bagi para pengungsi serta mendorong terciptanya stabilitas keamanan di Rakhine State.
		g	Meningkatkan kerja sama dan trust-building di kawasan Indo-Pasifik yang terfokus pada pengembangan kerja sama kemaritiman, konektivitas dan infrastruktur, serta Pembangunan.	g	Meningkatkan kerja sama dan trust-building di kawasan Indo-Pasifik yang terfokus pada pengembangan kerja sama kemaritiman, konektivitas dan infrastruktur, serta Pembangunan.
		h	Menunjukkan kepemimpinan Indonesia selaku koordinator kemitraan ASEAN-Australia periode 2024-2027 melalui 4 (empat) prioritas utama sebagaimana disampaikan pada 57th AMM/PMC pada Juli 2024, dalam bidang politik (terkait pencegahan konflik dan pengelolaan krisis; kerja sama maritim; mendorong transparansi dan nonproliferasi di kawasan), dalam bidang ekonomi (terkait ketahanan pangan; transisi energi yang berkeadilan; serta implementasi efektif ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area (AANZFTA) dan RCEP), dalam bidang sosial budaya (terkait pemanfaatan ASEAN-Australia Centre), dan dalam Implementasi AOIP (dengan memanfaatkan kemitraan ASEAN-Australia sebagai sarana dalam meningkatkan engagement dengan Pacific Island Forum (PIF) dan Indian Ocean Rim Association (IORA)).	h	Menunjukkan kepemimpinan Indonesia selaku koordinator kemitraan ASEAN-Australia periode 2024-2027 melalui 4 (empat) prioritas utama sebagaimana disampaikan pada 57th AMM/PMC pada Juli 2024, dalam bidang politik (terkait pencegahan konflik dan pengelolaan krisis; kerja sama maritim; mendorong transparansi dan non-proliferasi di kawasan), dalam bidang ekonomi (terkait ketahanan pangan; transisi energi yang berkeadilan; serta implementasi efektif ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area (AANZFTA) dan RCEP), dalam bidang sosial budaya (terkait pemanfaatan ASEAN-Australia Centre), dan dalam Implementasi AOIP (dengan memanfaatkan kemitraan ASEAN-Australia sebagai sarana dalam meningkatkan engagement dengan Pacific Island Forum (PIF), Melanesian Spearhead Group (MSG) dan Indian Ocean Rim Association (IORA)).
		i	Mendorong pemanfaatan upaya Australia dalam meningkatkan investasi dan perdagangan dua arah di kawasan Asia Tenggara dan untuk mengakomodasi kepentingan Indonesia dalam bidang ketahanan pangan, transisi energi berkelanjutan, dan pembangunan Joint Ventures, pertukaran pengetahuan, serta fasilitas pendanaan di sektor-sektor prioritas melalui implementasi Invested: Australia's Southeast Asia Economic Strategy to 2040.	i	Mendorong pemanfaatan upaya Australia dalam meningkatkan investasi dan perdagangan dua arah di kawasan Asia Tenggara dan untuk mengakomodasi kepentingan Indonesia dalam bidang ketahanan pangan, transisi energi berkelanjutan, dan pembangunan Joint Ventures, pertukaran pengetahuan, serta fasilitas pendanaan di sektor-sektor prioritas melalui implementasi Invested: Australia's Southeast Asia Economic Strategy to 2040.
		j	Mendorong keterwakilan Indonesia dan atau Warga Negara Indonesia untuk menduduki posisi-posisi strategis di organisasi internasional guna memastikan pengaruh dan kepemimpinan Indonesia dalam proses penyusunan norma dan atau kebijakan organisasi internasional.	j	Mendorong keterwakilan Indonesia dan atau Warga Negara Indonesia untuk menduduki posisi-posisi strategis di organisasi internasional guna memastikan pengaruh dan kepemimpinan Indonesia dalam proses penyusunan norma dan atau kebijakan organisasi internasional.
		k	Menegaskan kepemimpinan Indonesia melalui optimalisasi pemanfaatan peran Indonesia sebagai ketua dan/atau tuan rumah pertemuan serta pusat koordinasi kerja sama regional dan internasional yang berlokasi di Indonesia. Memperkuat dialog perumusan kebijakan luar negeri (di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan) melalui <i>Policy Planning Dialogue</i> dengan mitra strategis.	k	Menegaskan kepemimpinan Indonesia melalui optimalisasi pemanfaatan peran Indonesia sebagai ketua dan/atau tuan rumah pertemuan serta pusat koordinasi kerja sama regional dan internasional yang berlokasi di Indonesia. Memperkuat dialog perumusan kebijakan luar negeri (di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan) melalui <i>Policy Planning Dialogue</i> dengan mitra strategis.
		l	Meningkatkan kemitraan dengan akademisi dan lembaga think tank dan mendorong peran dan kontribusinya dalam perumusan strategi kebijakan nasional terkait kerja sama di berbagai Kawasan dan forum multilateral, serta isu khusus.	l	Meningkatkan kemitraan dengan akademisi dan lembaga think tank dan mendorong peran dan kontribusinya dalam perumusan strategi kebijakan nasional terkait kerja sama di berbagai Kawasan dan forum multilateral, serta isu khusus.
		m	Melaksanakan survei dan penyusunan foresight untuk mempersiapkan strategi kebijakan dalam menghadapi tantangan global dan regional ke depan, termasuk trend-trend global. Mendorong Kemitraan antara Parlemen dan Pemerintah dan antar-Parlemen Negara Anggota ASEAN (AIPA) dalam memastikan keselarasan berbagai kesepakatan di ASEAN.	m	Melaksanakan survei dan penyusunan foresight untuk mempersiapkan strategi kebijakan dalam menghadapi tantangan global dan regional ke depan, termasuk trend-trend global. Mendorong Kemitraan antara Parlemen dan Pemerintah dan antar-Parlemen Negara Anggota Asian Parliamentary Assembly.
3	Penguatan postur diplomasi guna meningkatkan wibawa politik luar negeri Indonesia.	a	Memperkuat Infrastruktur dan sumber daya diplomasi dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan/ penyelenggaraan kebijakan luar negeri.	a	Memperkuat postur dan sumber daya diplomasi dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan/ penyelenggaraan kebijakan luar negeri.
		b	Memperkuat kinerja koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian penyelenggaraan hubungan luar negeri Indonesia melalui pengembangan kemampuan komponen postur diplomasi.	b	Memperkuat kinerja koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian penyelenggaraan hubungan luar negeri Indonesia melalui pengembangan kemampuan komponen postur diplomasi.
		c	Memperkuat strategi transformasi digital sebagai upaya penguatan <i>diplomatic tools</i> Kemlu.	c	Memperkuat strategi transformasi digital sebagai upaya penguatan <i>diplomatic tools</i> Kemlu.
		d	Mendukung penguatan kapasitas SDM berperspektif gender dan membentuk tim penggerak PUG lintas unit.	d	Mendukung penguatan kapasitas SDM berperspektif gender dan membentuk tim penggerak PUG lintas unit.

Tabel 1 Matriks Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika

LAMPIRAN 2
Matriks Kinerja dan Pendanaan
Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika
2025 – 2029

PROGRAM/ KEGIATAN	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT/ RINCIAN OUTPUT/ UNIT ORGANISASI	SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	Target					SATUAN	Alokasi (ribu rupiah)				
				2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029
Diplomasi dan Kerja Sama Internasional										Rp58,697,896	Rp49,656,404	Rp69,263,516	Rp81,730,951	Rp96,442,520
	Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika	Nilai Manfaat Diplomasi Ekonomi yang Optimal di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika	Indeks Efektivitas Diplomasi Ekonomi di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika	81	81,5	82	82,5	83	Indeks					
		Kepemimpinan dan Peran Indonesia yang Berpengaruh di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika	Persentase Kepemimpinan Indonesia pada Forum Regional di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase					
		Dukungan dan Komitmen Nasional atas Kebijakan Luar Negeri dan Kesepakatan Internasional yang Tinggi di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika	Persentase Kesepakatan Kerja Sama Bilateral di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika yang Ditindaklanjuti oleh <i>Stakeholders</i> Dalam Negeri	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase					
			Persentase Prakarsa/ Rekomendasi pada Forum Kerja Sama Intrakawasan dan Antarkawasan Asia Pasifik dan Afrika yang Ditindaklanjuti oleh <i>Stakeholders</i> Dalam Negeri	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase					
		Diplomasi Bilateral yang Kuat di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika	Persentase Kesepakatan Bilateral yang Dihasilkan di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika	97,45%	97,55%	97,75%	98%	98,15%	Persentase					
			Persentase <i>Data Economic Intelligence</i> dari Kawasan Asia Pasifik dan Afrika yang Ditindaklanjuti oleh <i>Stakeholders</i> Dalam Negeri	98,53%	98,53%	99%	99%	100%	Persentase					
		Diplomasi Regional yang Kuat di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika	Persentase Gagasan/ Prakarsa/ Rekomendasi Indonesia yang Diterima pada Forum Regional di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase					
	KRO Forum									Rp11,189,579	Rp7,979,927	Rp13,203,703	Rp15,580,370	Rp18,384,836
	RO Prakarsa/Rekomendasi Indonesia pada Forum Kerjasama Intrakawasan dan Antarkawasan Asia dan Afrika			29	26	30	30	30	Forum	Rp8,439,579	Rp6,570,000	Rp9,958,703	Rp11,751,270	Rp13,866,498
	Prakarsa/Rekomendasi Indonesia pada Forum Kerjasama Intrakawasan dan Antarkawasan Asia dan Afrika	Kepemimpinan dan Peran Indonesia yang Berpengaruh di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika	Persentase Kepemimpinan Indonesia pada Forum Regional di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase					
		Dukungan dan Komitmen Nasional atas Kebijakan Luar Negeri dan Kesepakatan Internasional yang Tinggi di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika	Persentase Prakarsa/ Rekomendasi pada Forum Kerja Sama Intrakawasan dan Antarkawasan Asia Pasifik dan Afrika yang Ditindaklanjuti oleh <i>Stakeholders</i> Dalam Negeri	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase					
		Diplomasi Regional yang Kuat di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika	Persentase Gagasan/ Prakarsa/ Rekomendasi Indonesia yang Diterima pada Forum Regional di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase					
			Jumlah pemangku kepentingan yang mendapatkan informasi pemanfaatan forum Kerja Sama Intrakawasan dan Antarkawasan Asia Pasifik dan Afrika	21	22	23	24	26	Jumlah					
			Jumlah dukungan substantif kepada pemangku kepentingan yang dimanfaatkan pada forum kerja sama Intrakawasan dan antarkawasan Asia Pasifik dan Afrika	12	13	14	15	16	Jumlah					
		Tata Kelola Organisasi di Direktorat Kerjasama Intrakawasan dan Antarkawasan Asia dan Afrika	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Direktorat Kerjasama Intrakawasan dan Antarkawasan Asia dan Afrika	79,70 (BB)	80 (BB)	81,50 (A)	82 (A)	82,50 (A)	Nilai					
	RO Prakarsa/Rekomendasi Indonesia pada Forum Kerjasama Intrakawasan dan Antarkawasan Pasifik dan Oseania			4	3	4	4	5	Forum	Rp2,750,000	Rp1,409,927	Rp3,245,000	Rp3,829,100	Rp4,518,338
	Prakarsa/Rekomendasi Indonesia pada Forum Kerjasama Intrakawasan dan Antarkawasan Pasifik dan Oseania	Dukungan dan Komitmen Nasional atas Kebijakan Luar Negeri dan Kesepakatan Internasional yang Tinggi di Kawasan Pasifik dan Oseania	Persentase prakarsa/rekomendasi pada Forum Regional di Kawasan Pasifik dan Oseania yang Ditindaklanjuti oleh Pemegang Kepentingan Dalam Negeri	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase					
		Diplomasi Regional yang Kuat di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika	Persentase Gagasan/ Prakarsa/ Rekomendasi Indonesia yang Diterima pada Forum Regional di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase					

	KRO Kerja Sama										Rp47,508,317	Rp41,676,478	Rp56,059,813	Rp66,150,581	Rp78,057,684
	RO Kerja Sama di Kawasan Asia Tenggara			20	10	24	26	28	Kesepakatan		Rp8,439,579	Rp7,145,903	Rp9,958,703	Rp11,751,270	Rp13,866,498
	Direktorat Asia Tenggara	Nilai Manfaat Diplomasi Ekonomi yang Optimal di Kawasan Asia Tenggara	Indeks Efektivitas Diplomasi Ekonomi di Kawasan Asia Tenggara	81	81,5	82	82,5	83	Indeks						
		Dukungan dan Komitmen Nasional atas Kebijakan Luar Negeri dan Kesepakatan Internasional yang Tinggi di Kawasan Asia Tenggara	Persentase Kesepakatan Kerja Sama Bilateral di Kawasan Asia Tenggara yang Ditindaklanjuti oleh <i>Stakeholders</i> Dalam Negeri	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase						
		Diplomasi Bilateral yang Kuat di Kawasan Asia Tenggara	Jumlah Kesepakatan Bilateral yang Dihasilkan di Kawasan Asia Tenggara	40	41	42	43	44	Dokumen						
			Persentase <i>Data Economic Intelligence</i> dari Kawasan Asia Tenggara yang Ditindaklanjuti oleh <i>Stakeholders</i> Dalam Negeri	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase						
		Tata Kelola Organisasi di Direktorat Asia Tenggara yang Baik	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Direktorat Asia Tenggara	79,50 (BB)	80 (BB)	80,50 (A)	81 (A)	81,50 (A)	Nilai						
	RO Kerja Sama di Kawasan Asia Timur			22	22	23	24	24	Kesepakatan		Rp8,439,579	Rp7,070,000	Rp9,958,703	Rp11,751,270	Rp13,866,498
	Direktorat Asia Timur	Nilai Manfaat Diplomasi Ekonomi yang Optimal di Kawasan Asia Timur	Indeks Efektivitas Diplomasi Ekonomi di Kawasan Asia Timur	81	81,5	82	82,5	83	Indeks						
		Dukungan dan Komitmen Nasional atas Kebijakan Luar Negeri dan Kesepakatan Internasional yang Tinggi di Kawasan Asia Timur	Persentase Kesepakatan Kerja Sama Bilateral di Kawasan Asia Timur yang Ditindaklanjuti oleh <i>Stakeholders</i> Dalam Negeri	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase						
		Diplomasi Bilateral yang Kuat di Kawasan Asia Timur	Jumlah Kesepakatan Bilateral yang Dihasilkan di Kawasan Asia Timur	12	13	14	15	16	Jumlah						
			Persentase <i>Data Economic Intelligence</i> dari Kawasan Asia Timur yang Ditindaklanjuti oleh <i>Stakeholders</i> Dalam Negeri	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase						
		Tata Kelola Organisasi di Direktorat Asia Timur yang Baik	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Direktorat Asia Timur	79,90 (BB)	80 (BB)	80,50 (A)	81 (A)	81,50 (A)	Nilai						
	RO Kerja Sama di Kawasan Asia Selatan dan Tengah			27	12	17	18	19	Kesepakatan		Rp7,250,000	Rp6,570,000	Rp8,555,000	Rp10,094,900	Rp11,911,982
	Direktorat Asia Selatan dan Tengah	Nilai Manfaat Diplomasi Ekonomi yang Optimal di Kawasan Asia Selatan dan Tengah	Indeks Efektivitas Diplomasi Ekonomi di Kawasan Asia Selatan dan Tengah	81	81,5	82	82,5	83	Indeks						
		Dukungan dan Komitmen Nasional atas Kebijakan Luar Negeri dan Kesepakatan Internasional yang Tinggi di Kawasan Asia Selatan dan Tengah	Persentase Kesepakatan Kerja Sama Bilateral di Kawasan Asia Selatan dan Tengah yang Ditindaklanjuti oleh <i>Stakeholders</i> Dalam Negeri	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase						
		Diplomasi Bilateral yang Kuat di Kawasan Asia Selatan dan Tengah	Jumlah Kesepakatan Bilateral yang Dihasilkan di Kawasan Asia Selatan dan Tengah	12	13	14	15	16	Dokumen						
			Persentase <i>Data Economic Intelligence</i> dari Kawasan Asia Selatan dan Tengah yang Ditindaklanjuti oleh <i>Stakeholders</i> Dalam Negeri	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase						
		Tata Kelola Organisasi di Direktorat Asia Selatan dan Tengah yang Baik	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Direktorat Asia Selatan dan Tengah	79,65 (BB)	80 (BB)	80,50 (A)	81 (A)	81,50 (A)	Nilai						

	RO Kerja Sama di Kawasan Timur Tengah			16	12	17	17	18	Kesepakatan	Rp10,439,580	Rp9,160,501	Rp12,318,704	Rp14,536,071	Rp17,152,564
	Direktorat Timur Tengah	Nilai Manfaat Diplomasi Ekonomi yang Optimal di Kawasan Timur Tengah	Indeks Efektivitas Diplomasi Ekonomi di Kawasan Timur Tengah	81	81,5	82	82,5	83	Indeks					
		Dukungan dan Komitmen Nasional atas Kebijakan Luar Negeri dan Kesepakatan Internasional yang Tinggi di Kawasan Timur Tengah	Persentase Kesepakatan Kerja Sama Bilateral di Kawasan Timur Tengah yang Ditindaklanjuti oleh <i>Stakeholders</i> Dalam Negeri	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase					
			Persentase respon positif terhadap bantuan kerjasama Pemerintah RI untuk Kedutaan Besar Palestina di Jakarta	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase					
		Diplomasi Bilateral yang Kuat di Kawasan Timur Tengah	Jumlah Kesepakatan Bilateral yang Dihasilkan di Kawasan Timur Tengah	20	21	22	23	24	Dokumen					
			Persentase Data Economic Intelligence dari Kawasan Timur Tengah yang Ditindaklanjuti oleh <i>Stakeholders</i> Dalam Negeri	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase					
		Tata Kelola Organisasi di Direktorat Timur Tengah yang Baik	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Direktorat Timur Tengah	79,10 (BB)	80 (BB)	80,50 (A)	81 (A)	81,50 (A)	Nilai					
	RO Kerja Sama di Kawasan Afrika			9	8	10	10	10	Kesepakatan	Rp8,439,579	Rp6,570,000	Rp9,958,703	Rp11,751,270	Rp13,866,498
	Direktorat Afrika	Nilai Manfaat Diplomasi Ekonomi yang Optimal di Kawasan Afrika Sub-Sahara	Indeks Efektivitas Diplomasi Ekonomi di Kawasan Afrika Sub-Sahara	81	81,5	82	82,5	83	Indeks					
		Dukungan dan Komitmen Nasional atas Kebijakan Luar Negeri dan Kesepakatan Internasional yang Tinggi di Kawasan Afrika Sub-Sahara	Persentase Kesepakatan Kerja Sama Bilateral di Kawasan Afrika Sub-Sahara yang Ditindaklanjuti oleh <i>Stakeholders</i> Dalam Negeri	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase					
		Diplomasi Bilateral yang Kuat di Kawasan Afrika Sub-Sahara	Jumlah Kesepakatan Bilateral yang Dihasilkan di Kawasan Afrika Sub-Sahara	14	14	15	15	16	Dokumen					
			Persentase Data Economic Intelligence dari Kawasan Afrika Sub-Sahara yang Ditindaklanjuti oleh <i>Stakeholders</i> Dalam Negeri	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase					
		Tata Kelola Organisasi di Direktorat Afrika Sub-Sahara yang Baik	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Direktorat Afrika Sub-Sahara	80 (BB)	81,50 (A)	82 (A)	82,50 (A)	83 (A)	Nilai					
	RO Kerja Sama di Kawasan Pasifik dan Oseania			14	9	11	11	13	Kesepakatan	Rp4,500,000	Rp5,160,074	Rp5,310,000	Rp6,265,800	Rp7,393,644
	Direktorat Pasifik dan Oseania	Nilai Manfaat Diplomasi Ekonomi yang Optimal di Kawasan Pasifik dan Oseania	Indeks Efektivitas Diplomasi Ekonomi di Kawasan Pasifik dan Oseania	81	81,5	82	82,5	83	Indeks					
		Dukungan dan Komitmen Nasional atas Kebijakan Luar Negeri dan Kesepakatan Internasional yang Tinggi di Kawasan Pasifik dan Oseania	Persentase Kesepakatan Kerja Sama Bilateral di Kawasan Pasifik dan Oseania yang Ditindaklanjuti oleh <i>Stakeholders</i> Dalam Negeri	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase					
		Diplomasi Bilateral yang Kuat di Kawasan Pasifik dan Oseania	Jumlah Kesepakatan Bilateral yang Dihasilkan di Kawasan Pasifik dan Oseania	9	10	11	12	13	Jumlah					
			Persentase <i>Data Economic Intelligence</i> dari Kawasan Pasifik dan Oseania yang Ditindaklanjuti oleh <i>Stakeholders</i> Dalam Negeri	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase					
		Tata Kelola Organisasi di Direktorat Pasifik dan Oseania yang Baik	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Direktorat Pasifik dan Oseania	77,40 (BB)	80 (BB)	80,50 (A)	81 (A)	81,50 (A)	Nilai					

Dukungan Manajemen											Rp6,886,810	Rp3,829,399	Rp8,126,437	Rp9,589,194	Rp11,315,250
	Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika	Infrastruktur Diplomasi yang Kuat di Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Kementerian Luar Negeri	83	83.5	84	84.5	85	Nilai						
			Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika	80,30 (A)	80,35 (A)	80,40 (A)	80,45 (A)	80,50 (A)	Nilai						
			Indeks Pengelolaan BMN Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika	3,5	3,65	3,75	3,85	3,88	Indeks						
			Nilai IKPA Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika	90	93.5	94	94	94.5	Nilai						
			Indeks Opini BPK atas Keuangan Kementerian Luar Negeri	4 (WTP)	4 (WTP)	4 (WTP)	4 (WTP)	4 (WTP)	Indeks						
	KRO Layanan Dukungan Manajemen Internal									Rp6,803,835	Rp3,715,399	Rp7,884,516	Rp9,303,727	Rp10,978,399	
	RO Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal			1	1	1	1	1	Layanan	Rp1,017,025	Rp576,230	Rp1,222,828	Rp1,442,937	Rp1,702,666	
	RO Layanan Perkantoran			1	1	1	1	1	Layanan	Rp5,786,810	Rp2,979,169	Rp6,322,149	Rp7,460,134	Rp8,802,959	
	RO Layanan BMN				1	1	1	1	Layanan		Rp160,000	Rp339,539	Rp400,656	Rp472,774	
	KRO Layanan Sarana dan Prasarana Internal									Rp82,975	Rp114,000	Rp241,921	Rp285,467	Rp336,851	
	RO Layanan Sarana Internal			9	10	11	12	13	Unit	Rp82,975	Rp114,000	Rp241,921	Rp285,467	Rp336,851	
	Sekretariat Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika	Tata Kelola Organisasi Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika yang Baik	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika	80,30 (A)	80,35 (A)	80,40 (A)	80,45 (A)	80,50 (A)	Nilai						
		Pengelolaan Aset Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika yang Optimal	Indeks Pengelolaan BMN Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika	3,50	3,65	3,75	3,85	3,88	Indeks						
		Pengelolaan Anggaran Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika yang Akuntabel	Nilai IKPA Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika	90	93,50	94	94	94,50	Nilai						
		Penyelenggaraan Kegiatan Diplomasi Ekonomi Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika yang Efektif	Jumlah Fasilitas Kerja Sama Ekonomi dengan <i>Stakeholders</i> di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika	5	5	5	6	7	Laporan						
		Tata Kelola Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika yang Baik	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Sekretariat Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika	80,10 (A)	80,20 (A)	80,30 (A)	80,40 (A)	80,50 (A)	Nilai						

Tabel 2 Matriks Arah Kinerja dan Pendanaan Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika



RENCANA STRATEGIS

DIREKTORAT JENDERAL ASIA PASIFIK DAN AFRIKA

2025 - 2029